



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PT GANSA FURINDO;**  
NPWP : 01.084.733.3-431.000;  
Nomor Tanggal Akta Pendirian : Akta Notaris Sutjipto, SH., Nomor 19  
Tanggal 08 September 1994;  
Tanggal Terdaftar : 21 September 1994;  
Tanggal Pengukuhan PKP : 26 September 1994;  
Alamat Usaha : Jl. Akasia II Delta Silicon Blok A9 No. 8  
Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;  
Kebangsaan Korporasi : Indonesia;  
Bentuk Usaha : PT (Perseroan Terbatas);  
Jenis Usaha : Jasa Pengecatan (Paint and Powder  
Coating) Part Kendaraan Bermotor;

Berdasarkan Surat Penunjukan dari PT GANSA FURINDO, tanggal 13 Oktober 2020, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, diwakili oleh Pengurus :

Nama Lengkap : **YOHANES SUSETYO MUHANDOKO;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 23-09-1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Gemini Blok A 15/13 SKU RT/RW  
001/001 Desa Mekarsari, Kecamatan  
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT Gansa  
Furindo);

Terdakwa didampingi oleh **Teguh Haryanto, S.H., M.Si. dan Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pandawa Law Office Advokat yang beralamat di Teha Office Ruko Sentra Niaga Timur 3

Halaman 1 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A3 No 9 Harapan Indah Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 502/SK/PLO/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. GANSA FURINDO dalam hal ini Korporasi diwakili oleh Yohanes Susatyo Muhandoko selaku Direktur Utama PT. GANSA FURINDO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp. 2.639.670.984,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah) = Rp 5,279, 341,968 (lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah
<b>Dokumen PT MENARA TERUS MAKMUR</b>		
1.	Perjanjian Kerjasama ( <i>Cooperation Agreement</i> ) No 18 Lembar Dokumen CA-018/LDPUR/MTM/XIII tanggal 2	

Halaman 2 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	Desember 2013	
2.	Daftar pembelian dan faktur pajak PT GANSA FURINDO tahun 2018	100 Lembar
3.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.06.18.MT-0036, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0151/MTM/V/2018, GF/0136/MTM/IV/2018, GF/0142/MTM/V/2018, GF/0139/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	267 Lembar
4.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-2.07.18.MT-0214, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor:GF/0171/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	147 Lembar
5.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-2.07.18.MT.0214, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor:GF/0178/MTM/VII/2018, GF/0182/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	172 Lembar
6.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor:GF/0211/MTM/VII/2018, GF/0214/MTM/VII/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	136 Lembar
7.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor:GF/0215/MTM/VII/2018, GF/0217/MTM/VII/2018, GF/0205/MTM/VII/2018, GF/0201/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	257 Lembar
8.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.12.18.MT.0184, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0315/MTM/X/2018, GF/0312/MTM/X/2018, GF/0322/MTM/X/2018, GF/0325/MTM/X/2018, GF/0340/MTM/X/2018, Surat Jalan, Goods receipt	310 Lembar



	From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	
9.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-2.01.19.MT.0187, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0355/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	80 Lembar
10.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.01.19.MT.0187, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0377/MTM/XII/2018, GF/0377/MTM/XI/2018, GF/0360/MTM/XI/2018, GF/0348/MTM/XI/2018, GF/0350/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	386 Lembar
11.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0003, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0002/MTM/II/2018, GF/0017/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	181 Lembar
12.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0113/MTM/IV/2018, GF/0097/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	178 Lembar
13.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0110/MTM/IV/2018, GF/0101/MTM/IV/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	218 Lembar
14.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0041/MTM/II/2018, GF/0030/MTM/II/2018, GF/0038/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	140 Lembar
15.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming	110 Lembar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0034/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	
16.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.04.18.MT.0057, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0058/MTM/II/2018, GF/0064/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	139 Lembar
<b>Dokumen PT KAYABA INDONESIA</b>		
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Februari 2018	8 lembar
18.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
19.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
20.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
21.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	2 lembar
22.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
23.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Maret 2018	6 lembar
24.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
25.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
26.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
27.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak April 2018	5 lembar
28.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
29.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar
30.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
31.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Mei 2018	6 lembar
32.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987829 tanggal	2 lembar

Halaman 5 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	09-MAY-18	
33.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
34.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
35.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
36.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juni 2018	5 lembar
37.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	3 lembar
38.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
39.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juli 2018	5 lembar
40.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
41.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
42.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
43.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Desember 2018	6 lembar
44.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
45.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
46.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
47.	Purchase Agreement (Perjanjian Jual/Beli) antara PT Kayab Indonesia dan PT Gansa Furindo tanggal 29 November 2016	28 lembar
<b>Dokumen PT MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS</b>		
48.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988097 tanggal 28 Feb 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0044 dan Quotation Summary	15 lembar
49.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988114 tanggal 28 Februari 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0061, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
50.	Surat Pemberitahuan (Revisi) Nomor: 011/GF/II/2018 tgl 3 Februari 2018	8 lembar

Halaman 6 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



51.	Surat Jalan Februari 2018	179 lembar
52.	Purchase Order Februari 2018	6 lembar
53.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988142 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0089, dan Purchase Order	18 lembar
54.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988143 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0090, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar
55.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988152 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0099 dan Surat Jalan	21 lembar
56.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988161 tanggal 15 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0108 dan Tanda Terima Invoice	6 lembar
57.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988183 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0130 dan Tanda Terima Invoice	9 lembar
58.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988184 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0131, Tanda Terima Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
59.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987843 tanggal 25 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0154, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
60.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987854 tanggal 31 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0165 dan Quotation Summary	17 lembar
61.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987877 tanggal 28 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0188, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
62.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987888 tanggal 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0199	9 lembar
63.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987907 tanggal 11 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0219, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar
64.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987919 tanggal 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0231	10 lembar
65.	Faktur Pajak Nomor Seri "0110021863985246 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice,	16 lembar



	Invoice GF/0393, dan Purchase Order	
66.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985247 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0394, Surat Jalan dan Purchase Order	14 lembar
<b>Dokumen PT GLOBAL DIMENSI METALINDO</b>		
67.	Bukti Pengeluaran Bank No.45 BK tanggal 6 Juni 2018,Permintaan transfer,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0121/GDM/IV/2018 tanggal 30 April 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63988174 tanggal 30 April 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 007/CDM/XII/17	29 Lembar
68.	Bukti Pengeluaran Bank No.47 BK tanggal 6 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0155/GDM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63987844 tanggal 30 Mei 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 016/GDM/VI/18	16 Lembar
69.	Bukti Pengeluaran Bank No.133 BK tanggal 17 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0200/GDM/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63987889 tanggal 30 Juni 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 014/GDM/VII/18	15 Lembar
70.	Bukti Pengeluaran Bank No.43 BK tanggal 05 September 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0221/GDM/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987909 tanggal 30 Juli 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 012/GDM/VIII/18	18 Lembar
71.	Bukti Pengeluaran Bank No.35 BK tanggal 12 Februari 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0396/GDM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63985249 tanggal 20 Desember 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No:	9 Lembar





	008/GDM/I/19	
<b>Dokumen PT MEGATAMA SPRING</b>		
72.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0027/MS/I/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988080 tgl 31/01/2018,</li><li>• Invoice GF/0376/MS/XI/2018 tanggal 30/11/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985229 tgl 30/11/2018,</li><li>• Invoice GF/0135/MS/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988188 tgl 30/04/2018,</li><li>• Invoice GF/0166/MS/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987855 tgl 30/04/2018,</li><li>• Invoice GF/0082/MS/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988135 tgl 31/03/2018,</li><li>• Invoice GF/0194/MS/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987883 tgl 30/06/2018,</li><li>• Invoice GF/0225/MS/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987913 tgl 31/07/2018,</li><li>• Invoice GF/0269/MS/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987957 tgl 31/08/2018,</li><li>• Invoice GF/0343/MS/X/2018 tanggal 31/10/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985196 tgl 31/10/2018,</li><li>• Invoice GF/0398/MS/XII/2018 tanggal 31/12/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985251 tgl 31/12/2018,</li><li>• Invoice GF/0302/MS/IX/2018 tanggal 30/09/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985155 tgl 30/09/2018,</li></ul>	51 Lembar
73.	1 Set Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 800113856200 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Maret 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan April 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Mei 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Juni 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Juli 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Agustus 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan September 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Oktober 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan November 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Desember 2018;</li></ul>	12 Lembar



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Januari 2019;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Februari 2019.</li></ul>	
<b>Dokumen PT ASAHI DENSO INDONESIA</b>		
74.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0049/ADI/II/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988102 tgl 28 Februari 2018, Rekap Surat Jalan Feb 2018 dan Nota Pembatalan NP 007/II/2018	12 lembar
75.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0075/ADI/III/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988128 tgl 29 Maret 2018, Rekap Surat Jalan Maret 2018 dan Nota Pembatalan NP 012/III/2018	11 lembar
76.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0115/ADI/IV/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988168 tgl 27 April 2018, Rekap Surat Jalan April 2018 dan Nota Pembatalan NP 017/IV/2018	11 lembar
77.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0160/ADI/V/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987849 tgl 31 Mei 2018, Rekap Surat Jalan Mei 2018 dan Nota Pembatalan NP 021/V/2018	11 lembar
78.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0186/ADI/VI/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987875 tgl 29 Juni 2018, Rekap Surat Jalan Juni 2018 dan Nota Pembatalan NP 026/VI/2018	8 lembar
79.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0230/ADI/VII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987918 tgl 31 Juli 2018, Rekap Surat Jalan Juli 2018 dan Nota Pembatalan NP 030/VII/2018	11 lembar
80.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0390/ADI/XII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63985243 tgl 24 Desember 2018, Rekap Surat Jalan Des 2018 dan Nota Pembatalan NP 057/XII/2018	8 lembar
81.	Fotokopi Rekening Bank Mizuho Indonesia a.n PT ASAHI DENSO INDONESIA Nomor 3058540151 periode Januari s.d Desember 2018	12 lembar
<b>Dokumen PT UMEDA FACTORY INDONESIA</b>		
82.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988105, Invoice No GF/0052/UFI/II/2018, Debit Note 003/DB/UFI/II/18,Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
83.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988138, 010.002-18.63988139,Invoice No GF/0085/UFI/III/2018,	8 lembar



	GF/0086/UFI/III/2018, Debit Note 005;006/DB/UFI/III/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	
84.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988179, Invoice No GF/0126/UFI/IV/2018, Debit Note 007;008/DB/UFI/IV/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	5 lembar
85.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987853, Invoice No GF/0164/UFI/V/2018, Debit Note 012/DB/UFI/V/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
86.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987886, Invoice No GF/0197/UFI/VI/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	3 lembar
87.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987916, Invoice No GF/0228/UFI/VII/2018, Debit Note 017/DB/UFI/VII/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
88.	Faktur Pajak No 010.002-18.63985254, Invoice No GF/0401/UFI/XII/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
<b>Dokumen PT BAKRIE AUTOPARTS</b>		
89.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0025/BA/II/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 011.002-18.63988078 tgl 31/01/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/04/2018;</li><li>• Invoice GF/0046/BA/II/2018 tanggal 28/02/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988099 tgl 28/02/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 18/05/2018;</li><li>• Invoice GF/0083/BA/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988136 tgl 31/03/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 02/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0119/BA/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988172 tgl 30/04/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0169/BA/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987858 tgl 31/05/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/08/2018;</li></ul>	25 Lembar



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoice GF/0202/BA/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li> <li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987891 tgl 30/06/2018,</li> <li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 01/10/2018;</li> <li>• Invoice GF/0237/BA/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li> <li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987905 tgl 31/07/2018,</li> <li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 21/06/2019;</li> <li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 15/11/2018;</li> <li>• Invoice GF/0270/BA/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li> <li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987958 tgl 31/08/2018,</li> <li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/02/2020;</li> </ul>	
<b>Dokumen PT MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA</b>		
90.	DETAIL PAYMENT TO GANSA, Bukti TranTerdakwa dan SURAT PERINTAH kepada Bank	51 lembar
91.	Invoice No: GF/0125/MAI/IV/2018 tgl 30 April 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	37 lembar
92.	Invoice No: GF/0198/MAI/VI/2018 tgl 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	42 lembar
93.	Invoice No: GF/0208/MAI/VII/2018 tgl 13 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	78 lembar
94.	Invoice No: GF/0229/MAI/VII/2018 tgl 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	99 lembar
95.	Invoice No: GF/0391/MAI/XII/2018 tgl 26 Desember 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	104 lembar
<b>Dokumen TERDAKWA PELAPOR</b>		
96.	1 Set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-8/WPJ.22/2020 tanggal 24 Juli 2020	33 lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAHCIPTA</b>		
97.	Rekap Penjualan ke PT GANSA FURINDO tahun 2018	1 Lembar
98.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 84/3, Invoice	3 Lembar



	GF/0023/CNC/I/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988076	
99.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 40/4, Invoice GF/0043/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988096	3 Lembar
100.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 26/5, Invoice GF/0077/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988130	3 Lembar
101.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 37/6, Invoice GF/0133/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988186	3 Lembar
102.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 70/7, Invoice GF/0157/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987846	3 Lembar
103.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 53/8, Invoice GF/0195/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987884	3 Lembar
104.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 8/9, Invoice GF/0224/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987912	3 Lembar
105.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 2/10, Invoice GF/0257/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987945	3 Lembar
106.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 1/11, Invoice GF/0290/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985143	3 Lembar
107.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 30/12, Invoice GF/0341/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985194	3 Lembar
108.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 17/1, Invoice	3 Lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GF/0362/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985215	
109.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 16/2, Invoice GF/0395/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985248	3 Lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAH CEMERLANG</b>		
110.	Perincian Invoice dan Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO Tahun 2018	1 Lembar
111.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0024/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988077, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	5 Lembar
112.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0042/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988095, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
113.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0078/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988131, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
114.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0129/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988182, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
115.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0156/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987845, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
116.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0189/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987878, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
117.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0220/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987908, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
118.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0262/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987950, Pesanan Pembelian dan Bukti	7 Lembar

Halaman 14 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	Pengeluaran Bank	
119.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0291/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985144, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
120.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0342/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985195, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	9 Lembar
121.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0363/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985216, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
122.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0408/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985261, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	4 Lembar
123.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0392/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985245, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
<b>Dokumen NUR EFFENDI (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
124.	Printout Daftar Pajak Keluaran PT GANSA FURINDO Masa 201801 – 201812	14 lembar
125.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
126.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
127.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
128.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak September 2018	7 lembar
129.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Oktober 2018	7 lembar
130.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
131.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
<b>Dokumen NANA MAULANA RAHMAT (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
132.	Nota Penghitungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2017	12 lembar
133.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil	19 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Desember 2017	
134.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Januari 2018	18 lembar
<b>Dokumen PT CABININDO PUTRA</b>		
135.	Invoice (GF/0048/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988101), Bukti Transfer (2708-1) , Debit Note (017-DN/CP/II/18)	5 Lembar
136.	Invoice (GF/0060/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988113), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
137.	Invoice (GF/0080/CP/III/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988133), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
138.	Invoice (GF/0081/CP/III/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988134), Bukti Transfer (2991-1)	4 Lembar
139.	Invoice (GF/0128/CP/IV/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988181), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
140.	Invoice (GF/0132/CP/IV/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988185), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
141.	Invoice (GF/0158/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987847), Bukti Transfer (3537-1), Surat perubahan no. rekening	4 Lembar
142.	Invoice (GF/0159/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987848), Bukti Transfer (3537-1)	4 Lembar
143.	Invoice (GF/0187/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987876), Bukti Transfer (3671-1)	3 Lembar
144.	Invoice (GF/0193/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987882), Bukti Transfer (3671-1)	4 Lembar
145.	Invoice (GF/0233/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987921), Bukti Transfer (3978-1)	4 Lembar
146.	Invoice (GF/0234/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987922), Bukti Transfer (3978-1)	3 Lembar
147.	Invoice (GF/0386/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985239), Bukti Transfer (5666-1)	4 Lembar
148.	Invoice (GF/0399/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985252), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
149.	Invoice (GF/0405/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985258), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
<b>Dokumen AKHMAD INDRA WIRAWAN (Direktur PT GANSA FURINDO)</b>		
150.	AKTA tanggal 8 September 1994 Nomor 19 Notaris	1 lembar

Halaman 16 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	SUTJIPTO. SH.	
151.	AKTA tanggal 8 Mei 2014 Nomor 227 dan AKTA tanggal 12 Mei 2014 Nomor 332 Notaris ROSITA RIANAU LI SIANIPAR, S.H. M.Kn	1 lembar
152.	AKTA tanggal 07 April 2019 Nomor 01 Notaris INDRA WAHYUDI, S.H., M.Kn	1 lembar
153.	Surat Nomor AHU-AH.01.03-0372582 tanggal 13 Desember 2019 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 2 Notaris WINDA FEBRIANI, S.H., M.Kn.	1 lembar
154.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Desember 2015	1 lembar
155.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Mei 2016	1 lembar
156.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 7 Juni 2016	1 lembar
157.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 5 Februari 2018	1 lembar
158.	Bagan Layout Produksi PT GANSA FURINDO	1 lembar
159.	Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar	5 lembar
160.	Laporan Penjualan Lokal PT GANSA FURINDO Januari s.d Desember 2018	108 lembar
161.	Rekening Bank BNI Cabang JABABEKA Nomor rekening 5555666176 periode tanggal 14/09/2017 s.d 12/09/2018 atas nama PT GANSA FURINDO	12 lembar
162.	Account Statement BNI No. 3987398733 - GANSA FURINDO periode 01 Jan 2018 s.d 31 Des 2018	42 lembar
163.	Rekening Giro Bank Artha Graha International, Tbk. atas nama GANSA FURINDO Nomer Rekening 0921215151 periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018	14 lembar
164.	Laporan TranTerdakwa Bank BRI atas nama PT GANSA FURINDO No. Rekening 114401000386308 periode 01/01/18 s.d 31/12/18	47 lembar
165.	SPT Masa PPN tahun 2018 masa pajak Agustus, September, Oktober dan November	46 lembar
166.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
167.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988055 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
168.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988056 tanggal 31-	2 lembar



	JAN-18	
169.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988057 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
170.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988058 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
171.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988059 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
172.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988060 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
173.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988061 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
174.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988062 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
175.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988063 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
176.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988064 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
177.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988065 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
178.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988066 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
179.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988067 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
180.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988068 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
181.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988069 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
182.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988070 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
183.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
184.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
185.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988073 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
186.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988074 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
187.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988075 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
188.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988076 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
189.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988077 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
190.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988079 tanggal 31-JAN-18	1 lembar





	JAN-18	
191.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988080 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
192.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988081 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
193.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988082 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
194.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988083 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
195.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988078 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
196.	Nota Retur Nomor MAI/2018/I/09/LOC/S tanggal 02/01/2018	2 lembar
197.	Nota pembatalan Nomor 004/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
198.	Nota pembatalan Nomor 005/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
199.	Nota pembatalan Nomor 006/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
200.	Nota pembatalan Nomor 007/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
201.	Nota retur Nomor 023/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
202.	Nota retur Nomor 024/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
203.	Nota retur Nomor 025/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
204.	Nota retur Nomor 026/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
205.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988084 tanggal 01-FEB-18	2 lembar
206.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988085 tanggal 08-FEB-18	2 lembar
207.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
208.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988087 tanggal 14-FEB-18	1 lembar
209.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988088 tanggal 14-FEB-18	2 lembar
210.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988089 tanggal 15-FEB-18	1 lembar
211.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988090 tanggal 20-FEB-18	2 lembar
212.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988091 tanggal 22-FEB-18	1 lembar
213.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988092 tanggal 22-FEB-18	2 lembar
214.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988094 tanggal 26-FEB-18	1 lembar
215.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988095 tanggal 26-FEB-18	1 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	4 lembar
217.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988096 tanggal 27-FEB-18	1 lembar
218.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988098 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
219.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988099 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
220.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
221.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988101 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
222.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988102 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
223.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988103 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
224.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988104 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
225.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988105 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
226.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988107 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
227.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988108 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
228.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988109 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
229.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988110 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
230.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988111 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
231.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988112 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
232.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988113 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
233.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988114 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
234.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988097 tanggal 28-FEB-18	4 lembar
235.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988106 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
236.	Nota Retur Nomor 048/NR/02/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
237.	Nota Retur Nomor 060/NR/02/2018 tgl 08-FEB-18	1 lembar
238.	Nota Retur Nomor 072/NR/02/2018 tgl 01-FEB-18	1 lembar

Halaman 20 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



239.	Debit Note Nomor MAI/2018/II/05/LOC/S tanggal 01-FEB-18	4 lembar
240.	Nota Pembatalan Nomor NP007/II/2018 tanggal 28-FEB-18	3 lembar
241.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988115 tanggal 01-MAR-18	1 lembar
242.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988116 tanggal 08-MAR-18	2 lembar
243.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988117 tanggal 08-MAR-18	1 lembar
244.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
245.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988119 tanggal 12-MAR-18	1 lembar
246.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988120 tanggal 15-MAR-18	2 lembar
247.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988121 tanggal 15-MAR-18	1 lembar
248.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988122 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
249.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988123 tanggal 22-MAR-18	1 lembar
250.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988124 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
251.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988125 tanggal 22-MAR-18	2 lembar
252.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988126 tanggal 25-MAR-18	1 lembar
253.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
254.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988128 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
255.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988129 tanggal 29-MAR-18	2 lembar
256.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988130 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
257.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988131 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
258.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988132 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
259.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988133 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
260.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988135 tanggal 31-MAR-18	2 lembar



	MAR-18	
261.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988136 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
262.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988137 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
263.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988138 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
264.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988139 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
265.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988140 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
266.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988141 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
267.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988143 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
268.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988144 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
269.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988145 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
270.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988146 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
271.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
272.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988148 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
273.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988149 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
274.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988150 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
275.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988151 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
276.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988134 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
277.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988142 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
278.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988152 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
279.	Nota pembatalan Nomor 018/NP/III/2018 tanggal 08-03-18	1 lembar
280.	Nota pembatalan Nomor 019/NP/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
281.	Nota pembatalan Nomor 020/NP/III/2018 tgl 16-03-18	1 lembar
282.	Nota pembatalan nomor 022/NP/III/2018 tgl 27-03-18	1 lembar
283.	Nota Retur Nomor 083/NR/III/2018 tgl 08-03-18	1 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284.	Nota Retur nomor 089/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
285.	Nota retur Nomor 101/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
286.	Nota Retur Nomor 111/NR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018	1 lembar
287.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/07/LOC/S tgl 01-MAR-18	5 lembar
288.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/12/LOC/S tgl 31-03-18	5 lembar
289.	Nota Pembatalan Nomor NP012/III/2018 tanggal 31-03-18	3 lembar
290.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988153 tanggal 05-APR-18	2 lembar
291.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988154 tanggal 10-APR-18	1 lembar
292.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar
293.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988156 tanggal 10-APR-18	1 lembar
294.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988157 tanggal 12-APR-18	2 lembar
295.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988158 tanggal 15-APR-18	1 lembar
296.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988160 tanggal 15-APR-18	1 lembar
297.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988161 tanggal 15-APR-18	2 lembar
298.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988159 tanggal 15-APR-18	2 lembar
299.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988162 tanggal 19-APR-18	2 lembar
300.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988163 tanggal 19-APR-18	1 lembar
301.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988164 tanggal 20-APR-18	1 lembar
302.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988165 tanggal 21-APR-18	1 lembar
303.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988166 tanggal 25-APR-18	1 lembar
304.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
305.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988168 tanggal 27-APR-18	3 lembar
306.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988169 tanggal 26-APR-18	2 lembar

Halaman 23 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988170 tanggal 27-APR-18	1 lembar
308.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988171 tanggal 30-APR-18	1 lembar
309.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988172 tanggal 30-APR-18	1 lembar
310.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988173 tanggal 30-APR-18	1 lembar
311.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988174 tanggal 30-APR-18	1 lembar
312.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988175 tanggal 30-APR-18	1 lembar
313.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988176 tanggal 30-APR-18	1 lembar
314.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988177 tanggal 30-APR-18	1 lembar
315.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988179 tanggal 30-APR-18	1 lembar
316.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988180 tanggal 30-APR-18	2 lembar
317.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988181 tanggal 30-APR-18	2 lembar
318.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988182 tanggal 30-APR-18	1 lembar
319.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988184 tanggal 30-APR-18	1 lembar
320.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988186 tanggal 30-APR-18	1 lembar
321.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
322.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988188 tanggal 30-APR-18	2 lembar
323.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988189 tanggal 30-APR-18	1 lembar
324.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988190 tanggal 29-APR-18	1 lembar
325.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988178 tanggal 30-APR-18	2 lembar
326.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988183 tanggal 30-APR-18	4 lembar
327.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988185 tanggal 30-APR-18	2 lembar
328.	Nota Pembatalan Nomor '023/NP/IV/2018 tanggal 07-	1 lembar

Halaman 24 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	APR-18	
329.	Nota Pembatalan Nomor '024/NP/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar
330.	Nota Pembatalan Nomor '031/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
331.	Nota Pembatalan Nomor '032/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
332.	Nota Pembatalan Nomor '033/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
333.	Nota Pembatalan Nomor '034/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
334.	Nota Pembatalan Nomor '035/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
335.	Nota Retur Nomor '123/NR/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
336.	Nota Retur Nomor '124/NR/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar
337.	Nota Retur Nomor '142/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
338.	Nota Retur Nomor '143/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
339.	Nota Retur Nomor '161/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
340.	Nota Retur Nomor '162/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
341.	Nota Retur Nomor '163/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
342.	Nota Pembatalan Nomor 'NP017/IV/2018 tanggal 30-APR-18	3 lembar
343.	Debit Note No: DN 001/2018 tgl 30-APR-18	1 lembar
344.	Debit Note No: 007/DB/UFI/IV/18 tgl 30-APR-18	3 lembar
345.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987827 tanggal 03-MAY-18	2 lembar
346.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987828 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
347.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar
348.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987830 tanggal 10-MAY-18	2 lembar
349.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987831 tanggal 15-MAY-18	1 lembar
350.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987833 tanggal 16-MAY-18	1 lembar
351.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
352.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987835 tanggal 17-MAY-18	2 lembar
353.	Faktur Pajak Nomor '0710021863987834 tanggal 17-MAY-18	3 lembar
354.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987836 tanggal 20-	1 lembar



	MAY-18	
355.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987837 tanggal 21-MAY-18	1 lembar
356.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987838 tanggal 24-MAY-18	2 lembar
357.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
358.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987840 tanggal 22-MAY-18	1 lembar
359.	Debit Note No: DN 002/2018 tgl 25 mei 2018	1 lembar
360.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987842 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
361.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987843 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
362.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987841 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
363.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987844 tanggal 30-MAY-18	1 lembar
364.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987845 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
365.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987846 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
366.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987847 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
367.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987848 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
368.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987849 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
369.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987850 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
370.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987851 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
371.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987852 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
372.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987853 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
373.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987855 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
374.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
375.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987857 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
376.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987858 tanggal 31-MAY-18	1 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAY-18	
377.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987860 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
378.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987861 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
379.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987863 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
380.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987859 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
381.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987854 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
382.	Nota Pembatalan Nomor '039/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
383.	Nota Pembatalan Nomor '041/NP/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
384.	Nota Pembatalan Nomor '042/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
385.	Nota Pembatalan Nomor '044/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
386.	Nota Pembatalan Nomor '045/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
387.	Nota Pembatalan Nomor '046/NP/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
388.	Nota Pembatalan Nomor '047/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
389.	Nota Pembatalan Nomor '048/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
390.	Nota Pembatalan Nomor '049/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
391.	Nota Retur Nomor '172/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
392.	Nota Retur Nomor '188/NR/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
393.	Nota Retur Nomor '189/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
394.	Nota Retur Nomor '206/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
395.	Nota Retur Nomor '207/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
396.	Nota Retur Nomor '208/NR/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
397.	Nota Retur Nomor '226/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
398.	Nota Retur Nomor '227/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
399.	Nota Retur Nomor '228/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
400.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/V/02/LOC/S tanggal 01-MAY-18	3 lembar
401.	Nota Pembatalan Nomor 'NP021/V/2018 tanggal 31-MAY-18	3 lembar
402.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987864 tanggal 30-	1 lembar

Halaman 27 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	JUN-18	
403.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987865 tanggal 07-JUN-18	2 lembar
404.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987866 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
405.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987867 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
406.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987869 tanggal 20-JUN-18	1 lembar
407.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987870 tanggal 21-JUN-18	2 lembar
408.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987871 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
409.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987873 tanggal 15-JUN-18	1 lembar
410.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987874 tanggal 28-JUN-18	2 lembar
411.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987875 tanggal 29-JUN-18	1 lembar
412.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987876 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
413.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987877 tanggal 28-JUN-18	1 lembar
414.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987878 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
415.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
416.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987880 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
417.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987881 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
418.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987882 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
419.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987883 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
420.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987884 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
421.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987885 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
422.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987886 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
423.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987887 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
424.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987889 tanggal 30-JUN-18	1 lembar





	JUN-18	
425.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987890 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
426.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987891 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
427.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987892 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
428.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	6 lembar
429.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987888 tanggal 30-JUN-18	4 lembar
430.	Nota Pembatalan Nomor '053/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
431.	Nota Pembatalan Nomor '054/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
432.	Faktur Pajak Nomor '0700021863987868 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
433.	Nota Retur Nomor '246/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
434.	Nota Retur Nomor '247/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
435.	Faktur Pajak Nomor 'NP026/VI/2018 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
436.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987893 tanggal 05-JUL-18	2 lembar
437.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987894 tanggal 09-JUL-18	2 lembar
438.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
439.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987896 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
440.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987897 tanggal 13-JUL-18	1 lembar
441.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987898 tanggal 14-JUL-18	1 lembar
442.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987899 tanggal 16-JUL-18	1 lembar
443.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987900 tanggal 19-JUL-18	2 lembar
444.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987901 tanggal 19-JUL-18	1 lembar
445.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987902 tanggal 20-JUL-18	1 lembar
446.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987903 tanggal 24-JUL-18	1 lembar
447.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar



	JUL-18	
448.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987905 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
449.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987906 tanggal 26-JUL-18	2 lembar
450.	Faktur Pajak Nomor 0100021863987907 tanggal 11-JUL-18	1 lembar
451.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987908 tanggal 28-JUL-18	1 lembar
452.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987909 tanggal 30-JUL-18	1 lembar
453.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987910 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
454.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987912 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
455.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987913 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
456.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987914 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
457.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987915 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
458.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987916 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
459.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987917 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
460.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987918 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
461.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987920 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
462.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987921 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
463.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987922 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
464.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987923 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
465.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987924 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
466.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987925 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
467.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987926 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
468.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987927 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
469.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987930 tanggal 31-JUL-18	1 lembar



	JUL-18	
470.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987911 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
471.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987919 tanggal 31-JUL-18	4 lembar
472.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/VII/003/LOC/S tanggal 01-JUL-18	7 lembar
473.	Faktur Pajak Nomor 'NP030/VII/2018 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
474.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987928 tanggal 02-AUG-18	2 lembar
475.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987929 tanggal 06-AUG-18	1 lembar
476.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987931 tanggal 04-AUG-18	1 lembar
477.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987932 tanggal 09-AUG-18	2 lembar
478.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987933 tanggal 13-AUG-18	2 lembar
479.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987934 tanggal 14-AUG-18	1 lembar
480.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987935 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
481.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987936 tanggal 15-AUG-18	1 lembar
482.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987937 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
483.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987938 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
484.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987939 tanggal 21-AUG-18	1 lembar
485.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987940 tanggal 23-AUG-18	2 lembar
486.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987941 tanggal 25-AUG-18	2 lembar
487.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987942 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
488.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987943 tanggal 28-AUG-18	1 lembar
489.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987944 tanggal 29-AUG-18	1 lembar
490.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987945 tanggal 30-AUG-18	1 lembar
491.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987946 tanggal 24-	1 lembar



	AUG-18	
492.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987947 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
493.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987948 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
494.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987950 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
495.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987951 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
496.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987952 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
497.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987953 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
498.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987954 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
499.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987955 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
500.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987956 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
501.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987957 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
502.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987958 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
503.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987959 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
504.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987960 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
505.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987961 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
506.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987962 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
507.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987949 tanggal 31-AUG-18	4 lembar
508.	Nota Pembatalan Nomor 'NP035/VIII/2018 tanggal 31-AUG-18	3 lembar
509.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985129 tanggal 06-SEP-18	1 lembar
510.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985130 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
511.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985131 tanggal 03-SEP-18	1 lembar
512.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985132 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
513.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985133 tanggal 17-	1 lembar



	SEP-18	
514.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985135 tanggal 15-SEP-18	2 lembar
515.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985136 tanggal 20-SEP-18	1 lembar
516.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985137 tanggal 20-SEP-18	2 lembar
517.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985138 tanggal 21-SEP-18	1 lembar
518.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985139 tanggal 22-SEP-18	1 lembar
519.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985140 tanggal 26-SEP-18	2 lembar
520.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985141 tanggal 27-SEP-18	2 lembar
521.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985143 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
522.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985144 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
523.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985146 tanggal 18-SEP-18	1 lembar
524.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985147 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
525.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985148 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
526.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985149 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
527.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985150 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
528.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985151 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
529.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985152 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
530.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985153 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
531.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985154 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
532.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985155 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
533.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985156 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
534.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985157 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
535.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985158 tanggal 30-SEP-18	1 lembar





	SEP-18	
536.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985159 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
537.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985160 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
538.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985161 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
539.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987963 tanggal 06-SEP-18	2 lembar
540.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985145 tanggal 29-SEP-18	4 lembar
541.	Nota Pembatalan Nomor 'NP041/IX/2018 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
542.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985162 tanggal 01-OCT-18	1 lembar
543.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985163 tanggal 02-OCT-18	1 lembar
544.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985164 tanggal 04-OCT-18	2 lembar
545.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985165 tanggal 09-OCT-18	1 lembar
546.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985166 tanggal 11-OCT-18	3 lembar
547.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985167 tanggal 11-OCT-18	2 lembar
548.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985168 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
549.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985170 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
550.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985172 tanggal 18-OCT-18	2 lembar
551.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985173 tanggal 18-OCT-18	1 lembar
552.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985174 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
553.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985175 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
554.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985176 tanggal 24-OCT-18	2 lembar
555.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985177 tanggal 25-OCT-18	2 lembar
556.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985178 tanggal 29-OCT-18	1 lembar
557.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985179 tanggal 22-	1 lembar



	OCT-18	
558.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985180 tanggal 25-OCT-18	1 lembar
559.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985182 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
560.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985184 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
561.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985185 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
562.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985186 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
563.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985187 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
564.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985188 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
565.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985189 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
566.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985190 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
567.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985191 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
568.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985192 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
569.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985193 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
570.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985194 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
571.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985195 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
572.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985196 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
573.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985197 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
574.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985198 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
575.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985200 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
576.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985169 tanggal 16-OCT-18	3 lembar
577.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985171 tanggal 15-OCT-18	2 lembar
578.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985181 tanggal 31-OCT-18	4 lembar
579.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985183 tanggal 31-OCT-18	2 lembar



	OCT-18	
580.	Nota Pembatalan Nomor 'NP047/X/2018 tanggal 31-OCT-18	3 lembar
581.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985199 tanggal 01-NOV-18	2 lembar
582.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985201 tanggal 05-NOV-18	1 lembar
583.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985202 tanggal 08-NOV-18	2 lembar
584.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985205 tanggal 15-NOV-18	3 lembar
585.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985206 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
586.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985207 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
587.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985208 tanggal 19-NOV-18	1 lembar
588.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985209 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
589.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985210 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
590.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985211 tanggal 22-NOV-18	2 lembar
591.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985212 tanggal 26-NOV-18	2 lembar
592.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985213 tanggal 28-NOV-18	1 lembar
593.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985214 tanggal 22-NOV-18	1 lembar
594.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985215 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
595.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985216 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
596.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985217 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
597.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985218 tanggal 29-NOV-18	2 lembar
598.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985219 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
599.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985220 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
600.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985221 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
601.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985222 tanggal 30-	1 lembar



	NOV-18	
602.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985223 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
603.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985224 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
604.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985225 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
605.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985226 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
606.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985227 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
607.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985228 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
608.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985229 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
609.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985230 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
610.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
611.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985232 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
612.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985203 tanggal 12-NOV-18	2 lembar
613.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985204 tanggal 15-NOV-18	4 lembar
614.	Nota Pembatalan Nomor '096/NP/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
615.	Nota Pembatalan Nomor '097/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
616.	Nota Pembatalan Nomor '098/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
617.	Nota Pembatalan Nomor '103/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
618.	Nota Pembatalan Nomor '105/NP/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
619.	Nota Retur Nomor '453/NR/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
620.	Nota Retur Nomor '459/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
621.	Nota Retur Nomor '460/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
622.	Nota Retur Nomor '465/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
623.	Nota Retur Nomor '482/NR/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
624.	Nota Retur Nomor 'MAI/2018/XI/01/LOC/S tanggal 01-NOV-18	9 lembar
625.	Nota Pembatalan Nomor 'NP052/XI/2018 tanggal 30-	2 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NOV-18	
626.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18	1 lembar
627.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18	2 lembar
628.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18	1 lembar
629.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
630.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
631.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18	1 lembar
632.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18	2 lembar
633.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18	1 lembar
634.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18	2 lembar
635.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
636.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985243 tanggal 24-DEC-18	1 lembar
637.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985244 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
638.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985245 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
639.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985247 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
640.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985248 tanggal 27-DEC-18	1 lembar
641.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985249 tanggal 20-DEC-18	1 lembar
642.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985250 tanggal 28-DEC-18	1 lembar
643.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985251 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
644.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985252 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
645.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985253 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
646.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985254 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
647.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985255 tanggal 31-DEC-18	1 lembar

Halaman 38 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





	DEC-18	
648.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985256 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
649.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985257 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
650.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985258 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
651.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985259 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
652.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985260 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
653.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985261 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
654.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985262 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
655.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985246 tanggal 26-DEC-18	4 lembar
656.	Nota Pembatalan Nomor '107/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
657.	Nota Pembatalan Nomor '108/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
658.	Nota Pembatalan Nomor '109/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
659.	Nota Pembatalan Nomor '511/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
660.	Nota Pembatalan Nomor '512/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
661.	Nota Pembatalan Nomor '513/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
662.	Nota Pembatalan Nomor 'NP057/XII/2018 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
663.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	5 lembar
664.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	15 lembar
665.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	47 lembar
666.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	49 lembar



667.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	23 lembar
668.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	13 lembar
669.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	73 lembar
670.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	24 lembar
671.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	33 lembar
672.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	45 lembar
673.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0334/JIC-PP/X/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985187, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 10-2018	6 lembar
674.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0229/JIC-PP/IX/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985152, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 09-2018	8 lembar
675.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0265/JIC-PP/VIII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987953, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 08-2018	11 lembar
676.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0226/JIC-PP/VII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987914, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 07-2018	10 lembar
677.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0161/JIC-PP/V/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987850, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 05-2018	9 lembar
678.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0124/JIC-PP/IV/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak	9 lembar



	Nomor 010.002.18-63988177, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 04-2018	
679.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0088/JIC-PP/III/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988141, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 03-2018	10 lembar
680.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0055/JIC-PP/II/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988108, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 02-2018	8 lembar
681.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0014/JIC-PP/I/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988067, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 01-2018	6 lembar
682.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-125, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
683.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-126, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
684.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-127, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
685.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-129, Bukti Penerimaan, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	4 Lembar
686.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-130, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
687.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-132, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	82 Lembar
688.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-133, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
689.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-134, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
690.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-135, Bukti Penerimaan dan Bukti	3 Lembar



	Pengeluaran	
691.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-136, Bukti Pengeluaran	2 Lembar
692.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-170, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
693.	Printout General Ledger A/C:10.01.018 BNI-IDR	2 Lembar
<b>Dokumen PT SHOWA INDONESIA MANUFACTURING</b>		
694.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/025, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Nota Retur, Nota Pembatalan, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0062/SIM/III/2018, Invoice nomor GF/0054/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988115, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak 010.002-18.63988107.	69 Lembar
695.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/019, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0032/SIM/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988085, Surat Jalan, Purchase Order.	27 Lembar
696.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/027, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Nota Pembatalan, Nota Retur, Billing Statement, Invoice nomor GF/0063/SIM/III/2018, Nota Kredit, Faktur Pajak 010.002-18.63988116, Surat Jalan, Purchase Order.	37 Lembar
697.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank Of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/021, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23,	27 Lembar



	Billing Statement, Invoice nomor GF/0035/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988088, Surat Jalan, Purchase Order.	
698.	1 Set Dokumen Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO tahun 2018.	106 Lembar
<b>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI KANWIL DJP JAWA BARAT</b>		
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
699.	Painting Equipment Low Temperature. Terdiri dari: - Mesin Conveyor dan dynamo penggerak Merk JOIL, - 1 Mesin Pompa Cat Merk ANZEN, - 1 Panel/Kontrol Mesin, - 2 Ruang Painting dan, - Ruang Oven	1 Set
700.	Sand Blasting Rear Grip Equipment, Merk/Buatan PT KAKAZU INDONESIA serial no. TCH-AS6 700	1 Set
<b>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DENDA</b>		
<b>Dokumen PT ASTRA OTOPARTS</b>		
701.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Surat Pemberitahuan, Verification Letter, Invoice Nomor GF/0213/AOP/VII/2018, GF/0209/AOP/VI/2018, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak No 010.00218.63987901, 010.00218.63987864, Bukti Transfer, Order Sheet Subcontracting	178 Lembar
702.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Incoming Document Receipt, Invoice nomor GF/0103/AOP/IV/2018, GF/0098/AOP/III/2018, GF/0112/AOP/IV/2018, GF/0095/AOP/III/2018, Berita Acara Sewa Gedung, Service Entry Sheet Acceptance, Purchase Order, Faktur Pajak Nomor 010.00218.63988156, 010.00218.63988151, 010.00218.63988165, 010.00218.63988148, Surat Jalan, Order Sheet Subcontracting	133 Lembar
<b>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI KANWIL DJP JAWA BARAT</b>		
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
703.	Liquid Painting Coating Machine, terdiri dari:	1 Set





	a. 1 (satu) Chain Hoist Merk Kito, Tipe Single, Kapasitas 2 Ton, ukuran 17.2 m P x 6 m L, hanger isi 30 pcs; b. 1 (satu) Air Blow; c. 1 (satu) Painting Liquid Merk Kakazu Indonesia, Tipe PCN-TM-250, ukuran 360 cm P x 245 cm L x 215 cm T dengan motor listrik 640 watt dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Spray Gun Merk Anzen, Tipe DP-3</li><li>• 1 (satu) Blower dengan motor listrik 5.5 HP dan cerobong asap 25 m P x diameter 60 cm</li><li>• 1 (satu) Backing Oven ukuran 420 cm P x 290 cm L x 150 cm T, dengan motor listrik 2 x 1.5 HP dan 1 (satu) Conveyer Jig ukuran 2500 cm P</li></ul> d. Panel control	
<b>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DENDA</b>		
<b>Dokumen ELYSA ROSITA (Staf Accounting dan Pajak PT GANSA DURINDO)</b>		
704.	1 set Rekening Koran Bank BII cabang KK Lippo Cikarang nomor 2-246-000433 atas nama PT GANSA FURINDO	9 Lembar
705.	General Ledger A/C: 10.01.018 BNI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	12 Lembar
706.	General Ledger A/C: 10.01.017 ARTHA GRAHA BANK-IDR Periode 1 Oktober 2017 to 31 Desember 2019	8 Lembar
707.	General Ledger A/C: 10.01.019 BRI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	21 Lembar
<b>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI KANWIL DJP JAWA BARAT</b>		

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa PT. GANSA FURINDO;
2. Menyatakan Terdakwa PT. GANSA FURINDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
3. Membebaskan (*Vrijspraak*) atau melepaskan (*onslag*) Terdakwa PT GANSA FURINDO dari semua tuntutan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan Terdakwa PT. GANSA FURINDO dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **PT. GANSA FURINDO** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa yang beralamat di Jl. Akasia II Delta Silicon Blok A9 N0.8 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi sejak tanggal 26 September 1994 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.084.733.3-341.000, juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 September 1994 dan sejak tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Selatan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi **YOHANES SUSETYO MUHANDOKO** selaku Direktur Utama Terdakwa berdasarkan akta Notaris Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn Nomor : 227 tanggal 08 Mei 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-07542.40.22.2014 tanggal 09 Mei 2014 yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, pada kurun waktu antara bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Terdakwa jalan Akasia II Delta Silicon Blok A9 Nomor 8 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perpajakan, **dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang

Halaman 45 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 19 tanggal 08 September 1994 dan Persetujuan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-11.223 HT.01.01 tahun 95 tanggal 6 September 1995 dengan pemilik perusahaan Mr. Chang Shan Tsung, namun pada tahun 2014, Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO membeli Terdakwa dari Mr. Chang Shan Tsung ;
- Bahwa Terdakwa yang beralamat di Jl. Akasia II Delta Silicon Blok A9 N0.8 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi sejak tanggal 26 September 1994 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.084.733.3-341.000 juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 September 1994 dan sejak tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Selatan ;
- Bahwa jenis usaha Terdakwa sesuai master file Wajib Pajak Badan yaitu industri brankas, filing kantor dan sejenisnya (KLU 25991), sedangkan usaha sesuai keadaan sebenarnya adalah industri pengecatan (liquid painting and powder coating) parts kendaraan bermotor yang bahan bakunya berupa cat dan bubuk pewarna. Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan beberapa customer/pengguna jasa sejak tahun 2014 dan saat ini Terdakwa sudah berhenti beroperasi ;
- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang, Wajib Pajak Badan Terdakwa mempunyai kewajiban perpajakan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final pasal 4 ayat (2), sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Assessment) ;
- Bahwa struktur kepengurusan dan pemegang saham di Terdakwa tahun 2014 - 2018 yaitu :
  - Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama dengan kepemilikan saham sebesar 61,5 % atau senilai Rp. 2.475.003.540,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) ;

Halaman 46 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur dengan kepemilikan saham sebesar 21% atau senilai Rp. 845.123.160,- (delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) ;
- Agustinus Suhendro Prasetya selaku Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 7,5% atau senilai Rp. 301.829.700,- (tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Sisa saham sebesar 10% atau senilai Rp. 402.439.600,- (empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) masih dimiliki oleh Chang Shan Tsung (pemilik awal perusahaan).

Akan tetapi pembagian kepemilikan saham yang tertuang dalam akta Notaris tersebut sifatnya formalitas saja, faktanya seluruh saham Terdakwa (100%) milik Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO;

- Bahwa Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selain selaku Direktur Utama Terdakwa berdasarkan akta Notaris Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn Nomor : 227 tanggal 08 Mei 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-07542.40.22.2014 tanggal 09 Mei 2014. Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO juga merupakan pemilik saham terbesar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn Nomor 332 tanggal 12 Mei 2014, dalam operasional Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang antara lain yaitu :
  - Mencari customer dan maintenance customer untuk menjaga kelangsungan bisnis ;
  - Menjalankan urusan internal untuk pemenuhan kebutuhan customer (proses manufakturnya), menjaga jalannya fungsi marketing, produksi, financial (termasuk diantaranya pelaporan (menandatangani SPT Masa PPN) dan pembayaran pajak), HRD, general affairs, dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang/jasa dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 dengan beberapa perusahaan diantaranya yaitu :
  1. PT. Menara Terus Makmur ;
  2. PT. Mitsuba Indonesia Pipe Parts ;
  3. PT. Kabaya Indonesia ;
  4. PT. Megatama Spring ;
  5. PT. Asahi Denso Indonesia ;
  6. PT. Minda Automotive Indonesia ;

Halaman 47 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PT. Jaya Indah Casting ;
  8. PT. Bakrie Autoparts ;
  9. PT. Showa Indonesia Manufacturing ;
  10. PT. Chandra Nugerah Cemerlang;
  11. PT. Chandra Nugerah Cipta, dll.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diatas telah membayar nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atau dipotong oleh Terdakwa berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa dari transaksi penjualan atau penyerahan jasa sebesar 10%, namun PPN yang telah dipungut atau dipotong tersebut tidak disetorkan seluruhnya oleh Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa ke kas negara Cq Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi maupun di KPP Pratama Cikarang ;
  - Bahwa para customer atau lawan transaksi dari Terdakwa telah melakukan pembayaran nilai PPN dengan cara mentransfer sejumlah dana langsung ke rekening atas nama Terdakwa di :
    - Bank BNI Cabang Cikarang akun nomor 3987398733 ;
    - Bank Artha Graha Cabang Cibusah Cikarang akun nomor 0921215151;
    - Bank BRI Cabang Soekarno Hatta akun nomor 114401000386308.
  - Bahwa proses pelaporan dan pembayaran pajak di Terdakwa pada Masa Januari sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai berikut :
    1. Setiap pekerjaan jasa yang telah selesai dilakukan, Terdakwa menerbitkan invoice untuk melakukan tagihan ke customer/lawan transaksi ;
    2. Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerbitkan Faktur Pajak untuk memungut PPN (Pajak Keluaran) sebesar 10% ;
    3. Faktur Pajak dibuat oleh Sdri. Yuli dan Sdri. Ella (staf Terdakwa) dan ditandatangani oleh Saksi Jaumi Wongso selaku Manager Finance dan Akuntansi Terdakwa;
    4. Seluruh Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa dikumpulkan dan direkapitulasi oleh Saksi Elysa Rosita untuk selanjutnya di input ke dalam format SPT Masa PPN Terdakwa setiap tanggal 20-an setiap bulannya ;
    5. Saksi Elysa Rosita juga membuat E-billing sesuai dengan PPN kurang bayar serta menyerahkan draf hitungannya dalam bentuk perhitungan print out excel kepada Saksi Jaumi Wongso ;

Halaman 48 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Saksi Jaumi Wongso menyampaikan permintaan tentang PPN yang harus dibayar kepada Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama dan juga kepada Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur untuk dilakukan pembayaran berdasarkan hitungan di SPT serta e-billing ;
7. Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur melalui Saksi Jaumi Wongso memutuskan untuk tidak melakukan penyetoran PPN kurang bayar yang telah dipungut atau dipotong dari lawan transaksi pada bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember tahun 2018, karena ada kebutuhan yang mendesak di perusahaan, sehingga otomatis Terdakwa juga tidak menyampaikan atau melaporkan SPT Masa PPN-nya (bulan Pebruari – Juli 2018 dan bulan Desember 2018) ke KPP Madya Bekasi maupun ke KPP Pratama Cikarang ;
- Bahwa Terdakwa dalam periode masa pajak Januari s/d Desember tahun 2018 telah menerbitkan faktur pajak terhadap penjualan atau penyerahan barang/jasa dengan cara langsung memungut atau memotong PPN dari lawan transaksi dengan total nilai PPN yang dipungut atau dipotong seluruhnya sebesar Rp.4.650.524.331,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) yang apabila dikelompokkan per Masa Pajak berdasarkan data yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	PPN (Rupiah)
1	Januari 2018	388.061.542
2	Februari 2018	337.245.888
3	Maret 2018	452.267.786
4	April 2018	483.917.715
5	Mei 2018	421.570.023
6	Juni 2018	268.071.832
7	Juli 2018	374.433.680
8	Agustus 2018	417.027.791
9	September 2018	395.904.462
10	Oktober 2018	434.561.637
11	November 2018	375.297.875
12	Desember 2018	302.164.060
	<b>TOTAL</b>	<b>4.650.524.291</b>

- Bahwa dari total nilai PPN yang sudah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa kepada lawan transaksi dalam pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.650.524.291,- (empat milyar enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah), namun hanya sebesar Rp. 1.622.791.765,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang telah dilaporkan oleh PT. Ganza Furindo ke KPP sebagaimana laporan SPT Masa PPN Terdakwa bulan Agustus, September, Oktober dan November 2018 dengan perincian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
**Putusan**

NAMA PEMBELI BKP/JKP	NPWP PEMBELI	Jumlah FP	HARGA JUAL/ DPP	Total PPN
'PT. BAKRIE AUTOPARTS	'0100177884 31000	1	34.589.000	3.458.900
'PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING	'0100221840 92000	25	1.354.883.860	135.488.386
'PT. KAYABA INDONESIA	'0100283220 92000	12	2.358.223.650	235.822.365
'PT. MENARA TERUS MAKMUR	'0106210504 31000	22	3.536.658.900	353.665.890
'PT. HANKEN INDONESIA	'0107099050 55000	2	760.500	76.050
'PT. NAKAKIN INDONESIA	'0107105070 55000	4	50.318.500	5.031.850
'JOTUN Indonesia	'0107117450 52000		-	-
'PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY	'0108133500 55000	1	829.120	82.912
'PT. CABININDO PUTRA	'0108158014 31000	12	1.380.299.360	138.029.936
'PT. JAYA INDAH CASTING	'0108474400 55000	3	79.517.340	7.951.734
'PT. ASTRA OTOPARTS TBK	'0134524380 54000	17	497.046.460	49.704.646
'PT. CHANDRA NUGERAHCIPTA	'0171379774 31000	4	226.474.120	22.647.412
'PT. MEGATAMA SPRING	'0180996144 31000	4	918.340.100	91.834.010
'YKT GEAR INDONESIA	'0186935980 55000		-	-
'PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS	'0186952470 55000	10	3.248.167.950	324.816.795
'PT. ASAHI DENSO INDONESIA	'0186961950 55000	8	1.336.525.370	133.652.537
'PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE	'0186962520 55000	1	1.454.400	145.440
'PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG	'0204885324 31000	4	584.554.080	58.455.408
'PT. HONDA TRADING Indonesia	'0211575990 59000	1	2.916.250	291.625
'PT. GLOBAL DIMENSI METALINDO	'0235615414 31000		188.130.000	18.813.000
'PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING	'0244955334 21000	5	174.578.050	17.457.805

Halaman 51 dari 4250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SPT Masa PPN Terdakwa bulan Januari 2018, telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Bekasi dan telah diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan nilai PPN sebesar Rp.388.061.542,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa tidak melaporkan sisa nilai PPN yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa untuk SPT Masa PPN bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp.2.639.670.984,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke KPP dengan dasar perhitungan 10% dari nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak atau harga jual barang/jasa) yaitu sebesar Rp.26.396.709.840,- (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian :

NO	TANGGAL	NO FP / INVOICE	Ms	NAMA PEMBELI	HARGA JUAL	PPN
		FP.010.002-		PT. SHOWA		
1	1-Feb-18	18.63988084	Feb	INDONESIA	40,919,750	4,091,975
2	8-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. SHOWA	106,443,610	10,644,361
		18.63988085		INDONESIA		
3	14-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. KAYABA	256,964,052	25,696,405
		18.63988086		INDONESIA		
4	14-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. MENARA	278,805,800	27,880,580
		18.63988087		TERUS MAKMUR		
5	8-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. SHOWA	98,663,065	9,866,307
		18.63988088		INDONESIA		
6	15-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. MINDA	16,014,445	1,601,445
		18.63988089		AUTOMOTIVE. IND		
7	20-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. ASTRA	133,620,996	13,362,100
		18.63988090		OTOPARTS Tbk		
8	22-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. MENARA	157,189,000	15,718,900
		18.63988091		TERUS MAKMUR		
9	22-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. SHOWA	119,330,700	11,933,070
		18.63988092		INDONESIA		
10	26-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. KAYABA	90,346,325	9,034,633
		18.63988093		INDONESIA		
11	26-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. MENARA	87,822,100	8,782,210
		18.63988094		TERUS MAKMUR		
12	26-Feb-18	FP. 010.002-	Feb	PT. CHANDRA	48,903,540	4,890,354
		18.63988095		NUGERAH		
				CEMERLANG		

Halaman 52 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	27-Feb-18	FP. 010.002-18.63988096	Feb	PT. CHANDRA	38,579,420	3,857,942
14	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988097	Feb	PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS	586,020,639	58,602,064
15	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988098	Feb	PT. BERDIKARI	9,708,340	970,834
16	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988099	Feb	METAL. E PT. BAKRIE	76,969,600	7,696,960
17	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988100	Feb	AUTOPARTS PT. KAYABA	18,540,000	1,854,000
18	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988101	Feb	INDONESIA PT. CABININDO	373,626,997	37,362,700
19	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988102	Feb	PUTRA PT. ASAHI DENSO	290,939,390	29,093,939
20	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988103	Feb	INDONESIA PT. MINDA ASEAN	99,600	9,960
21	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988104	Feb	AUTOMOTIVE PT. HANKEN	240,500	24,050
22	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988105	Feb	INDONESIA PT. UMEDA FACTORY	15,074,360	1,507,436
23	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988106	Feb	INDONESIA PT. MINDA	9,021,970	902,197
24	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988107	Feb	AUTOMOTIVE. IND PT. SHOWA	121,774,390	12,177,439
25	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988108	Feb	INDONESIA PT. JAYA INDAH	2,258,340	225,834
27	31-Jan-18	FP. 010.002-18.63988109	Feb	CASTING PT. MEGATAMA	273,050,790	27,305,079
28	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988110	Feb	SPRING PT. NAKAKIN	13,107,750	1,310,775
29	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988111	Feb	INDONESIA PT. MENARA	62,441,000	6,244,100
30	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988112	Feb	TERUS MAKMUR PT. ASTRA	46,228,799	4,622,880
31	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988113	Feb	OTOPARTS Tbk PT. CABININDO	3,563,942	356,394
32	28-Feb-18	FP. 010.002-18.63988114	Feb	PUTRA PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS	4,839,936	483,994
33	RETUR	MAI/2018/II/05/LOC/S NP	Feb	PT. MINDA	(1,222,070)	(122,207)
34	RETUR	007/II/2018	Feb	AUTOMOTIVE. IND PT. ASAHI DENSO	(5,347,260)	(534,726)
35	RETUR	048/NR/02/2018	Feb	INDONESIA PT. SHOWA	(826,000)	(82,600)
36	RETUR	060/NR/02/2018	Feb	INDONESIA PT. SHOWA	(545,490)	(54,549)
37	RETUR	072/NR/02/2018	Feb	INDONESIA PT. SHOWA	(709,450)	(70,945)
				INDONESIA		
				Februari	3,372,458,87	337,245,88

Halaman 53 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6	8
1	1-Mar-18	FP. 010.002-18.63988115	Mar	PT. SHOWA INDONESIA	17,040,800	1,704,080
2	8-Mar-18	FP. 010.002-18.63988116	Mar	PT. SHOWA INDONESIA	133,453,735	13,345,374
3	8-Mar-18	FP. 010.002-18.63988117	Mar	PT. MENARA TERUS MAKMUR	196,861,400	19,686,140
4	10-Mar-18	FP. 010.002-18.63988118	Mar	PT. KAYABA INDONESIA	189,665,004	18,966,500
5	12-Mar-18	FP. 010.002-18.63988119	Mar	PT. MENARA TERUS MAKMUR	89,830,800	8,983,080
5	15-Mar-18	FP. 010.002-18.63988120	Mar	PT. SHOWA PT. MINDA	187,412,910	18,741,291
6	15-Mar-18	FP. 010.002-18.63988121	Mar	INDONESIA PT. ASTRA	9,642,940	964,294
7	21-Mar-18	FP. 010.002-18.63988122	Mar	AUTOMOTIVE. IND PT. ASTRA	109,105,300	10,910,530
8	22-Mar-18	FP. 010.002-18.63988123	Mar	OTOPARTS Tbk PT. ASTRA	52,727,492	5,272,749
9	21-Mar-18	FP. 010.002-18.63988124	Mar	OTOPARTS Tbk PT. MENARA	243,552,620	24,355,262
10	22-Mar-18	FP. 010.002-18.63988125	Mar	TERUS MAKMUR PT. SHOWA	151,423,710	15,142,371
11	25-Mar-18	FP. 010.002-18.63988126	Mar	INDONESIA PT. MENARA	112,106,500	11,210,650
12	26-Mar-18	FP. 010.002-18.63988127	Mar	TERUS MAKMUR PT. KAYABA	264,231,934	26,423,193
13	29-Mar-18	FP. 010.002-18.63988128	Mar	INDONESIA PT. ASAHI DENSO	330,548,400	33,054,840
14	29-Mar-18	FP. 010.002-18.63988129	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	192,071,600	19,207,160
15	29-Mar-18	FP. 010.002-18.63988130	Mar	INDONESIA PT. CHANDRA	24,607,170	2,460,717
16	29-Mar-18	FP. 010.002-18.63988131	Mar	NUGERAH CIPTA PT. CHANDRA	69,314,080	6,931,408
17	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988132	Mar	NUGERAH CEMERLANG PT. BERDIKARI	34,353,579	3,435,358
18	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988133	Mar	METAL. E PT. CABININDO	11,365,584	1,136,558
19	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988134	Mar	PUTRA PT. CABININDO	325,550,875	32,555,088
20	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988135	Mar	PUTRA PT. MEGATAMA	317,916,490	31,791,649
21	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988136	Mar	SPRING PT. BAKRIE	50,246,800	5,024,680
22	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988137	Mar	AUTOPARTS PT. MINDA	2,189,740	218,974
23	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988138	Mar	AUTOMOTIVE. IND PT. UMEDA	31,759,560	3,175,956
24	31-Mar-18	FP. 010.002-18.63988139	Mar	FACTORY INDONESIA PT. UMEDA	14,961,728	1,496,173

Halaman 54 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988140	Mar	INDONESIA PT. HANKEN	715,000	71,500
26	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988141	Mar	INDONESIA PT. JAYA INDAH	30,249,870	3,024,987
27	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988142	Mar	CASTING PT. MITSUBA	990,196,497	99,019,650
28	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988143	Mar	INDONESIA PIPE PARTS PT. MITSUBA	1,860,264	186,026
29	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988144	Mar	INDONESIA PIPE PARTS PT. SHOWA	22,374,580	2,237,458
30	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988145	Mar	INDONESIA PT. HONDA	1,942,260	194,226
31	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988146	Mar	TRADING INDONESIA PT. SURYA	1,650,000	165,000
32	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988147	Mar	SHUENN YUEH INDUSTRY PT. KAYABA	113,157,146	11,315,715
33	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988148	Mar	INDONESIA PT. ASTRA	34,818,200	3,481,820
33	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988149	Mar	OTOPARTS Tbk PT. NAKAKIN	4,216,750	421,675
34	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988150	Mar	INDONESIA PT. MENARA	122,748,689	12,274,869
35	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988151	Mar	TERUS MAKMUR PT. ASTRA	42,679,400	4,267,940
36	31-Mar-18	FP. 010.002- 18.63988152	Mar	OTOPARTS Tbk PT. MITSUBA	11,092,800	1,109,280
37	RETUR	MAI/2018/III/1 2/LOC/S	Mar	INDONESIA PIPE PARTS PT. MINDA	(2,084,640)	(208,464)
38	RETUR	MAI/2018/III/0 7/LOC/S	Mar	AUTOMOTIVE. IND PT. MINDA	(914,905)	(91,491)
39	RETUR	NP	Mar	AUTOMOTIVE. IND PT. ASAHI DENSO	(9,495,803)	(949,580)
40	RETUR	012/III/2018 111/NR/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(2,248,406)	(224,841)
41	RETUR	18 022/NP/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(500,394)	(50,039)
42	RETUR	18 019/NP/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(221,332)	(22,133)
43	RETUR	18 018/NP/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(70,596)	(7,060)
44	RETUR	18 083/NR/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(303,604)	(30,360)
45	RETUR	18 089/NR/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(873,608)	(87,361)
46	RETUR	18 101/NR/III/20	Mar	INDONESIA PT. SHOWA	(190,713)	(19,071)
		18		INDONESIA		

Halaman 55 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	RETUR	020/NP/III/20 18	Mar	PT. SHOWA INDONESIA	(60,347)	(6,035)
				Maret	4,522,677,85 9	452,267,78 6
1	5-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988153	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	135,419,876	13,541,988
2	10-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988154	Apr	PT. MENARA TERUS MAKMUR	262,101,363	26,210,136
3	10-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988155	Apr	PT. KAYABA INDONESIA	179,031,973	17,903,197
4	10-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988156	Apr	PT. ASTRA OTOPARTS Tbk	406,080,000	40,608,000
5	12-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988157	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	169,114,246	16,911,425
6	15-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988158	Apr	PT. JOTUN INDONESIA	31,994,976	3,199,498
7	15-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988159	Apr	PT. MINDA AUTOMOTIVE. IND	8,155,980	815,598
8	15-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988160	Apr	PT. ASTRA OTOPARTS Tbk	112,478,100	11,247,810
9	15-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988161	Apr	PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	336,410,650	33,641,065
10	19-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988162	Apr	PARTS PT. SHOWA	157,923,639	15,792,364
11	19-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988163	Apr	INDONESIA PT. MENARA	221,778,685	22,177,869
12	20-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988164	Apr	TERUS MAKMUR PT. ASTRA	34,369,300	3,436,930
16	21-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988165	Apr	OTOPARTS Tbk PT. ASTRA	15,790,600	1,579,060
17	25-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988166	Apr	OTOPARTS Tbk PT. MENARA	153,010,815	15,301,082
18	25-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988167	Apr	TERUS MAKMUR PT. KAYABA	258,858,881	25,885,888
19	27-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988168	Apr	INDONESIA PT. ASAHI DENSO	316,508,010	31,650,801
20	26-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988169	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	178,085,118	17,808,512
21	27-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988170	Apr	INDONESIA PT. ASTRA	90,801,147	9,080,115
22	30-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988171	Apr	OTOPARTS Tbk PT. NAKAKIN	4,062,500	406,250
23	30-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988172	Apr	INDONESIA PT. BAKRIE	49,141,100	4,914,110
24	30-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988173	Apr	AUTOPARTS PT. BERDIKARI	31,588,678	3,158,868
25	30-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988174	Apr	METAL. E PT. GLOBAL	46,266,150	4,626,615
26	30-Apr-18	FP. 010.002- 18.63988175	Apr	DIMESI METALINDO PT. ASTRA OTOPARTS Tbk	42,447,346	4,244,735

Halaman 56 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988176	Apr	PT. MINDA ASEAN	2,472,000	247,200
28	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988177	Apr	AUTOMOTIVE PT. JAYA INDAH	29,180,130	2,918,013
29	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988178	Apr	CASTING PT. MINDA	3,267,680	326,768
30	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988179	Apr	AUTOMOTIVE. IND PT. UMEDA	4,405,000	440,500
31	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988180	Apr	FACTORY INDONESIA PT. SHOWA	57,893,775	5,789,378
29	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988181	Apr	INDONESIA PT. CABININDO	424,209,208	42,420,921
30	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988182	Apr	PUTRA PT. CHANDRA	85,487,290	8,548,729
31	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988183	Apr	NUGERAH CEMERLANG PT. MITSUBA	350,071,320	35,007,132
32	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988184	Apr	INDONESIA PIPE PARTS PT. MITSUBA	635,597	63,560
33	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988185	Apr	INDONESIA PIPE PARTS PT. CABININDO	31,250,331	3,125,033
34	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988186	Apr	PUTRA PT. CHANDRA	34,095,026	3,409,503
35	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988187	Apr	NUGERAHCIPTA PT. KAYABA	94,016,400	9,401,640
36	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988188	Apr	INDONESIA PT. MEGATAMA	317,465,900	31,746,590
37	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988189	Apr	SPRING PT. MENARA	170,589,473	17,058,947
38	30-Apr-18	FP. 010.002-18.63988190	Apr	TERUS MAKMUR PT. MENARA	5,959,895	595,990
39	RETUR	NP	Apr	TERUS MAKMUR PT. ASAHI DENSO	(8,195,448)	(819,545)
40	RETUR	017/IV/2018 024/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(1,317)	(132)
41	RETUR	18 023/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(278,731)	(27,873)
42	RETUR	18 033/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(2,164)	(216)
43	RETUR	18 032/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(2,072)	(207)
44	RETUR	18 031/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(740)	(74)
45	RETUR	18 034/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(504,248)	(50,425)
46	RETUR	18 035/NP/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(172,076)	(17,208)
47	RETUR	18 163/NR/IV/20	Apr	INDONESIA PT. SHOWA	(584,926)	(58,493)
		18		INDONESIA		

Halaman 57 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	RETUR	162/NR/IV/2018	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	(2,236,871)	(223,687)
49	RETUR	142/NR/IV/2018	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	(3,080)	(308)
50	RETUR	124/NR/IV/2018	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	(5,697)	(570)
51	RETUR	143/NR/IV/2018	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	(8,292)	(829)
52	RETUR	161/NR/IV/2018	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	(9,215)	(922)
53	RETUR	123/NR/IV/2018	Apr	PT. SHOWA INDONESIA	(1,236,130)	(123,613)
					4,839,177,151	483,917,715
1	3-May-18	FP. 010.002-18.63987827	Mei	PT. SHOWA INDONESIA	80,706,310	8,070,631
2	8-May-18	FP. 010.002-18.63987828	Mei	PT. MENARA TERUS MAKMUR	189,912,600	18,991,260
3	9-May-18	FP. 010.002-18.63987829	Mei	PT. KAYABA INDONESIA	172,892,516	17,289,252
4	10-May-18	FP. 010.002-18.63987830	Mei	PT. SHOWA INDONESIA	159,087,800	15,908,780
5	15-May-18	FP. 010.002-18.63987831	Mei	PT. MENARA TERUS MAKMUR	194,848,100	19,484,810
6	16-May-18	FP. 010.002-18.63987832	Mei	PT. KAYABA INDONESIA	72,549,895	7,254,990
7	16-May-18	FP. 010.002-18.63987833	Mei	PT. ASTRA OTOPARTS Tbk	15,901,480	1,590,148
8	17-May-18	FP. 010.002-18.63987834	Mei	PT. YKT GEAR INDONESIA	17,187,840	1,718,784
9	17-May-18	FP. 010.002-18.63987830	Mei	PT. SHOWA INDONESIA	124,879,419	12,487,942
10	20-May-18	FP. 010.002-18.63987836	Mei	PT. ASTRA OTOPARTS Tbk	91,343,300	9,134,330
11	21-May-18	FP. 010.002-18.63987837	Mei	PT. MENARA TERUS MAKMUR	197,140,700	19,714,070
12	24-May-18	FP. 010.002-18.63987838	Mei	PT. SHOWA INDONESIA	149,519,430	14,951,943
13	25-May-18	FP. 010.002-18.63987839	Mei	PT. KAYABA INDONESIA	153,799,559	15,379,956
14	22-May-18	FP. 010.002-18.63987840	Mei	PT. MENARA TERUS MAKMUR	38,545,000	3,854,500
15	25-May-18	FP. 010.002-18.63987841	Mei	PT. MINDA AUTOMOTIVE. IND	14,299,900	1,429,990
16	25-May-18	FP. 010.002-18.63987842	Mei	PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE	751,200	75,120
17	25-May-18	FP. 010.002-18.63987843	Mei	PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	2,383,184	238,318
18	30-May-18	FP. 010.002-18.63987844	Mei	PARTS PT. GLOBAL DIMESI METALINDO	15,110,000	1,511,000

Halaman 58 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987845	Mei	PT. CHANDRA NUGERAH	100,891,550	10,089,155
20	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987846	Mei	CEMERLANG PT. CHANDRA	35,309,510	3,530,951
21	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987847	Mei	NUGERAHCIPTA PT. CABININDO	21,092,883	2,109,288
22	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987848	Mei	PUTRA PT. CABININDO	358,963,224	35,896,322
23	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987849	Mei	PT. ASAHI DENSO INDONESIA	279,925,590	27,992,559
24	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987850	Mei	PT. JAYA INDAH CASTING	29,259,370	2,925,937
25	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987851	Mei	PT. HANKEN INDONESIA	585,000	58,500
26	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987852	Mei	PT. SHOWA INDONESIA	77,593,855	7,759,386
27	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987853	Mei	PT. UMEDA FACTORY	14,022,560	1,402,256
28	25-May-18	FP. 010.002- 18.63987854	Mei	PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	593,943,662	59,394,366
29	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987855	Mei	PARTS PT. MEGATAMA	299,835,247	29,983,525
30	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987856	Mei	SPRING PT. KAYABA	124,550,897	12,455,090
31	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987857	Mei	INDONESIA PT. NAKAKIN	16,178,750	1,617,875
32	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987858	Mei	INDONESIA PT. BAKRIE	39,941,500	3,994,150
33	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987859	Mei	AUTOPARTS PT. BERDIKARI	21,607,235	2,160,724
34	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987860	Mei	METAL. E PT. MENARA	286,120,093	28,612,009
35	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987861	Mei	TERUS MAKMUR PT. ASTRA	16,943,360	1,694,336
36	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987862	Mei	OTOPARTS Tbk PT. ASTRA	176,005,812	17,600,581
37	31-May-18	FP. 010.002- 18.63987863	Mei	OTOPARTS Tbk PT. MENARA	34,752,591	3,475,259
38	RETUR	041/NR/V/201 8	Mei	TERUS MAKMUR PT. SHOWA	(144,332)	(14,433)
39	RETUR	188/NR/V/201 8	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(640,448)	(64,045)
40	RETUR	172/NR/V/201 8	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(95,872)	(9,587)
41	RETUR	039/NP/V/201 8	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(45,568)	(4,557)
42	RETUR	228/NR/V/201 8	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(15,159)	(1,516)
43	RETUR	049/NP/V/201 8	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(3,654)	(365)

Halaman 59 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	RETUR	8 226/NR/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(530,331)	(53,033)
45	RETUR	8 047/NP/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(121,396)	(12,140)
46	RETUR	8 227/NR/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(676,741)	(67,674)
47	RETUR	8 048/NP/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(178,025)	(17,803)
48	RETUR	8 189/NR/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(1,751)	(175)
49	RETUR	8 042/NP/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(424)	(42)
50	RETUR	8 208/NR/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(8,055)	(806)
51	RETUR	8 046/NP/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(2,621)	(262)
52	RETUR	8 207/NR/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(10,562)	(1,056)
53	RETUR	8 045/NP/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(3,954)	(395)
54	RETUR	8 206/NR/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(154,024)	(15,402)
55	RETUR	8 044/NP/V/201	Mei	INDONESIA PT. SHOWA	(47,777)	(4,778)
		8		INDONESIA		
			Mei		4,215,700,22	421,570,02
					8	3
1	7-Jun-18	FP. 010.002- 18.63987865	Juni	PT. SHOWA	73,782,792	7,378,279
2	8-Jun-18	FP. 010.002- 18.6397866	Juni	INDONESIA PT. ASTRA	18,917,440	1,891,744
3	8-Jun-18	FP. 010.002- 18.6397866	Juni	OTOPARTS Tbk PT. MENARA	273,638,467	27,363,847
4	8-Jun-18	18.63987867 FP. 070.002-	Juni	TERUS MAKMUR PT. YKT GEAR	17,187,840	1,718,784
5	20-Jun-18	18.63987868 FP. 010.002-	Juni	INDONESIA PT. ASTRA	20,241,180	2,024,118
6	21-Jun-18	18.63987869 FP. 010.002-	Juni	OTOPARTS Tbk PT. SHOWA	81,875,773	8,187,577
7	23-Jun-18	18.63987870 FP. 010.002-	Juni	INDONESIA PT. MENARA	132,391,200	13,239,120
8	25-Jun-18	18.63987871 FP. 010.002-	Juni	TERUS MAKMUR PT. KAYABA	264,038,643	26,403,864
9	15-Jun-18	18.63987872 FP. 010.002-	Juni	INDONESIA PT. MINDA	21,749,076	2,174,908
10	28-Jun-18	18.63987873 FP. 010.002-	Juni	AUTOMOTIVE. IND PT. SHOWA	98,492,774	9,849,277
11	29-Jun-18	18.63987874 FP. 010.002-	Juni	INDONESIA PT. ASAHI DENSO	175,536,480	17,553,648
12	23-Jun-18	18.63987875 FP. 010.002-	Juni	INDONESIA PT. CABININDO	6,376,112	637,611
13	28-Jun-18	18.63987876 FP. 010.002-	Juni	PUTRA PT. MITSUBA	1,241,333	124,133
		18.63987877		INDONESIA PIPE		

Halaman 60 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987878	Juni	PARTS PT. CHANDRA NUGERAH	62,729,900	6,272,990
15	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987879	Juni	CEMERLANG PT. KAYABA	67,080,650	6,708,065
16	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987880	Juni	INDONESIA PT. NAKAKIN	15,065,500	1,506,550
17	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987881	Juni	INDONESIA PT. JAYA INDAH	21,196,700	2,119,670
18	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987882	Juni	CASTING PT. CABININDO	232,053,464	23,205,346
19	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987883	Juni	PUTRA PT. MEGATAMA	160,431,080	16,043,108
20	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987884	Juni	SPRING PT. CHANDRA	28,080,430	2,808,043
21	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987885	Juni	NUGERAHCIPTA PT. BERDIKARI	4,420,442	442,044
22	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987886	Juni	METAL. E PT. UMEDA FACTORY	2,727,900	272,790
23	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987887	Juni	INDONESIA PT. MINDA	14,515,788	1,451,579
24	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987888	Juni	AUTOMOTIVE. IND PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	486,601,280	48,660,128
25	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987889	Juni	PARTS PT. GLOBAL DIMESI	17,890,000	1,789,000
26	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987890	Juni	METALINDO PT. MENARA	201,668,470	20,166,847
27	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987891	Juni	TERUS MAKMUR PT. BAKRIE	21,510,500	2,151,050
28	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987892	Juni	AUTOPARTS PT. SHOWA	33,377,854	3,337,785
29	30-Jun-18	FP. 010.002-18.63987864	Juni	INDONESIA PT. ASTRA	125,956,572	12,595,657
30	RETUR	247/NR/VI/2018	Juni	OTOPARTS Tbk PT. SHOWA	(24,868)	(2,487)
31	RETUR	054/NP/VI/2018	Juni	INDONESIA PT. SHOWA	(5,934)	(593)
32	RETUR	246/NR/VI/2018	Juni	INDONESIA PT. SHOWA	(6,878)	(688)
33	RETUR	053/NP/VI/2018	Juni	INDONESIA PT. SHOWA	(1,618)	(162)
34	RETUR	NP 06/VI/2018	Juni	INDONESIA PT. ASAHI DENSO INDONESIA	(18,021)	(1,802)
			Juni		2,680,718,321	268,071,832
1	5-Jul-18	FP. 010.002-18.63987893	Juli	PT. SHOWA	96,963,581	9,696,358
2	9-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. MENARA	280,496,188	28,049,619

Halaman 61 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	12-Jul-18	18.63987894 FP. 010.002-	Juli	TERUS MAKMUR PT. KAYABA	212,815,011	21,281,501
4	12-Jul-18	18.63987895 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. SHOWA	82,276,767	8,227,677
5	13-Jul-18	18.63987896 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. MINDA	15,749,520	1,574,952
6	14-Jul-18	18.63987897 FP. 010.002-	Juli	AUTOMOTIVE. IND PT. ASTRA	47,511,900	4,751,190
7	16-Jul-18	18.63987898 FP. 010.002-	Juli	OTOPARTS Tbk PT. MENARA	166,961,908	16,696,191
8	19-Jul-18	18.63987899 FP. 010.002-	Juli	TERUS MAKMUR PT. SHOWA	69,896,817	6,989,682
9	19-Jul-18	18.63987900 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. ASTRA	22,596,840	2,259,684
10	20-Jul-18	18.63987901 FP. 010.002-	Juli	OTOPARTS Tbk PT. MENARA	128,838,276	12,883,828
11	24-Jul-18	18.63987902 FP. 010.002-	Juli	TERUS MAKMUR PT. MENARA	95,545,280	9,554,528
12	25-Jul-18	18.63987903 FP. 010.002-	Juli	TERUS MAKMUR PT. KAYABA	225,167,860	22,516,786
13	25-Jul-18	18.63987904 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. MENARA	33,830,548	3,383,055
14	26-Jul-18	18.63987925 FP. 010.002-	Juli	TERUS MAKMUR PT. SHOWA	75,542,848	7,554,285
15	11-Jul-18	18.63987906 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. MITSUBA	2,318,756	231,876
16	28-Jul-18	18.63987907 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PIPE PARTS PT. CHANDRA	48,411,448	4,841,145
17	30-Jul-18	18.63987908 FP. 010.002-	Juli	NUGERAH CEMERLANG PT. GLOBAL	27,750,000	2,775,000
18	31-Jul-18	18.63987909 FP. 010.002-	Juli	DIMESI METALINDO PT. BERDIKARI	25,639,650	2,563,965
19	31-Jul-18	18.63987911 FP. 010.002-	Juli	METAL. E PT. CHANDRA	74,329,850	7,432,985
20	31-Jul-18	18.63987912 FP. 010.002-	Juli	NUGERAHCIPTA PT. MEGATAMA	284,067,257	28,406,726
21	31-Jul-18	18.63987913 FP. 010.002-	Juli	SPRING PT. JAYA INDAH	26,406,730	2,640,673
22	31-Jul-18	18.63987914 FP. 010.002-	Juli	CASTING PT. HANKEN	123,500	12,350
23	31-Jul-18	18.63987915 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. UMEDA	11,644,380	1,164,438
24	31-Jul-18	18.63987916 FP. 010.002-	Juli	FACTORY INDONESIA PT. MINDA	24,810,246	2,481,025
25	31-Jul-18	18.63987917 FP. 010.002-	Juli	AUTOMOTIVE. IND PT. ASAHI DENSO	332,881,934	33,288,193
26	31-Jul-18	18.63987918 FP. 010.002-	Juli	INDONESIA PT. MITSUBA	444,314,220	44,431,422

Halaman 62 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18.63987919		INDONESIA PIPE		
27	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	PARTS		
		18.63987920		PT. HONDA	3,069,265	306,927
				TRADING		
28	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	INDONESIA		
		18.63987921		PT. CABININDO	395,875,425	39,587,543
29	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	PUTRA		
		18.63987922		PT. CABININDO	14,266,959	1,426,696
30	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	PUTRA		
		18.63987923		PT. NAKAKIN	11,683,250	1,168,325
31	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	INDONESIA		
		18.63987924		PT. KAYABA	150,727,023	15,072,702
32	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	INDONESIA		
		18.63987905		PT. BAKRIE	44,554,700	4,455,470
33	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	AUTOPARTS		
		18.63987926		PT. SHOWA	34,952,257	3,495,226
34	31-Jul-18	FP. 010.002-	Juli	INDONESIA		
		18.63987927		PT. ASTRA	72,273,120	7,227,312
35	RETUR	MAI/2018/VII/	Juli	OTOPARTS Tbk		
		03/LOC/S		PT. MINDA	(6,644,374)	(664,437)
36	RETUR	NP	Juli	AUTOMOTIVE. IND		
		030/VII/2018		PT. ASAHI DENSO	(3,943,887)	(394,389)
37	7/31/2019	010.002-	Juli	INDONESIA		
		18.63987930		PT. MINDA	1,715,386	171,539
38	7/31/2019	010.002-	Juli	AUTOMOTIVE. IND		
		18.63987905		PT. MENARA	168,916,359	16,891,636
				TERUS MAKMUR		
			Juli		3,744,336,79	374,433,68
					8	0
1	3-Dec-18	FP. 010.002-	Des	PT. MENARA	13,670,000	1,367,000
2	6-Dec-18	18.63985233	Des	TERUS MAKMUR		
		FP. 010.002-		PT. SHOWA	61,173,255	6,117,326
3	12-Dec-18	18.63985234	Des	INDONESIA		
		FP. 010.002-		PT. MENARA	312,682,996	31,268,300
4	13-Dec-18	18.63985235	Des	TERUS MAKMUR		
		FP. 010.002-		PT. KAYABA	270,391,845	27,039,185
5	13-Dec-18	18.63985236	Des	INDONESIA		
		FP. 010.002-		PT. SHOWA	71,775,527	7,177,553
6	15-Dec-18	18.63985237	Des	INDONESIA		
		FP. 010.002-		PT. ASTRA	7,796,555	779,656
7	15-Dec-18	18.63985238	Des	OTOPARTS Tbk		
		FP. 010.002-		PT. CABININDO	124,739,255	12,473,926
8	17-Dec-18	18.63985239	Des	PUTRA		
		FP. 010.002-		PT. MENARA	148,631,932	14,863,193
9	20-Dec-18	18.63985240	Des	TERUS MAKMUR		
		FP. 010.002-		PT. SHOWA	65,523,057	6,552,306
10	22-Dec-18	18.63985241	Des	INDONESIA		
		FP. 010.002-		PT. KAYABA	242,441,555	24,244,156
11	24-Dec-18	18.63985242	Des	INDONESIA		
		FP. 010.002-		PT. ASAHI DENSO	265,381,627	26,538,163
12	26-Dec-18	18.63985243	Des	INDONESIA		
		FP. 010.002-		PT. MINDA	42,944,543	4,294,454
		18.63985244		AUTOMOTIVE. IND		

Halaman 63 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	26-Dec-18	FP. 010.002-18.63985245	Des	PT. CHANDRA NUGERAH	51,633,418	5,163,342
14	26-Dec-18	FP. 010.002-18.63985246	Des	CEMERLANG PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	629,875,724	62,987,572
15	26-Dec-18	FP. 010.002-18.63985247	Des	PARTS PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	7,914,182	791,418
16	27-Dec-18	FP. 010.002-18.63985248	Des	PARTS PT. CHANDRA NUGERAHCIPTA	61,628,729	6,162,873
17	20-Dec-18	FP. 010.002-18.63985249	Des	PT. GLOBAL DIMESI METALINDO	2,990,000	299,000
18	28-Dec-18	FP. 010.002-18.63985250	Des	PT. KAYABA INDONESIA	52,083,165	5,208,317
19	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985251	Des	PT. MEGATAMA SPRING	167,873,760	16,787,376
20	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985252	Des	PT. CABININDO PUTRA	12,277,452	1,227,745
21	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985253	Des	PT. SHOWA INDONESIA	21,124,950	2,112,495
22	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985254	Des	PT. UMEDA FACTORY INDONESIA	26,632,900	2,663,290
23	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985255	Des	PT. NAKAKIN INDONESIA	11,517,900	1,151,790
24	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985256	Des	PT. BERDIKARI METAL. E	25,602,350	2,560,235
25	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985257	Des	PT. MENARA TERUS MAKMUR	217,785,808	21,778,581
26	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985258	Des	PT. CABININDO PUTRA	98,243,661	9,824,366
27	31-Dec-18	FP. 010.002-18.63985259	Des	PT. SURYA SHUEN YUEH INDUSTRY	1,918,125	191,813
28	26-Dec-18	FP. 010.002-18.63985260	Des	PT. MITSUBA INDONESIA PIPE	1,522,047	152,205
29	26-Dec-18	FP. 010.002-18.63985261	Des	PARTS PT. CHANDRA NUGERAH	1,093,010	109,301
30	RETUR	NP	Des	CEMERLANG PT. ASAHI DENSO	(1,084,573)	(108,457)
31	RETUR	057/XII/2018 511/NR/XII/20	Des	INDONESIA PT. SHOWA	(270,737)	(27,074)
32	RETUR	18 107/NP/XII/20	Des	INDONESIA PT. SHOWA	(65,316)	(6,532)
33	RETUR	18 107/NR/XII/20	Des	INDONESIA PT. SHOWA	(103,501)	(10,350)
34	RETUR	18 108/NP/XII/20	Des	INDONESIA PT. SHOWA	(24,294)	(2,429)
35	RETUR	18 109/NP/XII/20	Des	INDONESIA PT. SHOWA	(52,272)	(5,227)

Halaman 64 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	RETUR	18 513/NR/XII/20	Des	INDONESIA PT. SHOWA	(222,761)	(22,276)
37	31-Dec-18	18 010.002- 18.63985262	Des	INDONESIA PT. ASTRA OTOPARTS Tbk	4,594,727	459,473
				Desember	3,021,640,60 1	302,164,06 0
				J u m l a h	26,396,709,8 34	2,639,670, 984

- Bahwa alasan Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa tidak melakukan pembayaran PPN yang sudah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.2.639.670.984,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) adalah karena cashflow perusahaan yang tidak mampu menunjang operasional perusahaan Terdakwa, sehingga manajemen harus menentukan prioritas penggunaan dana yang ada untuk tetap dapat menjaga performa perusahaan agar tetap bisa beroperasi dengan harapan penjualan membaik dan cashflow bisa membaik juga;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa memutuskan PPN sebesar 10% dari nilai DPP yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa kepada lawan transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran ke supplier dan pengeluaran operasional lainnya seperti pembayaran gaji, listrik dan lain-lain daripada digunakan untuk pembayaran pajak, karena kalau supplier tidak dibayar, otomatis perusahaan tidak akan dapat bahan baku yang akan dipakai dalam pekerjaan pengecatan. Hal ini dilakukan karena yang menjadi pengambil keputusan akhir / decision maker dalam hal prioritas pembayaran di Perusahaan Terdakwa adalah Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur;
- Bahwa Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa mengetahui uang yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa dari lawan transaksi tersebut untuk pembayaran PPN sebesar 10%, harus disetorkan dan dibuatkan laporan SPT Masa PPM ke KPP agar tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Akan tetapi Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa tetap memutuskan

Halaman 65 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



untuk tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut / dipotong tersebut ke Kas Negara dan tidak membuat / menyampaikan / menyerahkan Laporan SPT Masa PPN periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Wahyudi, SE, S.S.T, Ak, SH, MH dari bidang **Peraturan Perpajakan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara**, terdapat Kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi dari bulan Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 yang dilakukan oleh Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa bersama sama dengan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur PT.Gansa Furindo setidaknya sebesar Rp.2.639.670.984,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang dihitung berdasarkan Nilai PPN yang telah diterbitkan dalam Faktur Pajak dan telah dipungut atau dipotong PPN-nya oleh Terdakwa, namun tidak disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Terdakwa ke KPP.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Pengurusnya yaitu Saksi YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama Terdakwa dan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Nana Maulana Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kepolisian;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. GANSA FURINDO;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Madya Bekasi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan sejak tahun 2007, lalu di KPP Pratama Cikarang Selatan sejak tahun 2013-2018 dan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi ditempatkan di KPP Pratama Madya Bekasi;
- Bahwa jabatan Saksi di KPP Pratama Bekasi sebagai AR (Account Representative);
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi kewajiban pelaksanaan wajib pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo sebagai salah satu wajib pajak yang penugasan pengawasannya dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang Jasa Painting dan Powder Coating per spare part kendaraan bermotor roda empat dan roda dua;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ditugaskan untuk mengawasi perpajakan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pada tahun 2018 diketahui dari sistem kami PT. Gansa Furindo memiliki permasalahan perpajakan atau tunggakan pajak (PPN) yaitu PT. Gansa Furindo telah menerbitkan faktur pajak untuk masa pajak Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 akan tetapi oleh PT. Gansa Furindo tidak melaporkan dari faktur pajak yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Bekasi sejak 26 September 1994 dan sejak Januari 2020 PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan;
- Bahwa pada tahun 2018 dari kantor Saksi telah mengirimkan surat kepada PT. Gansa Furindo;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret atau April 2019 dari pihak KPP Madya Bekasi yaitu Saksi dengan saksi Bambang Dwijanto selaku kepala seksi waskon dan Sdr. Agus Hernawanto Purnomo selaku kepala kantor telah melakukan konseling dengan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko dan sdr. Ahmad Indra Wirawan serta sdri. Elysa Rosita, konseling dilakukan di ruang kepala KPP Madya Bekasi. Selama tahun

Halaman 67 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 – 2019 PT. Gansa Furindo telah menerbitkan faktur pajak tetapi belum disetorkan ke Negara, atas hal tersebut PT. Gansa Furindo mengakui bahwa atas seluruh faktur pajak benar telah diterbitkan dan dipungut PPNnya tetapi belum dilaporkan untuk SPT masa PPN dan PT. Gansa Furindo berjanji akan melunasi dengan mengangsur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, namun sampai Juni 2019 tidak ada pembayaran dan pelaporan sehingga pada tanggal 27 Juni 2019 sertifikat elektroniknya dicabut;

- Bahwa setahu Saksi yang mewakili PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur Finance dan Operator sedangkan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko sebagai Direktur Utama;
- Bahwa sdr. Akhmad Indra Wirawan menjelaskan bahwa benar PT. Gansa Furindo ada menerbitkan faktur pajak tetapi belum dibayarkan karena ada masalah keuangan di PT. Gansa Furindo, tapi sdr. Akhmad Indra Wirawan berjanji akan segera melaporkannya;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Akhmad Indra Wirawan ditemani oleh sdr. Elysa Rosita;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Wongso;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Elysa Rosita dikenalkan kepada Saksi sebagai akunting PT. Gansa Furindo;
- Bahwa saat Saksi datang ke kantor PT. Gansa Furindo Saksi ketemu dengan sdr. Elysa Rosita dan sdr. Akhmad Indra Wirawan, tetapi tidak dikenalkan kepada sdr. Wongso;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Elisa Rosita posisinya sebagai akunting di PT. Gansa Furindo;
- Bahwa setahu Saksi banyak perusahaan yang sudah bertransaksi dengan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa PPN yang dipungut oleh PT. Gansa Furindo 10% dari nilai transaksi;
- Bahwa seharusnya ada sekitar 4,6 milyar tetapi karena sudah ada yang disetorkan, maka tinggal total sekitar 2,6 milyar yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak pajak yang sudah disetor oleh PT. Gansa Furindo;
- Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang Jasa Painting dan Powder Coating per spare part kendaraan bermotor roda empat dan roda dua;

Halaman 68 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap yang bertransaksi dengan PT. Gansa Furindo ada didalam sistem Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap perusahaan yang telah dipungut pajaknya oleh PT. Gansa Furindo, tetapi Saksi mengetahui langsung dari sistem;
- Bahwa setelah Saksi melakukan konseling dengan pihak PT. Gansa Furindo untuk melakukan pengecekan data apakah benar atau tidak, jika benar maka harus segera disetorkan dan diberi jangka waktu penyetoran sekitar satu bulan lebih dan sampai batas waktu yang diberikan PT. Gansa Furindo tidak menyetorkan pajak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Nur Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Madya Cikarang Selatan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta sejak tahun 1995 s.d 2005 sebagai pelaksana lalu Korlak PDI III di KPP Purwakarta sejak tahun 2005 kemudian sebagai Account Representative di KPP Pratama Jakarta Sawah besar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 lalu di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih sejak tahun 2012 s.d 2015 dan sebagai Account Representative di KPP Pratama Cikarang Selatan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di KPP Pratama Cikarang Selatan sebagai AR (Account Representative);
- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi kewajiban pelaksanaan wajib pajak, melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan, membuat profil wajib pajak, merekonsiliasikan data wajib pajak, mengusulkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat nota penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui pemeriksaan sebagai petugas

Halaman 69 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



pemeriksa pajak, memberikan bimbingan mengenai kewajiban perpajakan dan membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan seksi pengawasan dan konsultasi;

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo sebagai salah satu wajib pajak yang penugasan pengawasannya dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang Jasa Painting dan Powder Coating per spare part kendaraan bermotor roda empat dan roda dua;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ditugaskan untuk mengawasi perpajakan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pada tahun 2018 diketahui dari sistem kami PT. Gansa Furindo memiliki permasalahan perpajakan atau tunggakan pajak (PPN) yaitu PT. Gansa Furindo telah menerbitkan faktur pajak untuk masa pajak Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 akan tetapi oleh PT. Gansa Furindo tidak melaporkan dari faktur pajak yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Bekasi sejak 26 September 1994 dan sejak Januari 2020 PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan;
- Bahwa Saksi mengundang sdr. Yohanes meminta pertanggung jawaban untuk menyetorkan kewajibannya, saat itu Saksi berenam, dan dari PT. Gansa Furindo diwakili oleh sdr. Yohanes, sdr. Akhmad Indra Wirawan serta sdr. Elysa Rosita, atas hal tersebut sdr. Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes mengakui bahwa atas seluruh faktur pajak benar telah diterbitkan dan dipungut PPNnya tetapi belum dilaporkan untuk SPT masa PPN dan PT. Gansa Furindo berjanji akan melunasi dengan mengangsur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, namun sampai Juni 2019 tidak ada pembayaran dan pelaporan sehingga pada tanggal 27 Juni 2019 sertifikat elektroniknya dicabut;
- Bahwa setahu Saksi yang mewakili PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur Finance dan Operator sedangkan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko sebagai Direktur Utama dan sdr. Elysa Rosita sebagai akunting;
- Bahwa benar didalam BAP Saksi menerangkan data faktur pajak keluaran dalam masa pajak Januari s/d Desember tahun 2018 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. Gansa Furindo;

- Bahwa data faktur pajak keluaran yang telah dikeluarkan dalam SPT masa PPN PT. Gansa Furindo sesuai SPT PPN yang telah disampaikan ke KPP Madya Bekasi adalah untuk masa pajak bulan Agustus sebesar Rp.417.027.802,00, (empat ratus tujuh belas juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) untuk bulan September Rp.395.904.471,00, (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk bulan Oktober Rp.434.561.648,00, (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan bulan Nopember Rp.375.297.884,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa sebagaimana dalam keterangan Saksi dalam BAP poin 16, bahwa data faktur pajak keluaran yang telah diterbitkan oleh PT. Gansa Furindo dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018 yang belum dilaporkan sebagai pajak keluaran dalam SPT masa PPN PT. Gansa Furindo adalah untuk bulan Februari sebesar Rp.337.250.888,00, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bulan Maret Rp.452.267.786,00, (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk bulan April Rp.483.917.715,00, (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) bulan Mei Rp.421.570.023,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua puluh tiga rupiah) bulan Juni Rp.268.071.832,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bulan Juli Rp.374.433.680,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan bulan Desember Rp.302.164.060,00, (tiga ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah) sehingga total kewajiban pajak PT. Gansa Furindo adalah sebesar Rp.2,6 milyar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Wongso;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Elysa Rosita dikenalkan kepada Saksi sebagai akunting PT. Gansa Furindo;

Halaman 71 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Bambang Dwijanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP sudah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Madya Cikarang Selatan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1995 lalu pada tahun 2010-2014 Saksi sebagai kepala seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Jakarta Sawah besar lalu di KPP Pratama Madya Bekasi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di KPP Pratama Madya Bekasi sebagai Kepala Seksi Waskon 2;
- Bahwa tugas Saksi adalah membawahi account representative untuk PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo sebagai salah satu wajib pajak yang penugasan pengawasannya dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang Jasa Painting dan Powder Coating per spare part kendaraan bermotor roda empat dan roda dua;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ditugaskan untuk mengawasi perpajakan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pada tahun 2018 diketahui dari sistem kami PT. Gansa Furindo memiliki permasalahan perpajakan atau tunggakan pajak (PPN) yaitu PT. Gansa Furindo telah menerbitkan faktur pajak untuk masa pajak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 akan tetapi oleh PT. Gansa Furindo tidak melaporkan dari faktur pajak yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Bekasi sejak 26 September 1994 dan sejak Januari 2020 PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cikarang

Halaman 72 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa Saksi mengundang sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko meminta pertanggung jawaban untuk menyetorkan kewajibannya, saat itu Saksi berenam dan dari PT. Gansa Furindo diwakili oleh sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko, sdr. Akhmad Indra Wirawan serta sdr. Elysa Rosita, atas hal tersebut sdr. Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko mengakui bahwa atas seluruh faktur pajak benar telah diterbitkan dan dipungut PPNnya tetapi belum dilaporkan untuk SPT masa PPN dan PT. Gansa Furindo berjanji akan melunasi dengan mengangsur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, namun sampai Juni 2019 tidak ada pembayaran dan pelaporan sehingga pada tanggal 27 Juni 2019 sertifikat elektroniknya dicabut;
- Bahwa setahu Saksi susunan Direksi PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur Finance dan Operator sedangkan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa terkait himbauan atau konseling melalui SP2DK terhadap wajib pajak PT. Gansa Furindo bahwa Saksi mengetahuinya adanya PPN telah dipungut sesuai faktur pajak yang diterbitkan tetapi tidak disetor dan dilaporkan dalam SPT masa PPN PT. Gansa Furindo dan himbauan ini dilakukan oleh saksi Nana Maulana Rahmat selaku Account Representatie dan didampingi Saksi selaku kepala seksi waskon;
- Bahwa jumlah pajak keluaran yang telah diterbitkan oleh PT. Gansa Furindo dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018 yang belum dilaporkan sebagai pajak keluaran dalam SPT masa PPN PT. Gansa Furindo adalah untuk bulan Februari sebesar Rp.337.250.888,00, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bulan Maret Rp.452.267.786,00, (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk bulan April Rp.483.917.715,00, (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) bulan Mei Rp.421.570.023,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh

Halaman 73 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





puluh ribu dua puluh tiga rupiah) bulan Juni Rp.268.071.832,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bulan Juli Rp.374.433.680,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan bulan Desember Rp.302.164.060,00, (tiga ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah) sehingga total kewajiban pajak PT. Gansa Furindo adalah sebesar Rp.2,6 milyar;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Wongso;
- Bahwa setahu Saksi, sdri. Elysa Rosita dikenalkan kepada Saksi sebagai akunting PT. Gansa Furindo;
- Bahwa PT. Gansa Furindo terakhir transaksi bulan Mei 2019 setelah Saksi melakukan pencabutan PKP PT. Gansa Furindo;
- Bahwa alasan PT. Gansa Furindo belum membayar pajak karena cash flow perusahaan tidak bagus sehingga uangnya dipakai untuk operasional PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pertama-tama saat diketahui ada laporan atau transaksi yang tidak benar, lalu tim analisis melakukan pemeriksaan, kemudian ada masukan dari tim pemeriksa, kemudian dibuatkan SP2DK dalam rangka untuk meminta klarifikasi, apabila wajib pajak merespon dan atas data tersebut diklaim dan dapat dipertanggungjawabkan, maka permasalahan tersebut selesai namun apabila wajib pajak tidak membuktikan maka Saksi bisa melakukan yang pertama pemeriksaan dan apabila terdapat unsur pidana maka Saksi ajukan usulan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sdr. Akhmad Indra Wirawan tahu ada SP2DK;
- Bahwa SP2DK dikirimkan ke PT. Gansa Furindo, dan kemudian ditanggapi oleh PT. Gansa Furindo dengan datang ke kantor Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Agus Hernawanto Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Pratama Pratama Sukoharjo;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1995 lalu pada Februari 2014-Oktober 2014 Saksi sebagai kepala seksi pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Bantul lalu bulan Oktober 2014-Juli 2016 Saksi di KPP Pratama Penajam, bulan Juli 2016-September 2019 Saksi Kepala KPP Madya Bekasi dan sejak September 2019 sampai dengan sekarang Saksi Kepala KPP Pratama Sukoharjo;
- Bahwa jabatan Saksi di KPP Pratama Madya Bekasi sebagai Kepala KKP Madya Bekasi;
- Bahwa tugas Saksi adalah membawahi account representative untuk PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo sebagai salah satu wajib pajak yang penugasan pengawasannya dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang Jasa Painting dan Powder Coating per spare part kendaraan bermotor roda empat dan roda dua;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan di PT. Gansa Furindo karena Saksi ditugaskan untuk mengawasi perpajakan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pada tahun 2018 diketahui dari sistem kami PT. Gansa Furindo memiliki permasalahan perpajakan atau tunggakan pajak (PPN) yaitu PT. Gansa Furindo telah menerbitkan faktur pajak untuk masa pajak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 akan tetapi oleh PT. Gansa Furindo tidak melaporkan dari faktur pajak yang diterbitkan tersebut;
- Bahwa PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Bekasi sejak 26 September 1994 dan sejak Januari 2020 PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan;
- Bahwa Saksi mengundang sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko meminta pertanggung jawaban untuk menyetorkan kewajibannya, saat itu Saksi berenam dan dari PT. Gansa Furindo diwakili oleh sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko, sdr. Akhmad Indra Wirawan serta sdr. Elysa Rosita, atas hal tersebut sdr. Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko mengakui bahwa atas seluruh faktur pajak benar

Halaman 75 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan dan dipungut PPNnya tetapi belum dilaporkan untuk SPT masa PPN dan PT. Gansa Furindo berjanji akan melunasi dengan mengangsur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perbulan, namun sampai Juni 2019 tidak ada pembayaran dan pelaporan sehingga pada tanggal 27 Juni 2019 sertifikat elektroniknnya dicabut;

- Bahwa setahu Saksi susunan Direksi PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur Finance dan Operator sedangkan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa terkait himbauan atau konseling melalui SP2DK terhadap wajib pajak PT. Gansa Furindo bahwa Saksi mengetahuinya adanya PPN telah dipungut sesuai faktur pajak yang diterbitkan tetapi tidak disetor dan dilaporkan dalam SPT masa PPN PT. Gansa Furindo dan himbauan ini dilakukan oleh saksi Nana Maulana Rahmat selaku Account Representative dan Saksi selaku kepala KPP Madya Bekasi mendandatangani surat-surat SP2DK tersebut;
- Bahwa jumlah pajak keluaran yang telah diterbitkan oleh PT. Gansa Furindo dalam masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018 yang belum dilaporkan sebagai pajak keluaran dalam SPT masa PPN PT. Gansa Furindo adalah untuk bulan Februari sebesar Rp.337.250.888,00, (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bulan Maret Rp.452.267.786,00, (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) untuk bulan April Rp.483.917.715,00, (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah) bulan Mei Rp.421.570.023,00 (empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu dua puluh tiga rupiah) bulan Juni Rp.268.071.832,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bulan Juli Rp.374.433.680,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan bulan Desember Rp.302.164.060,00, (tiga ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu enam puluh rupiah), sehingga total kewajiban pajak PT. Gansa Furindo adalah sebesar Rp.2,6 milyar;
- Bahwa awalnya pada bulan juni 2017 KPP Madya Bekasi menerima

Halaman 76 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tentang adanya sekitar 37-38 wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak tetapi belum melaporkannya, lalu KPP Madya Bekasi melakukan pemanggilan kepada wajib pajak terkait permasalahan itu, dan salah satu wajib pajak yaitu PT. Gansa Furindo, dalam masa pajak 2018 ternyata PT. Gansa Furindo masih saja menerbitkan faktur pajak keluaran tetapi belum melaporkannya dalam SPT masa PPN, lalu dilakukan pemeriksaan atas masa pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 kemudian bulan Juni 2019 KPP Madya Bekasi melakukan pemblokiran e faktur PT. Gansa Furindo sehingga PT. Gansa Furindo tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Wongso;
- Bahwa setahu Saksi, sdri. Elysa Rosita dikenalkan kepada Saksi sebagai akunting PT. Gansa Furindo;
- Bahwa PT. Gansa Furindo terakhir transaksi bulan Mei 2019 setelah Saksi melakukan pencabutan PKP PT. Gansa Furindo;
- Bahwa alasan PT. Gansa Furindo belum membayar pajak karena cash flow perusahaan tidak bagus sehingga uangnya dipakai untuk operasional PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pertama tama saat diketahui ada laporan atau transaksi yang tidak benar, lalu tim analisis melakukan pemeriksaan, kemudian ada masukan dari tim pemeriksa, kemudian dibuatkan SP2DK dalam rangka untuk meminta klarifikasi, apabila wajib pajak merespon dan atas data tersebut diklaim dan dapat dipertanggungjawabkan, maka permasalahan tersebut selesai, namun apabila wajib pajak tidak membuktikan maka Saksi bisa melakukan yang pertama pemeriksaan dan apabila terdapat unsur pidana maka Saksi ajukan usulan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sdr. Akhmad Indra Wirawan tahu ada SP2DK;
- Bahwa SP2DK dikirimkan ke PT. Gansa Furindo dan kemudian ditanggapi oleh PT. Gansa Furindo dengan datang ke kantor Kpp Madya Bekasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Kurnia Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 77 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
  - Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Menara Terus Makmur sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui PT. Gansa Furindo;
  - Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang Jasa Painting dan Powder Coating per spare part kendaraan bermotor roda empat dan roda dua;
  - Bahwa hubungan PT. Menara Terus Makmur dengan PT. Gansa Furindo adalah hubungan kerjasama, PT. Menara Terus Makmur sebagai supplier sedangkan PT. Gansa Furindo sebagai jasa painting produk manufaktur terutama under bracket untuk sepeda motor yang merupakan OEM (owner Equipment Manufacturing) dari Astra Honda Motor;
  - Bahwa pada tahun 2018 PT. Menara Terus Makmur ada transaksi dengan PT. Gansa Furindo;
  - Bahwa nilai transaksinya Saksi tidak ingat;
  - Bahwa bukti invoice, surat jalan, checklist adalah benar ini bukti transaksi PT. Menara Terus Makmur dan PT. Gansa Furindo dalam kurun waktu tahun 2018;
  - Bahwa Dokumen dikeluarkan pada bulan Juli;
  - Bahwa setiap transaksi ada PPNnya 10%;
  - Bahwa setahu Saksi untuk masa pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
  - Bahwa total seluruh tagihan atau transaksinya plus PPN 10% adalah 10 milyar;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur di PT. Menara Terus Makmur sejak tahun 2018;
  - Bahwa setahu Saksi PT. Menara Terus Makmur menjalin kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sebelum tahun 2015;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 78 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. **Himindo Salimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kayaba Indonesia dengan jabatan Accounting Manager;
- Bahwa PT. Kayaba Indonesia bergerak dibidang Industri Komponen dan Perlengkapan sepeda motor roda dua dan mobil;
- Bahwa hubungan PT. Kayaba Indonesia dengan PT. Gansa Furindo adalah hubungan kerjasama berupa subkon jasa powder coating produk manufaktur terutama berupa spring (bagian shock absorger) sepeda motor;
- Bahwa PT. Kayaba Indonesia memiliki kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sejak bulan nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 PT Kayaba Indonesia ada transaksi dengan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa setahu Saksi nilai transaksi PT. Kayaba Indonesia dengan PT. Gansa Furindo di tahun 2018 mencapai Rp.6.920.076.458,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. Kayaba Indonesia kepada PT. Gansa Furindo sudah termasuk PPN sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa terhadap barang bukti invoice PT. Gansa Furindo Saksi mengetahui dokumen tersebut, yaitu invoice yang dikeluarkan oleh PT. Gansa Furindo sebagai dasar melakukan tagihan ke PT. Kayaba Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan;
- Bahwa cara pembayaran PT. Kayaba Indonesia ke PT. Gansa Furindo yaitu dengan cara transfer ke Rekening Bank Artha Graha Internatioal atas nama PT. Gansa Furindo;
- Bahwa PT. Kayaba Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sejak tahun 2016;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak mengalami kerugian



materil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Rifki Arifin, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang dengan jabatan Accounting Manager;
- Bahwa PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT Chandra Nugerah Cemerlang bergerak dibidang otomotif kendaraan roda dua;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Gansa Furindo berupa jasa painting produk manufaktur yaitu komponen sepeda motor roda dua khususnya honda;
- Bahwa PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang memiliki kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sejak tahun 2018;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang ada transaksi dengan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa setahu Saksi nilai transaksi PT. Chandra Nugerah Cipta dengan PT. Gansa Furido dalam kurun waktu tahun 2018 adalah sebesar Rp.552.498.235,00 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang dengan PT. Gansa Furindo adalah sebesar Rp.1.086.518.545,00 (satu milyar delapan puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT Chandra Nugerah Cemerlang kepada PT. Gansa Furindo sudah termasuk PPN 10%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, yaitu data transaksi jasa painting PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang dengan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa cara pembayaran PT. Chandra Nugerah Cipta dan PT. Chandra Nugerah Cemerlang ke PT. Gansa Furindo yaitu melalui rekening Bank OCBC ISP atas nama PT. Chandra Nugerah Cemerlang ke Rekening Bank BNI dan bank BRI atas nama PT. Gansa Furindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Erman Arif Hayadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kayaba Indonesia dengan jabatan Procurement dept heat PT. Kayaba Indonesia;
- Bahwa PT. Kayaba Indonesia bergerak dibidang Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan mobil;
- Bahwa hubungan PT. Kayaba Indonesia dengan PT. Gansa Furindo adalah hubungan kerjasama berupa subkon jasa powder coating produk manufaktur terutama berupa spring (bagian shock absorger) sepeda motor;
- Bahwa PT. Kayaba Indonesia memiliki kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 PT. Kayaba Indonesia ada transaksi dengan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa setahu Saksi nilai transaksi PT. Kayaba Indonesia dengan PT. Gansa Furindo di tahun 2018 mencapai Rp.6.920.076.458,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. Kayaba Indonesia kepada PT. Gansa Furindo sudah termasuk PPN sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tahun 2018;

Halaman 81 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen tersebut, yaitu invoice yang dikeluarkan oleh PT. Gansa Furindo sebagai dasar melakukan tagihan ke PT. Kayaba Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan;
- Bahwa cara pembayaran PT. Kayaba Indonesia ke PT. Gansa Furindo yaitu dengan cara transfer ke Rekening Bank Artha Graha International atas nama PT. Gansa Furindo;
- Bahwa PT. Kayaba Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kerugian materil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Era Dirgantara Mawuntu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asahi Denso Indonesia dengan jabatan Senior manager finance dan accounting;
- Bahwa PT Asahi Denso Indonesia bergerak dibidang manufaktur yang membuat tank cap (tutup tangki bahan bakar) handle switch dan kunci sepeda motor;
- Bahwa hubungan PT. Asahi Denso Indonesia dengan PT. Gansa Furindo adalah hubungan kerjasama berupa jasa painting produk manufaktur berupa tank cap sepeda motor;
- Bahwa PT. Asahi Denso Indonesia memiliki kerjasama dengan PT. Gansa Furindo sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 PT. Asahi Denso Indonesia ada transaksi dengan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa setahu Saksi nilai transaksi PT. Asahi Denso Indonesia dengan PT. Gansa Furindo di tahun 2018 mencapai Rp.3.582.000.265,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima

Halaman 82 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa pembayaran yang dilakukan PT. Asahi Denso Indonesia kepada PT. Gansa Furindo sudah termasuk PPN 10%;
- Bahwa terhadap barang bukti faktur pajak PT. Gansa Furindo kepada PT. Asahi Denso Indonesia Saksi mengetahui dokumen tersebut, yaitu faktur pajak PT. Gansa Furindo sebagai dasar melakukan tagihan ke PT. Asahi Denso Indonesia atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan faktur pajak tersebut sudah dilaporkan dalam SPT PP PT. Asahi Denso Indonesia masa pajak februari 2018;
- Bahwa cara pembayaran PT. Asahi Denso Indonesia ke PT. Gansa Furindo yaitu melalui rekening Bank Mizuho atas nama PT. Asahi Denso Indonesia ke Rekening BNI dan BRI International atas nama PT. Gansa Furindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Elysa Rosita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo sebagai staff accounting dan pajak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf accounting dan pajak di PT. Gansa Furindo sejak tahun 2012 sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf accounting dan pajak di PT. Gansa Furindo adalah membuat laporan keuangan, membuat SPT semua jenis pajak, melaporkan SPT semua jenis pajak, menerbitkan bukti potong PPH pasal 23, membukukan utang dan piutang perusahaan, menghitung penyusutan aktiva tetap baik komersil maupun fiskal;
- Bahwa PT. Gansa Furindo bergerak dibidang usaha pengecatan (painting and powder coating) parts kendaraan bermotor;
- Bahwa pengurus PT. Gansa Furindo adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko;
- Bahwa karyawan yang berhubungan dengan administrasi, Keuangan,

Halaman 83 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akutansi dan perpajakan tahun 2018 adalah sdr. Jaumi Wongso;

- Bahwa pekerjaan jasa yang telah diselesaikan PT. Gansa Furindo oleh maka oleh bagian PPC (Production, Planning and Controlling, Managernya adalah Pak Teddy Ade Gunawan) diterbitkan surat jalan yang akan dikirim bersamaan dengan barangnya ke konsumen. Copy surat jalan juga diberikan kepada Bagian Keuangan, khususnya bagian invoicing (Sdri YULI dan Sdri ELA). Kemudian secara mingguan, dua mingguan atau bulanan (tergantung customer) Sdri. YULI dan/atau Sdri. ELLA membuat rekap transaksi penjualan per customer, kemudian berdasarkan rekap transaksi tersebut membuat invoice dan Faktur Pajak serta sekaligus menginput di aplikasi e-faktur. Invoice dan Faktur Pajak tersebut dikirimkan ke konsumen melalui kurir, dan salah satu hardcopy Faktur Pajaknya juga diberikan kepada Saksi. Berdasarkan Faktur Pajak yang Saksi terima, Saksi melakukan input ke system akuntansi yang kami punya yakni MULTI CIPTA. Dengan menginput Faktur Pajak tersebut akan bisa diperoleh data penjualan dan data piutang. Di sisi lain, kami juga menerima Faktur Pajak dari supplier kami yang akan kami gunakan sebagai Pajak Masukan. Saksi yang bertugas menginput Pajak Masukan tersebut ke aplikasi e-faktur dan juga ke sistem akuntansi MULTI CIPTA. Dengan menginput Faktur Resume Penyidikan sdr. Akhmad Indra Wirawan halaman 99 dari 467 Pajak Masukan tersebut akan bisa diperoleh data pembelian dan juga data utang. Setiap sekitar tanggal 20-an bulan berikutnya maka berdasarkan aplikasi e-faktur sudah bisa diketahui apakah PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Apabila Kurang Bayar maka Saksi akan membuatkan e-billing sebesar PPN yang Kurang Bayar tersebut dan menyerahkan kepada sdr. Jaumi Wongso selaku atasan Saksi sekaligus yang bertugas melakukan penyetoran. Biasanya Saksi hanya menjelaskan secara lisan berapa Pajak Keluaran dan berapa Pajak Masukan sehingga diperoleh jumlah PPN Kurang Bayar tersebut. Tapi kadang juga lewat catatan excel (semacam draft SPT). Apabila pembayaran sudah dilakukan oleh sdr. Jaumi Wongso maka bukti bayarnya akan diberikan ke Saksi untuk Saksi input NTPN nya sehingga bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Sedangkan apabila PPN kurang bayarnya tidak dibayar maka Saksi tidak bisa melaporkan SPT Masa PPN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehari-hari pimpinan PT. Gansa Furindo

Halaman 84 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan;

- Bahwa setahu Saksi total penjualan PT. Gansa Furindo terkait jasa painting dan powder coating adalah sebesar Rp.46.505.243.293,00 (empat puluh enam milyar lima ratus lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pajak yang telah dipungut oleh PT. Gansa Furindo dalam kurun waktu tahun 2018 adalah sebesar RP.4.650.524.329,- (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa setelah suatu PO selesai dikerjakan dan dikirim ke customer, selanjutnya diterbitkan tagihan yang nilai tagihannya adalah sebesar harga jasa yang telah disepakati (DPP) ditambah PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP. Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh customer adalah sebesar sebesar harga jasa yang telah disepakati (DPP) ditambah PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPP dan dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Jadi dalam setiap tagihan kami selalu menagih PPN 10% (sepuluh persen) dari nilai DPP, dan dalam setiap pembayaran atas tagihan tersebut customer selalu melakukan pembayaran termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
- Bahwa yang menandatangani faktur pajak adalah sdr. Jaumi Wongso selaku kuasa dari Direktur tetapi bisa juga langsung ditanda tangani oleh sdr. Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur PT. Gansa Furindo, sedangkan SPT masa PPN yang sudah dilaporkan semua ditandatangani oleh sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan selama tahun 2018 oleh PT. Gansa Furindo, kami telah melaporkan dengan benar Faktur Pajak untuk masa-masa pajak Agustus, September, Oktober dan November 2018. Sedangkan masa-masa lainnya yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 belum kami laporkan. Total Pajak Keluaran yang telah kami laporkan adalah sebesar Rp.1.622.791.804,-. (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) khusus untuk masa pajak Januari 2018, kami telah diperiksa oleh KPP Madya Bekasi dan telah diterbitkan SKPKB nomor 00001/207/18/431/18 tanggal 08 Juni 2018 dengan pokok pajak sebesar pajak keluaran yang

Halaman 85 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami pungut namun belum kami laporkan dan setor yakni sebesar Rp.388.061.542,00- (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa untuk beberapa masa pajak di tahun 2018 belum dilakukan pembayaran dengan alasan masih mengatur cashflow perusahaan;
- Bahwa PT. Gansa Furindo mempunyai Faktur Pajak Masukan yang bisa dikreditkan untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018. Keseluruhan Pajak Masukan yang kami miliki adalah sebagai berikut :  
bulan Januari 2018 Rp.179,888,596,00- (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), Februari 2018 Rp.136,877,723,00- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), Maret 2018 Rp.116,406,334,00- (seratus enam belas juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), April 2018 Rp.165,117,241,00- (seratus enam puluh lima juta seratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), Mei 2018 Rp.142,164,876,- (seratus empat puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) Juni 2018 Rp.83,762,472,00- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), Juli 2018 Rp.88,661,758,00- (delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) Agustus 2018 Rp.114,455,161,00- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah), September 2018 Rp.107,086,351,00- (seratus tujuh juta delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), Oktober 2018 Rp.112,683,529,00- (seratus dua belas juta enam puluh delapan tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), November 2018 Rp.56,822,462,00- (lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), Desember 2018 Rp.95,218,481,00- (sembilan puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), TOTAL Rp.1,399,144,984,00- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta serratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atas Pajak Masukan tersebut, kami telah melaporkan untuk masa pajak Agustus, September, Oktober dan November 2018 dengan jumlah Rp.391.047.503,00- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dan sebagian belum kami laporkan yakni Faktur Pajak Masukan yang diperoleh untuk masa pajak yang SPT

Halaman 86 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa PPN nya belum kami laporkan;

- Bahwa yang berperan dalam pembuatan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2018 yaitu Saksi bertugas menghitung PPN Kurang Bayar berdasarkan data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di aplikasi efaktur. Ini Saksi lakukan setiap sekitar tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 bulan berikutnya, dan membuat e-billing sesuai dengan PPN Kurang Bayar, serta memberitahukan dan menyerahkan ebilling tersebut kepada atasan Saksi, sdr. Jaumi Wongso. Apabila dibutuhkan, maka Saksi akan buat catatan perhitungan atas PPN tersebut dalam format excel. Saksi juga yang bertugas melakukan pelaporan SPT setelah menerima bukti pembayaran dari sdr. Jaumi Wongso. Apabila telah selesai Saksi laporkan, Saksi akan cetak SPT Masa PPN untuk ditandatangani pimpinan, kemudian Saksi arsipkan. Sdr. Jaumi Wongso sebagai Finance Manager bertugas melakukan penyetoran berdasarkan hitungan di SPT serta e-billing, dan apabila sudah dibayar, bukti bayar akan diserahkan lagi ke Saksi untuk kemudian Saksi lakukan pelaporan SPT Masa PPN. sdr. Akhmad Indra Wirawan bertugas menandatangani SPT Masa PPN sebelum Saksi laporkan. Hal itu Saksi tahu karena beberapa SPT Masa yang sudah Saksi buat tidak jadi Saksi laporkan karena belum dilakukan penyetoran PPN kurang bayarnya.
- Bahwa PT. Gansa Furindo belum melaporkan semua Faktur Pajak yang diterbitkan sebagai Pajak Keluaran masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2018 dan masa pajak Desember 2018 karena memang pada masa-masa tersebut kami belum melaporkan SPT Masa PPN yang merupakan sarana untuk melaporkan Faktur-Faktur Pajak tersebut. SPT Masa PPN PT. Gansa Furindo masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2018 dan masa pajak Desember 2018 belum dilaporkan karena memang belum dilakukan penyetoran PPN kurang bayarnya, dan menurut atasan Saksi, sdr. Jaumi Wongso, PPN kurang bayar tersebut belum juga disetorkan karena harus mengatur cashflow perusahaan berdasarkan skala prioritas.
- Bahwa yang dimaksud dengan "mengatur cashflow perusahaan berdasarkan skala prioritas" adalah uang yang masuk ke kas/rekening perusahaan berasal dari penjualan jasa painting dan powder coating dalam tahun pajak 2018, sedangkan uang yang harus keluar dari kas/rekening perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional

Halaman 87 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan seperti biaya gaji, biaya upah, biaya untuk membayar supplier (hutang lama maupun atas pembelian baru), hutang bank, biaya listrik, biaya operasional lain dan biaya pajak selama tahun pajak 2018. Dikarenakan pada tahun pajak 2018 uang yang masuk ke kas/rekening Perusahaan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan uang yang harus keluar dari kas/rekening perusahaan, maka perusahaan mengambil kebijakan untuk membayar biaya yang menjadi prioritas beban perusahaan. Dalam hal ini perusahaan (PT. Gansa Furindo) memprioritaskan untuk membayar gaji pegawai, upah, hutang supplier dan hutang bank. Melihat ketersediaan uang di kas/rekening perusahaan tidak mencukupi maka uang PPN yang telah dibayarkan oleh customer dipakai oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional berdasarkan skala prioritas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memutuskan kapan dilakukan atau tidak dilakukannya penyetoran PPN PT. Gansa Furindo pada masa Februari hingga Juli dan Desember 2018 menurut sepengetahuan Saksi adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur Operasional. Sdr. Akhmad Indra Wirawan adalah pimpinan Saksi yang sehari-hari aktif di kantor.
- Bahwa lebih dahulu Saksi yang bekerja di PT. Gansa Furindo, setelah itu baru sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa rekening penampung termasuk pajak 10% adalah rekening bank BNI;
- Bahwa laporan dibuat oleh saksi per transaksi dan tiap bulan ada rekapannya;
- Bahwa yang masuk ke rekening penampung sekitar sebesar Rp.4,6 milyar;
- Bahwa Pajak PPN yang sudah dibayarkan atau disetor yaitu bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember, dan Februari awal sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PPN disetor setiap bulan;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan pajaknya;
- Bahwa pajak tidak dibayar karena cash flow perusahaan sulit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 88 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





11. **Jaumi Wongso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Saksi benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo dengan jabatan Finance and Accounting Manager;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan supervisi staf yang menjadi bawahan Saksi yakni staf yang berkaitan dengan pembukuan dan keuangan, termasuk pajak (saksi ELYSA, sdri.YULI dan sdri.ELLA), menerima rekapan hasil penjualan dan informasi jatuh tempo pembayaran dari staf bagian invoicing (sdri YULI dan sdri ELLA), menandatangani Invoice Penjualan dan Faktur Pajak, melaporkan kepada pimpinan/atasan Saksi (sdr. Akhmad Indra Wirawan) informasi pembayaran yang akan diterima dari konsumen, memantau pembayaran dari konsumen. Secara umum pembayaran dari konsumen kami terima tepat waktu dan sesuai dengan tagihan yang kami buat atas permintaan pimpinan (sdr. Akhmad Indra Wirawan), melakukan diskusi dengan pimpinan tentang kondisi *cashflow* perusahaan, melakukan semua pembayaran baik utang ke supplier, gaji,pajak,listrik, dan pengeluaran lainnya setelah mendapat perintah atau persetujuan dari sdr. Akhmad Indra Wirawan. Kadang-kadang juga diskusi bertiga bersama sdr.DIDIK NURHADI- bagian engineering. Tetapi khusus pembayaran yang *urgent* dan jumlahnya kecil yang sumber dana nya dari petty cash, Saksi dapat melakukan pembayaran tanpa menunggu persetujuan sdr. Akhmad Indra Wirawan, namun tetap dilaporkan kemudian dalam laporan pengeluaran kas;
- Bahwa PT. Gansa Furindo ada tunggakan pajak di tahun 2018;
- Bahwa PT. Gansa Furindo mengalami kesulitan dalam hal keuangan;
- Bahwa yang menganalisa terkait kesulitan cash flow perusahaan (PT. Gansa Furindo) adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur Operasional yang sehari-hari merupakan pimpinan tertinggi yang aktif di perusahaan dan berperan sebagai pengambil keputusan baik operasional, keuangan, marketing dan lain-lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo Saksi selalu berkoordinasi dengan sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa Saksi mencatat uang masuk dan tagihan-tagihan kemudian Saksi serahkan laporan tersebut ke sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa prosedur pembayaran atas segala pembayaran (termasuk juga pembayaran pajak) yang dilakukan oleh PT. Gansa Furindo bahwa untuk pembayaran selain dana yang bersumber dari *petty cash*, maka Saksi terlebih dahulu membuat jurnal voucher serta menerbitkan check dan meminta persetujuan dan tanda tangan sdr. Akhmad Indra Wirawan, Saksi menerbitkan check biasanya setelah diskusi dan telah disetujui secara lisan oleh sdr. Akhmad Indra Wirawan. Setelah cek ditandatangani oleh sdr. Akhmad Indra Wirawan, maka Saksi biasanya memerintahkan kurir perusahaan ke teller bank untuk melakukan pembayaran. Sedangkan untuk pembayaran lewat internet banking, Saksi melakukan jurnal voucher, dan setelah disetujui oleh pimpinan (sdr. Akhmad Indra Wirawan) kemudian Saksi melakukan pembayaran melalui internet banking. Saksi memang dikasih otorisasi untuk memegang token internet banking PT. Gansa Furindo oleh sdr. Yohanes.
- Bahwa prosedur penerimaan pembayaran dari customer atas penjualan jasa PT. Gansa Furindo bahwa setelah invoice kami terbitkan, maka biasanya tempo pembayaran dari konsumen adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan, berbeda tiap konsumen. Pembayaran oleh *customer* disetorkan ke Rekening Bank : Rekening Bank BNI Cab Cikarang akun nomor 3987398733 atas nama PT. Gansa Furindo dan Rekening Bank Artha Graha Cab. Cibusah Cikarang akun nomor 0921215151 atau Rekening Bank BRI Cab Soekarno-Hatta akun nomor 114401000386308 atas nama PT. Gansa Furindo. Untuk tagihan tahun 2018 yang diterbitkan PT. Gansa Furindo, semuanya sudah lunas dibayar oleh semua konsumen, termasuk PPN yang kami tagih sebesar 10% dari harga jual.
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan sdr. Akhmad Indra Wirawan terkait pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko sebagai pemilik saham mayoritas (*owner*) PT. Gansa Furindo dan secara formal adalah sebagai Direktur Utama PT. Gansa Furindo. Hubungan Saksi dengan sdr. Yohanes adalah juga hubungan

Halaman 90 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di mana Saksi bekerja di perusahaan yang mana pemegang saham mayoritasnya dan sekaligus Direktur Utamanya adalah sdr. Yohanes. Namun dalam keseharian, sdr. Yohanes sangat jarang ke kantor dan cenderung tidak aktif secara langsung dalam kegiatan operasional. Peran pimpinan tertinggi sehari-hari ada pada sdr. Akhmad Indra Wirawan;

- Bahwa setahu Saksi, sdr. Yohanes pernah dipanggil ke kantor madya pajak;
- Bahwa setahu Saksi PT. Gansa Furindo telah menerima pembayaran dari para konsumen atas semua tagihan PT. Gansa Furindo selama tahun 2018. Dan pembayaran yang kami terima adalah untuk harga barang (Dasar Pengenaan Pajak) ditambah PPN 10% dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. akan tetapi uang tersebut dipakai oleh PT. Gansa Furindo untuk membayar supplier;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang PPN yang dibayarkan oleh customer masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa Bank BNI Cab Cikarang akun nomor 3987398733 atas nama PT. Gansa Furindo dan Rekening Bank Artha Graha Cab. Cibusah Cikarang akun nomor 0921215151 atau Rekening Bank BRI Cab Soekarno-Hatta akun nomor 114401000386308 atas nama PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Uang PPN yang masuk itu ke rekening BNI semua;
- Bahwa sdr. Akhmad Indra Wirawan adalah Direktur Operasional di PT. Gansa Furindo sedangkan sdr. Yohanes adalah Direktur Utama di PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada take over PT. Gansa Furindo dari Mr. Cang ke sdr. Yohanes dan sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa take over PT. Gansa Furindo dari Mr. Cang ke sdr. Yohanes dan sdr. Akhmad Indra Wirawan pada tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi take over melalui bank;
- Bahwa setahu Saksi keadaan PT. Gansa Furindo saat dijual dalam keadaan belum rugi namun setelah ada pinjaman ke bank baru PT. Gansa Furindo merugi, dan setahu Saksi ada uang sebesar Rp.30 milyar dibayarkan kepada Mr. Cang dan dibebankan kepada perusahaan dan sdr. Yohanes mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi omset PT. Gansa Furindo sebulan sekitar 3 milyar;

Halaman 91 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Analisa Saksi adalah ada kesalahan investasi, karena sdr. Yohanes terlalu berani untuk mengambil perusahaan dengan beban yang terlalu tinggi;
- Bahwa tetapi harusnya diimbangi antara pemasukan dengan pengeluaran;
- Bahwa minimal pendapatan atau omset PT. Gansa Furindo harusnya minimal 7-8 milyar perbulan tetapi omset tidak tercapai;
- Bahwa pada saat take over sudah diperhitungkan dengan adanya pinjaman bank sebesar ini, berapa rupiah uang yang harus masuk keperusahaan;
- Bahwa setahu Saksi yang ajuin ke bank tim sdr. Yohanes dan sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa laporan bulanan dibuat tahunan karena masih manual;
- Bahwa terkait masalah perpajakan, setiap bulan saksi Elysa membuat laporan ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari pajak yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi selalu menyampaikan kepada sdr. Akhmad Indra Wirawan terkait tagihan PPN tersebut setiap bulannya yang belum dibayarkan;
- Bahwa kadang setiap bulan, kadang dua bulan sekali;
- Bahwa dua bulan sekali karena kadang Saksi melihat omset yang masuk dan keadaan keuangan perusahaan juga sehingga tidak memungkinkan membayar PPN tersebut;
- Bahwa Saksi ikut mengambil keputusan karena Saksi bekerja dibagian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke sdr. Yohanes, tetapi saat ada panggilan dari KPP madya Pajak, Saksi baru melaporkan ke sdr. Yohanes;
- Bahwa sdr. Yohanes tidak pernah menandatangani SPT;
- Bahwa setahu Saksi gaji sdr. Yohanes adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi kadang-kadang tidak dibayarkan karena cash flow keuangan mengalami kesulitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari tahun 2015 PT. Gansa Furindo rutin membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan direksi terkait laporan – laporan kadang dirumah kadang di kantor;

Halaman 92 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa otorisasi internet banking adalah Saksi dan diijinkan oleh sdr Yohanes dan dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa yang lebih aktif mengelola perusahaan adalah sdr. Akhmad Indra Wirawan seperti operasional dan perpajakan;
- Bahwa Saksi diskusi dengan sdr. Akhmad Indra Wirawan, dan dilihat ada berapa banyak uang yang masuk, sebelumnya Saksi buat laporannya dan lapor ke sdr. Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa jumlah Pajak PPn yang belum disetor atau dibayar sebesar Rp.2,6 milyar;
- Bahwa pada tahun 2020 masih ada transaksi tetapi sedikit;
- Bahwa tahun 2019 pajak sudah dirapihkan;
- Bahwa yang menentukan keputusan uang PPN dibayarkan untuk apa adalah pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi PPn dibayarkan setiap tanggal 20-30 perbulan;
- Bahwa Saksi sejak Mei 2020 sudah tidak dibayarkan gajinya lagi oleh PT. Gansa Furindo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. **Akhmad Indra Wirawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa bergabung didalam PT. Gansa Furindo karena awalnya pada tahun 2014 PT. Gansa Furindo di take over oleh sdr. Yohanes, dan kebetulan Saksi bekerja di PT. Astra dan PT. Gansa Furindo merupakan subcom, kemudian setelah PT. Gansa Furindo di take over oleh sdr. Yohanes, Saksi diminta untuk menjalankan operasional PT. Gansa Furindo terutama dibagian produksi dan marketing;
- Bahwa saat itu jabatan Saksi Direktur Operasional, sedangkan jabatan sdr. Yohanes Direktur Utama;
- Bahwa sdr. Yohanes yang sebagai Direktur Utama namun Saksi sebagai Direktur Operasional yang menjalankan segala keputusan dari korporasi, karena melihat latar belakang Saksi yang basicnya manufactur dan kebetulan PT. Gansa Furindo bagian dari expert Saksi di perusahaan sebelumnya, dan market dari perusahaan PT. Gansa Furindo ini adalah roda dua dan roda empat. Jadi Saksi banyak berkecimpung di operasional dan marketing, dan sehari-hari memang

Halaman 93 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada diperusahaan untuk mengontrol dari operasional dan marketing sampai dengan finance;

- Bahwa kewenangan Saksi di bagian operasional yaitu pertama memastikan roda produksi tetap berjalan, artinya ada proses dari awal pembelian non material sampai akhir, dan pembelian non material ini Saksi bersinggung untuk di proses pembelian dan kemudian Saksi harus mengatur dari sisi financenya;
- Bahwa di PT. Gansa Furindo tidak ada direktur finance;
- Bahwa karena dari proses mulai dari struktur memang ini ada perhatian dari operasional karena memang self control dari perusahaan tidak besar sehingga masih bisa di handle oleh operasional;
- Bahwa terkait kepemilikan saham PT. Gansa Furindo, diawal tahun 2014 sesuai dengan akta pendiriannya ada empat orang yang memiliki saham, yaitu ada sdr. Yohanes, Suhendro, Saksi dan Mr Cang;
- Bahwa sampai saat ini kepemilikan saham hanya dua orang yaitu saham mayoritas adalah sdr. Yohanes dan saham minoritas adalah saksi Elysa;
- Bahwa sdr. Yohanes sebagai Direktur Utama memberikan kewenangan kepada Saksi selaku Direktur Operasional, Pertama karena sdr. Yohannes memiliki beberapa usaha selain PT. Gansa Furindo, dan sehari-hari sdr. Yohanes tidak sering datang ke perusahaan, dan secara basic memang Saksi yang cukup menguasai dari manufactur, sehingga untuk mempercepat proses urusan dan sebagainya sdr. Yohanes mendelegasikan ke Saksi;
- Bahwa pendelegasian hanya secara lisan, karena sdr. Yohanes sibuk ditempat yang lain sehingga Saksi diminta untuk membantu mengontrol PT. Gansa Furindo ini;
- Bahwa terkait kapasitas Saksi untuk mengontrol, ada kewajiban Saksi untuk memberi laporan kepada sdr. Yohanes;
- Bahwa hal-hal yang dilaporkan ketika sdr. Yohanes dibutuhkan untuk hadir disuatu event, misalnya ketika Saksi diminta oleh customer untuk ketemu sama owner maka Saksi menghadirkan sdr. Yohanes, seperti ketika Saksi diminta menghadirkan owner di kantor pajak maka Saksi menghadirkan sdr. Yohanes. Selama proses ini masih bisa Saksi handle atau pegang, maka Saksi akan handle;

Halaman 94 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya ada peningkatan tentang sales, atau ada untuk customer mana saja yang akan kita naikan untuk sales maka Saksi melaporkan ke sdr. Yohanes, dan itu Saksi sampaikan ketika sdr. Yohanes hadir ke perusahaan;
- Bahwa Saksi paham menyangkut kewenangan apa saja yang ada di akta pendirian perusahaan;
- Bahwa tidak ada dibuat secara tertulis kewenangan dari sdr. Yohanes ke Saksi;
- Bahwa untuk melancarkan proses perusahaan, sehingga Saksi diberi kewenangan oleh sdr. Yohanes;
- Bahwa kewenangan secara keseluruhan termasuk juga wajib pajak;
- Bahwa terkait pajak sejak tahun 2015 pembayaran pajak memang sudah bolong-bolong, tidak sepenuhnya selama setahun kami bayar full dan itu berlanjut sampai tahun 2018, dan untuk tahun 2019 pembayaran full satu tahun. Terkait tunggakan pajak ketika itu dana digunakan untuk bayar produksi, dan ketika sales naik itu bisa membantu membayar yang tertunggak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali dipanggil oleh Kantor Pajak, tetapi setiap ada panggilan Saksi pasti menghadap;
- Bahwa Saksi dipanggil kantor pajak pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi dipanggil kantor pajak, dan saat itu sdr. Yohanes diminta hadir juga selaku direktur utama, lalu Saksi mengajak sdr. Yohanes dan Saksi menceritakan kondisi perusahaan, dan kemudian Saksi dan sdr. Yohanes menghadap kepala KPP yaitu saksi Agus;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil terkait masalah pajak tahun 2019;
- Bahwa Saksi dipanggil kantor pajak awal tahun 2019 untuk masalah pajak ditahun 2018;
- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh saksi Agus untuk menghadirkan sdr. Yohanes sebagai owner, sehingga Saksi hadir bersama dengan sdr. Yohanes;
- Bahwa ketika itu memang dijelaskan oleh saksi Agus terkait kesalahan kami menggunakan uang pajak dari customer, kemudian kami diminta untuk mengangsur dari hutang pajak tersebut;
- Bahwa kami disepakati untuk mencicil hutang pajak tersebut, disamping kami diundang untuk membayar tetapi kami juga diminta untuk mencicil;

Halaman 95 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mengenai cicilan tersebut, diketahui dan disepakati juga oleh sdr. Yohanes selaku pemegang saham dan direktur utama;
- Bahwa perkembangannya sampai saat ini sudah ada yang pernah dicicil, saat itu Saksi mencicil sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2018 dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak sebelumnya;
- Bahwa memang masalah pajak sudah ada sejak tahun 2015;
- Bahwa untuk tahun pajak 2018 Saksi ada pertemuan ditahun 2019, untuk tahun pajak 2017 Saksi ada pertemuan dengan kantor pajak ditahun 2018;
- Bahwa selama ini selalu Saksi yang bertemu orang kantor pajak, dan sdr. Yohanes baru ketemu orang pajak pada tahun 2019;
- Bahwa tanggapan sdr. Yohanes yaitu menanyakan kenapa pembayaran pajak terpotong-potong, lalu Saksi jelaskan bahwa alasan pajak belum dibayar karena kondisi saat itu lebih memprioritaskan produksi dan agar ada produksi supaya bisa menghasilkan profit dan bisa kita bayarkan pajak-pajak tersebut;
- Bahwa saat itu disepakati untuk mencicil hutang pajak tersebut, dan sdr. Yohanes berharap itu bisa dicicil disamping sdr. Yohanes juga ingin membantu dengan mencari dana untuk membayar hutang pajak tersebut;
- Bahwa sehari-hari Saksi disibukan dengan pekerjaan dan pada tahun 2018 Saksi pernah melaporkan ke sdr. Yohanes terkait arus kas perusahaan secara global jadi perusahaan sedang tertatih-tatih untuk mengejar produksi, jadi Saksi hanya melaporkan secara global saja terutama yang menyangkut produksi;
- Bahwa perpajakan saat itu masih kami yang handle (pegang) dan ketika ditahun 2019 baru Saksi menghadirkan owner ke kantor pajak;
- Bahwa Saksi tidak detail melaporkan pajak ke sdr. Yohanes, tetapi Saksi lebih sering membicarakan agar perusahaan ini bisa berjalan secara operasional;
- Bahwa sdr. Yohanes berusaha akan membantu mencari dana untuk biaya produksi;

Halaman 96 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi baru melaporkan, saat itu Saksi ingin menghadap di kantor pajak, tetapi karena kapasitasnya tidak bisa Saksi yang menghadap maka Saksi memberitahukan sdr. Yohanes untuk menghadap ke kantor pajak;
- Bahwa kejadian ini terjadi sejak tahun 2015 dan setiap tahunnya kondisi perusahaan setiap ada masalah selalu Saksi laporkan;
- Bahwa sdr. Yohanes hanya menanyakan kenapa pajak tidak dibayar, dan Saksi menjelaskan ada alasan-alasan yang sudah Saksi sampaikan dan bisa diterima oleh sdr. Yohanes;
- Bahwa benar Saksi mendapat gaji sekitar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa permasalahan ini sebenarnya berawal dari tahun 2015, saat itu Saksi memang bisa handle dan berlanjut, sampai akhirnya tahun 2018 Saksi tidak bisa handle dan harus menghadirkan sdr. Yohanes, maka Saksi memberitahukan sdr. Yohanes;
- Bahwa jadi karena sdr. Yohanes telah menyerahkan kewenangan ke Saksi jadi Saksi yang handle, memang Saksi melaporkan ke sdr. Yohanes tetapi secara global saja terkait kondisi hutang perbankan, kondisi perusahaan, jadi Saksi melaporkan hal tersebut ke sdr. Yohanes ketika Saksi diminta menghadirkan sdr. Yohanes ke kantor pajak, dan laporan Saksi ke sdr. Yohanes tidak tiap bulan;
- Bahwa Saksi sudah kenal duluan dengan PT. Gansa Furindo karena sebagai subcom PT Astra;
- Bahwa kalo Mr Cang Saksi tidak kenal;
- Bahwa ketika itu ada tim dari PT. Astra salah satu rekan Saksi dan kenal dengan sdr. Yohanes, dan tim kami secara kompeten menjelaskan analisisnya kemudian Saksi ditunjuk untuk ada didalam akta sebagai direktur;
- Bahwa yang menunjuk Saksi yaitu dari tim astra karena saat itu ada yang mau dijual subcom nya PT. Astra dan setelah PT. Gansa Furindo di take over lalu Saksi ditunjuk untuk masuk ke dalam akta perusahaan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa untuk proses bisnisnya Saksi pernah mempresentasikan sebelumnya;
- Bahwa memang ada beberapa contoh customer ada yang meminta cukup Saksi saja yang menjalankan roda bisnis, tetapi ada juga

Halaman 97 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer yang meminta untuk bertemu dan kenalan dengan Saksi Yohanes.

- Bahwa ketika itu selalu Saksi yang menghandle, termasuk yang pemeriksaan-pemeriksaan;
- Bahwa terkait yang pajak untuk tahun 2014, 2015, 2017 yang belum dibayar itu sudah terbit SKPKD, namun bukan bentuk SP2DK lagi, itu hasil dari pemeriksaan, Saksi hadir dan ikut tanda tangan;
- Bahwa SKPKD PPN yang belum disetor;
- Bahwa SPT masa PPN Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa sdr. Yohannes tidak ada tanda tangan SPT Masa PPN;
- Bahwa termasuk juga yang dipanggil oleh saksi Agus, untuk mengangsur Rp.200.000.000,00, (dua ratus juta rupiah) ada intruksi dari sdr. Yohanes kepada Direktur Operasional untuk melakukan perlindungan cash flow perusahaan agar mampu mengangsur, jadi sdr. Yohannes berharap bisa melaksanakan angsuran;
- Bahwa pada saat itu saksi Agus pun sudah memberikan kelonggaran dan sudah dilaksanakan kurang lebih 2 atau tiga bulan, setelah itu tidak ada lagi karena kondisi keuangan;
- Bahwa dari finance bentuk laporannya untuk tahunan atau bulanan yaitu untuk cash flow bulanan dimana uang masuk dari customer lalu apa yang harus perusahaan beli, jadi dibuat laporan cashflownya;
- Bahwa laporan keuangan dari cash flow saja karena memang belum jadi, jadi laporan harian dan bulanan hanya menggunakan uang cash flow saja untuk bisa mengambil keputusan termasuk untuk membayar pajak;
- Bahwa Manager Finance tidak pernah membuat laporan bulanan tetapi hanya membuat laporan tahunan saja;
- Bahwa kondisi keuangan perusahaan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dalam keadaan rugi, awal tahun 2019 saat itu kami pembayaran dibantu sdr. Yohanes, saat itu sdr. Yohanes mencari dana untuk membantu membayar melunasi hutang pajak dan untuk membantu proses produksi;
- Bahwa pertimbangan secara finance perusahaan sedang bermasalah untuk pembayaran seluruhnya, dan kami berharap saat itu mendahulukan produksi dengan harapan sales akan naik dan profitnya itu bisa menutupi hutang pajak;

Halaman 98 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk tidak dulu membayar pajak, dan itu murni inisiatif Saksi;
- Bahwa terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Saksi, yang melakukan transaksi dengan customer adalah perusahaan;
- Bahwa terkait transaksi dengan customer, yang inisiatif untuk memungut PPN 10%, sudah ada MOUnya, bahwa PPN 10% itu sudah ditanggung oleh customer dan langsung dipungut ketika transaksi;
- Bahwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, setiap bulannya ada 15-20 perusahaan yang melakukan transaksi;
- Bahwa tiap bulan ada customer yang melakukan pembayaran tiap dua minggu, ada juga pembayaran sebulan sekali ada juga 45 hari;
- Bahwa pembukuan terhadap transaksi tersebut ada diperusahaan;
- Bahwa jika ditotal dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 PPN yang sudah dipungut sekitar 4,6 milyar;
- Bahwa Saksi dengan manager finance ada membicarakan uang PPN yang masuk ke rekening perusahaan dan uangnya akan dibuat nutupin biaya operasional lainnya, jadi memang ada bulan-bulan tertentu PT. Gansa Furindo tidak bisa untuk running sehingga kami menggunakan uang tersebut untuk biaya produksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membicarakan dengan sdr. Yohanes terkait hal tersebut, Saksi membicarakan hal tersebut dengan manager finance;
- Bahwa hasil pembicaraan dengan manager finance Saksi hanya melapor ke sdr. Yohanes saat Saksi dan sdr. Yohanes dipanggil ke kantor pajak;
- Bahwa jadi setiap bulan Saksi tidak ada report atau laporan ke sdr. Yohanes terkait hal tersebut;
- Bahwa selama bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 tidak ada rapat perusahaan membicarakan masalah-masalah perusahaan sehingga semua pengurus mengetahui hal ini bahwa ini sudah disetor PPN nya tetapi kita kelola untuk perusahaan dan tidak disetorkan ke kantor pajak, jadi kondisi ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015, pada saat itu kami bisa membayar, tetapi setelah 2018 ternyata kami dipanggil oleh kantor pajak;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan global saja bahwa kondisi keuangan sedang ada masalah terkait biaya produksi dan lainnya;

Halaman 99 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang sudah disetorkan yaitu pajak bulan Januari, Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember tahun 2018, sedangkan untuk bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni dan bulan Desember 2018 belum disetorkan uang pajaknya;
- Bahwa terkait untuk yang enam bulan sudah disetor itu, apakah akibat dari Saksi setelah dipanggil pajak atau inisiatif Saksi sendiri, menurut Saksi memang di tahun 2018 pembayarannya seperti itu, dan itu bukan akibat dari penyidikan pajak, mengapa seperti itu karena siklus otomotif diakhir tahun itu meningkat sehingga kami ada keuntungan lebih;
- Bahwa didalam dakwaan ada total 4,6 milyar PPN selama tahun 2018 dan yang sudah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp.1,6 milyar yaitu dari bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember 2018, untuk yang bulan Januari dan Juli 2018 tidak ada, Saksi menjelaskan bahwa untuk bulan Januari Saksi tidak bayar full sedangkan untuk bulan Juli Saksi bayar full;
- Bahwa terkait tidak disetorkannya PPn ini, apakah ada hal lain yang menyebabkan selain untuk operasional perusahaan sehingga keuangan Saksi jadi bermasalahan menurut Saksi secara finance kami memang kurang, dan kami lakukan apapun untuk produksi karena jika produksi tidak jalan maka kami tidak dapat uang dan ada 300 karyawan diperusahaan Saksi yang mencari makan di PT. Gansa Furindo, jadi kami melakukan ini semata-mata untuk produksi dan berharap produksi kami naik dan ada investor yang membeli saham kami sehingga kami bisa membayar pajak ini;
- Bahwa PT. Gansa Furindo berhenti awal tahun 2020;
- Bahwa karyawannya untuk yang kontrak kami putus kontrak sedangkan untuk pegawai kami rumahkan;
- Bahwa terkait dengan pajak yang tidak disetorkan ini, usaha yang dilakukan Saksi dan sdr. Yohanes yaitu sudah berencana untuk menjual saham sdr. Yohanes, dan belum ada investor;
- Bahwa untuk asset perusahaan yang masih bisa diselesaikan hanya tanah dan bangunan dan mesin saja;
- Bahwa asset PT. Gansa Furindo sekitar 130 milyar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 100 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Wahyudi, S.E., S.S.T., Ak., S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan sebelum menandatangani BAP Ahli telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa semua keterangan Ahli benar dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli pertama karena kompetensi serta pengetahuan dan akademis yaitu Ahli mempunyai latar belakang S1, S2, S3 hukum secara akademis, dan secara praktek atau pengalaman Ahli sudah 28 tahun bekerja di Direktorat jenderal pajak dan Ahli pernah menjadi kepala seksi pengaturan dan tata cara perpajakan selama 3,6 tahun, kepala seksi yang menangani peraturan atau induknya undang-undang pajak, lalu Ahli sering menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana perpajakan kurang lebih sudah 10 kali menjadi Ahli untuk dimintai keterangan terkait pidana perpajakan baik di Jakarta maupun di jogyakarta dan dibekasi
- Bahwa pada dasarnya perpajakan itu terbagi dua yaitu Perpajakan pusat dan daerah, dalam kasus ini adalah perpajakan pemerintah pusat, dimana ada empat aturan material dan tiga aturan formal, aturan material pertama adalah : Undang-undang yang menjelaskan masalah pajak yaitu UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPH). Yang kedua UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No 42/2009 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (UU PPN dan PPnBM), yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994. (UU PBB), keempat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 (UU Bea Meterai), itu empat undang-undang perpajakan pusat yang mengatur tentang materil, sedangkan undang-undang formil adalah : Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum

Halaman 101 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



dan tata cara perpajakan (UU KUPP), lalu undang-undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. (UU PPSP) dan terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (UU Pengadilan Pajak);

- Bahwa Wajib Pajak menurut pasal 1 angka 2 UU KUP No 6 tahun 1983 yang sudah diubah empat kali dan sudah diubah juga dengan uu cipta kerja, wajib pajak adalah orang atau badan sebagai pembayar pajak, pemungut pajak atau pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa yang berhak mewakili badan dalam uu KUP sesuai pasal 32 yaitu Para Pengurus;
- Bahwa para pengurus ini sebagaimana yang disebutkan dalam Akta pendirian perusahaan, yang pertama apa yang ada didalam Akta pendirian namun dalam perkara pajak pengurus ini maksudnya luas, orang yang nyata-nyata mengambil kebijakan atau mengambil keputusan walau namanya tidak ada dalam akta pendirian, itu bisa juga disebut sebagai pengurus. Ada pengurus yang formal dan ada juga pengurus material, Namanya tidak ada tapi ia sangat menentukan kebijakan atau mengambil keputusan;
- Bahwa jika kita menggunakan APBN tahun 2020 maka PPN hampir 40% dari total penerimaan pajak, sedangkan PPh sekitar 50%, yang dimaksud dengan PPn yaitu ilustrasinya seperti ini : yang dimaksud dengan pertambahan nilai itu misalnya Ahli sebagai penjual, waktu beli handphone seharga 10 juta lalu Ahli jual 15 juta, pada saat Ahli beli 10 juta itu sudah termasuk PPn nya 10%, sehingga Ahli bayar 11 juta, kemudian Ahli jual 15 juta, maka pajaknya 1,5juta, yang Ahli setorkan ke negara 1,5 juta dikurangi pajak masukan waktu beli 1 juta, sehingga yang Ahli setorkan pajaknya adalah Rp.500.000,00. Itu sama dengan kasus yang sekarang disidangkan adalah jenis pajaknya PPN karena pada intinya perusahaan tidak menyetorkan apa yang sudah diberikan oleh pembeli, pajak PPN sebenarnya yang bayar pembeli, tetapi sebenarnya pedagang hanya membayar ke negara hanya selisihnya saja, jadi sebenarnya bebannya ada di pembeli, tetapi apabila pedagang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan maka Ahli yang dituntut sebagai pedagang;
- Bahwa Pertama yang wajib dari pengusaha itu adalah apabila

Halaman 102 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



omsetnya diatas 4,8 milyar maka harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kemudian setelah menjadi PKP lalu dihitung berapa pajak pembelian dan pajak penjualan, hitungan selisihnya harus disetorkan ke negara dengan cara melalui SPT PPN, setelah menghitung lalu membayar melalui kas negara atau bank, setelah itu dimasukan kedalam SPT kemudian dilaporkan, jadi urutannya mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan;

- Bahwa selain barang, jasa juga dapat dikenakan pajak, yang tidak dikenakan pajak yang bersifat sosial atau publik;
- Bahwa Faktur pajak diatur dalam pasal 1 angka 23 UU nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah UU No 42 tahun 2009, faktur pajak adalah bukti Pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau direktorat jenderal bea dan cukai pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak;
- Bahwa Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, atau impor barang kena pajak;
- Bahwa Pemungutan pajak dalam UU KUP secara filosofis maupun secara eksplisit pada dasarnya pemungutan pajak itu melalui 4 (empat) tahap, yaitu pertama pembinaan atau edukasi, kedua pelayanan, ketiga pengawasan (apakah yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai peraturan atau belum) dan yang keempat yaitu penegakan hukum, dimulai dengan penegakan hukum administratif (jika tidak bisa maka penegakan hukum secara pidana), apabila wajib pajak sudah sampai penegakan hukum pidana maka itu merupakan upaya terakhir, bahkan didalam penegakan hukum pidanapun ada beberapa tahap, ada yang namanya pemeriksaan bukti permulaan, pada saat bukti permulaan wajib pajak sudah ditawarkan untuk mengambil jalan perdamaian dengan mengambil denda administrasi 100%, kemudian wajib pajak tidak bayar maka masuk ke penyidikan, dan uu pajak masih memberikan fasilitas lagi untuk damai yaitu penghentian penyidikan dan itu wajib pajak harus membayar pajak dan denda sebesar 400% ;
- Bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa adalah pasal 39 ayat 1 huruf i dan c UU no. 6 tahun 1983, namun dalam praktek tidak langsung memasukan pidananya karena kita melalui persuasife terlebih dahulu dan dalam kasus ini juga sudah dilakukan persuasive, namun karena tidak bisa maka dimasukan juga kedalam pidana karena memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat 1 huruf i dan c UU No. 6 tahun 1983;

- Bahwa dalam kurun waktu januari 2018 sampai dengan desember 2018 ada 4,6 milyar yang sudah dipungut atau dipotong dari pembeli, dan yang sudah dibayar adalah Rp.1,6 milyar, kemudian yang sudah diterbitkan tagihan secara administrasi sekitar Rp.400.000.000,00 kemudian sisanya sekitar Rp.2,6 milyar yang tidak dibayar sama sekali dan tidak ditagih juga dengan cara administrasi, karena berdasarkan itikad baik dari wajib pajak setelah proses persuasive berkali-kali wajib pajak tidak menunjukkan adanya itikad baik, sehingga dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa Ilustrasi : contoh direktur utama pada saat pembayaran pajak 2018 dia tidak mengetahui, tetapi saat klarifikasi, direktur tersebut sudah dipanggil dan sudah disampaikan untuk melunasi pajak tersebut tetapi tidak dibayar, apakah yang Ahli maksud dengan mens rea itu hanya yang kejadian tahun 2018 atau sampai kejadian di tahun 2019. pada tahun 2018 memang tidak ada mens rea nya tetapi pada saat dia dipanggil tahun 2019 dan tetap tidak membayar maka munculah mens rea nya;
- Bahwa sebenarnya PPh itu punya masa waktu untuk menyetorkan yaitu pada satu bulan berikutnya, dan dianggap tidak menyetorkan pada saat waktu lewat satu hari dianggap sudah tidak menyetorkan;
- Bahwa pasal 13A ayat 1 UU KUP dengan pasal 39 ayat 1 adalah sama-sama perbuatan tidak menyampaikan SPT, tetapi pasal 13A ayat 1 adalah sifatnya administratif, secara pidana Ahli tidak mengerti dengan pasal 13A ayat 1 UU KUP karena tidak ada literatur dinegara lain yang menganutnya, sehingga itu merupakan pidana yang diadministrasikan. Didalam praktek penerapan hukum pajak pasal 13A ayat 1 tidak pernah digunakan;
- Bahwa menurut Ahli yaitu satu perbuatan dimasukan wilayah administrasi itu ditentukan oleh suatu unsur yaitu pertama Mens rea atau niat jahatnya, yang kedua ada yang dimintai tanggung jawab atas perbuatan itu, dan kemungkinan pada saat itu oleh KPP memang yang bulan januari 2018 tidak memenuhi unsur mens rea atau tidak ada niat jahat karena wajib pajak kooperatif;
- Bahwa kooperatif itu bukan masalah kedatangannya atau sikap tetapi korporatif adalah realisasi pembayarannya;
- Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 yang dimaksud dengan unsur setiap

Halaman 104 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



orang adalah wajib pajak yaitu orang atau badan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan wakil berdasarkan pasal 39 ayat 1 adalah orang yang mewakili hak dan kewajiban suatu badan hukum.
- Bahwa wakil adalah satu kesatuan dari direktur/komisaris yang ada didalam akta tersebut;
- Bahwa mengenai wakil yang dimaksud dalam pasal 43, apakah yang bisa dipidanakan didalam pasal 39 termasuk wakil yang tidak mengetahui perbuatan tersebut, menurut Ahli iya termasuk, karena dia sebagai wakil dan untuk perbuatan-perbuatan yang signifikan meskipun dia tidak mengetahui tetapi dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang dilakukan oleh direktur lain;
- Bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan SPT yaitu orang yang tanda tangan di SPT tersebut adalah mewakili badan;
- Bahwa pengertian wakil didalam pasal 43 UU KUP adalah orang yang menyuruh, turut melakukan, menganjurkan, yang membantu yang melanggar, mengapa beda dengan pendapat Ahli bahwa orang yang tidak ada kaitannya bisa turut serta dipidanakan, Ini bukan pernyataan teori pidana, ini masih didalam wakil berdasarkan UU KUP, karena dalam ketentuan pidana lebih luas lagi, artinya apabila ada orang yang bukan wakil turut serta melakukan dapat juga dituntut pidana juga;
- Bahwa jika bicara orang pribadi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Gansa memang berbeda, yang dimaksud mens rea tadi adalah jika ada yang dilakukan oleh salah satu direksi dalam mens rea juga mencerminkan garis dari badan itu sendiri yaitu sudah memenuhi;
- Bahwa menurut Ahli korporasi lebih luas karena belum tentu berbentuk badan secara fisik kelihatan, bisa juga hanya para pemilik modal saja;
- Bahwa yang dimintai pertanggung jawaban para direksi, tentu saja jika dia berbuat untuk dan atas nama korporasi maka bisa juga dimintai pertanggung jawaban terhadap korporasi dan para pihak yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli undang-undang perseroan terbatas lebih banyak didalam area hukum privat, tetapi dalam hukum tindak pidana karena hukum publik, jadi pada saat orang mendirikan PT tanggung jawabnya hanya sebatas modal, tetapi pada saat dia melanggar hukum publik atau hukum pajak, maka tanggung jawab adalah para Direksi;
- Bahwa memang pertanggung jawaban di dalam hukum pajak lebih luas dibanding hukum korporasi, dan itu sudah berlaku dimanapun bukan

Halaman 105 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



hanya di Indonesia;

- Bahwa pertama adalah para pendiri yang sebenarnya, dan kedua adalah pemilik yang sebenar-benarnya dari PT tersebut;
- Bahwa bisa dikenakan pertanggung jawaban juga meskipun namanya tidak ada didalam akta notaris, sebagaimana pasal 32 ayat 4 UU KUP yaitu orang tersebut mengetahui perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan hukum pajak adalah untuk merecovery penerimaan, dan didalam hukum administrasi ketetapan-ketentuan pidana itu adalah upaya terakhir, karena pada awalnya ada pembinaan, pelayanan, pengawasan lalu administrasi penegakan hukum, setelah itu baru pidana dan dalam penegakan hukum pidana masih ada dua jalan untuk ditempuh, yaitu jika wajib pajak mau membayar pajaknya dan denda 100% maka penyelidikan bukti permulaan akan dihentikan, pada saat wajib pajak tidak membayar dan masuk tahap penyidikan, itu masih diberi kesempatan lagi apabila wajib pajak mau membayar pajaknya dan denda sebesar 300% maka penyidikan dihentikan, bahkan didalam UU perpajakan walaupun sudah dilimpahkan ke penuntutan dan wajib pajak mau membayar masih dimungkinkan juga dengan putusan yang tidak perlu ada pembayaran pajaknya;
- Bahwa unsur itu sifatnya kumulatif, apabila tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan;
- Bahwa tidak dibebankan kepada setiap orang, apabila satu sudah terpenuhi maka bebas semuanya, karena sebenarnya pajak itu tanggung jawabnya tanggung renteng;

2. **Dr. Yunus Husein., S.H., LLM**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah sekitar 20 kali menjadi Ahli dibidang korporasi;
- Bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap". Terdapat persamaan pengertian antara



**Badan dan Korporasi**, sehingga secara umum ketentuan yang berlaku untuk **Korporasi** berlaku juga untuk **Badan**.

- Bahwa kualifikasi badan yang dapat dipidana sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 2021 adalah setiap orang dalam UU KUP adalah sebagai orang pribadi dan korporasi. Jadi sema nomor 4 tahun 2021 ini mengisi kekosongan hukum di UU KUP. Jadi wajib pajak juga termasuk dalam korporasi;
- Bahwa terhadap suatu korporasi dapat dikenakan hukum pidana, karena korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, ada dua hal yaitu pertama apakah perbuatan tersebut perbuatan korporasi atau bukan, lalu apabila korporasi yang berbuat maka korporasilah yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa jika memang ada pembiaran atau mengacu pada pasal 55 yaitu turut serta maka bisa diminta pertanggung jawaban;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah tergantung apakah korporasi yang melakukannya atau bukan, apabila korporasi yang melakukannya maka yang dimintai pertanggung jawabannya adalah korporasi, tetapi bisa juga pengurus diminta pertanggung jawaban misal terkait dengan pasal 55 adanya turut serta atau pembiaran atau menerima sesuatu diluar ketentuan yang ada;
- Bahwa pajak yang sudah dipungut tetapi belum dibayarkan, apabila itu dilakukan oleh direksi dan telah diambil kebijakan dalam rapat direksi, itu perbuatannya termasuk perbuatan korporasi, namun apabila itu dilakukan sendiri bukan perintah atau bukan kebijakan perusahaan, maka dilihat dulu faktanya gimana;
- Bahwa apabila direktur tersebut telah mengambil kebijakan yang menyimpang atau melenceng untuk mengambil keuntungan, maka dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi;
- Bahwa memang direktur keuangan itu adalah orang yang ditunjuk dalam rapat RUPS dan orang yang memanage perusahaan sehari-hari, dalam memanage perusahaan salah satu yang perlu didengar adalah keputusan dalam rapat direksi tadi, apabila dalam keputusan yang diambil dalam rapat direksi tersebut ada salahnya maka itu menjadi perbuatan perusahaan;

Halaman 107 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualifikasinya jika pengurus ada yang menyimpan untuk keperluan pribadi maka pribadi harus bertanggung jawab, namun apabila untuk korporasi maka korporasi yang bertanggung jawab;
- Bahwa jika dalam hal perdata maka direktur bertanggung jawab atas perusahaan, tetapi dalam hal tindak pidana maka individu yang bertanggung jawab sendiri;
- Bahwa individu bisa dikenakan pidana apabila menerima manfaat seperti melakukan penggelapan;
- Bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi maka yang bertanggung jawab adalah korporasi;
- Bahwa jika perbuatan korporasi maka yang bertanggung jawab adalah korporasi;
- Bahwa bentuk pidana korporasinya hanya denda saja;
- Bahwa definisi pengurus adalah beberapa direksi;
- Bahwa harus ada dalam akta karena apabila mengadakan RUPS harus yang ada dalam akta;
- Bahwa Direksi bertugas untuk mengurus perusahaan sehari-hari, jadi tanggung jawab perusahaan adalah direksi, tetapi jika ada tindak pidana maka siapa yang berbuat maka ia yang bertanggung jawab, misal perbuatan menggelapkan uang yang harusnya disetor tetapi tidak disetor, maka ia bisa dimintakan pertanggungjawabannya, namun apabila direksi lain tidak tahu perbuatan tersebut maka tidak dapat dikenakan pidana, jadi jika direksi mengambil keputusan tanpa ada rapat direksi maka yang tanggung jawab individu yang melakukan;
- Bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- Bahwa suatu tindak pidana dalam korporasi yang bertanggung jawab adalah korporasi bukan individu;
- Bahwa dalam tindak pidana terkait pemeriksaan dipersidangan, korporasi, pengurus bisa jadi satu pemeriksaan bisa terjadi sekaligus pengurus dan korporasi;
- Bahwa dalam tindak pidana langsung ke individu yang melakukan, karena kuasa itu masuk ke ranah perdata;
- Bahwa yang mewakili perusahaan itulah yang bertanggung jawab;
- Bahwa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman

Halaman 108 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, Bab II Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi huruf B "**Perbuatan Pengurus Korporasi** yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana : a. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana; b. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi; c. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau d. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang undang".

- Bahwa terkait keputusan jika ada pajak yang sudah dipungut lalu tidak disetorkan namun sebelum pajak tersebut belum disetorkan ada keputusan Antara pengurus bahwa uang ini tidak disetorkan karena akan digunakan untuk pengelolaan korporasinya dan kebijakan itu sejalan dengan kebijakan perusahaan, bagaimana menurut Ahli, menurut Ahli jika itu jelas perbuatan korporasi maka yang dimintai pertanggung jawaban adalah korporasi, sebagaimana peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016 pasal 4;

3. **Dr. Lukman Hakim S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjadi Ahli di bidang perpajakan;
- Bahwa Pidana perpajakan diatur dalam pasal 38, pasal 39 ayat 1 dan pasal 43 UU perpajakan;
- Bahwa Unsur setiap orang yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 UU perpajakan adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diancam pidana sepanjang ada ketentuan pidana yang mengaturnya, dalam lapangan pembuktian hukum pidana administratif maka hakim dapat melihat apakah subjek hukum tersebut bersifat otonom atau tidak otonom, yang Ahli maksud dalam hal administratif dalam perpajakan harus dipisahkan antara subjek hukum yang otonom dan tidak otonom, karena kualitas atau kapasitas seseorang



berdasarkan undang-undang administrative berbeda didalam pidana umum, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU KUP;

- Bahwa sebagaimana kita ketahui, unsur dengan sengaja ada dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP, karena pada dasarnya perbuatan yang menjadi frase selanjutnya, karena ada juga perbuatan pidana perpajakan karena kealpaan, jadi untuk membedakan misalnya pidana penggelapan pajak dengan kealpaan maka di tentukanlah unsur kesengajaan dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP. Kesengajaan sendiri dapat dipahami adalah hendaknya dan mengetahui. Dalam lingkup tugas penuntut umum sebaiknya dapat dipahami atau ditentukan gradasi kesengajaan yang mana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa, karena kesengajaan sendiri dapat dibagi menurut Ahli pidana ada tiga yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian atau keharusan dan kesengajaan dengan kemungkinan. Untuk membuat dakwaan cermat dan tegas meskipun tidak ada kewajiban dalam KUHAP bagi jaksa untuk menentukan kesengajaan yang mana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa, tetapi untuk memudahkan dan dapat dipahami bahwa dakwaan cermat dan tegas dapat dipilih dari ketiga kesengajaan tersebut yang mana yang cocok dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terkait ilustrasi, jadi ada sebuah perusahaan, A sebagai direktur utamanya dan B sebagai direktur operasionalnya, dimana perusahaan ini tidak melakukan penyetoran pajak, oleh pihak perpajakan telah melakukan tahap administrasi dimana melakukan pemanggilan dan klarifikasi, lalu direktur yang mengurus perusahaan tersebut yaitu direktur utama memberikan otorisasi kepada direktur operasional untuk menjalankan perusahaan tersebut baik secara finansial keuangan dan lain-lain, lalu pihak pajak memanggil pihak perusahaan tersebut, kemudian pada tahap administrasi hadir lah oleh direktur utama dan direktur operasional dimana saat tahap administrasi direktur operasional membenarkan bahwa memang belum melakukan penyetoran pajak dan oleh direktur utama juga membenarkan bahwa akan melakukan pembayaran yang dicicil terkait adanya pajak yang tidak disetorkan, namun sebelumnya oleh direktur operasional dan bawahannya branch manager pada tahun 2018 biasa bertemu dengan direktur utama membahas finansial mengenai keuangan perusahaan dimana finansial keuangan ini terkait masalah keuangan, masalah pajak

Halaman 110 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



tetapi tidak secara tegas bahwa ada permasalahan pajak di tahun 2018, akhirnya sampai dengan saat ini tidak dilakukan pembayaran oleh direktur operasional maupun direktur utama dimana berdasarkan akta notaris kedua orang tersebut adalah pengurus perusahaan sebagai direktur utama dan direktur operasional, bagaimana menurut Ahli berdasarkan unsur kesengajaan yang ada didalam pasal 39 ayat 1 UU KUP tersebut. Menurut Ahli bahwa Ahli akan membahas dari perbuatan materil dan aspek formil hukum acara dan dikaitkan dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dalam tindak pidana administratif dalam konteks perpajakan adalah pada dasarnya lebih mudah untuk dibuktikan daripada undang-undang dari pidana umum, karena dalam tindak pidana administratif sifatnya ultimum remedium yaitu upaya pidana adalah upaya terakhir memberikan kepada pelaku atau pembuat tindak pidana sepanjang proses-proses administratif telah dilakukan. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur kesengajaan bahkan seperti Ahli katakan ada pasal mengenai kealpaan didalam UU KUP, menurut Ahli pasal kealpaan ini tidak perlu ada di UU perpajakan karena ada proses-proses administratif, jika proses administratif sudah dilakukan maka kealpaan tersebut sudah hilang, maka sudah diketahui dengan sengaja. Dalam proses-proses ini direktur utama mengetahui, dan menurut Ahli jika suatu tindak pidana administratif ditujukan juga untuk mengamankan suatu perbuatan pidana maka hukum pidana administratif materil tersebut hanya digunakan untuk memberikan makna maksudnya jaksa penuntut dalam konteks undang-undang administratif pada dasarnya tidak perlu membuktikan perbuatan Terdakwa sepanjang proses-proses administratif telah dilakukan oleh pihak pajak, yang menjadi kewajiban untuk membuktikan perbuatannya adalah Terdakwa apakah dia telah melaksanakan kewajiban administratif atau tidak, lalu dalam hukum formil beban pembuktian mempunyai ciri kas dengan pembuktian terbalik, jadi jika proses-proses administratif sudah dilakukan maka jaksa tidak perlu lagi membuktikannya, yang jaksa buktikan adalah apakah proses-proses administratif tersebut sudah dilakukan atau tidak, apakah sudah dimintai keterangan dari pihak pajak setempat maupun keterangan dari penyidik, jika itu sudah dilakukan dan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka beban pembuktian ada pada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mens rea adalah bagian dari kesalahan, kesalahan itu bagian dari pertanggung jawaban pidana, secara praktis mens rea dan kesalahan itu melekat pada seseorang, dalam UU administratif tidak bersifat otonom yaitu yang dimaksud dengan orang yang tidak otonom adalah dia tidak sama dengan orang pelaku tindak pidana pada umumnya karena ada kapasitas atau peranan-peranan tertentu. Didalam proses-proses kaitan dengan tindak pidana pajak bahkan sepengetahuan Ahli ada peraturan menteri keuangan nomor 55 tahun 2016 bahkan ketika penyidik pajak sudah P-21 pada kejaksan dan kejaksan belum melimpahkan berkas masuk pengadilan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk dapat tidak dilanjutkan kembali apabila wajib pajak melaksanakan kewajibannya.
- Bahwa sebuah ilustrasi, jika dalam sebuah perseroan dimana diketahui yang memegang keuangan adalah direktur utamanya, ketika menjalankan perusahaannya yang menjadi tanggung jawab dalam hal perpajakan adalah direktur operasionalnya dimana memang proses penyerahan wewenangnya ini tidak dilakukan hanya secara lisan saja, dan pengetahuan dari direktur utama bahwa perseroan ini sebelumnya ini sudah banyak masalah dalam hal perpajakan, menurut Ahli kewenangan seperti ini bagaimana, Ahli menjelaskan bahwa apakah dengan direktur utama memberikan kewenangan kepada direktur operasional apakah pertanggung jawaban pidana beralih dari direktur utama ke direktur operasional? Pendelegasian wewenang terbagi menjadi dua, tadi disampaikan secara lisan, bahkan secara tulisan saja, misal dirut memberi kuasa ke direktur operasional untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan keuangan pajak, itu tidak cukup untuk menghilangkan pertanggung jawaban pidana dari direktur utamanya, karena didalam dirinya melekat individu yang bukan otonom, kapasitas tertentu dari konsekuensi dari UU administratif ini, demikian juga dalam UU perpajakan pasal 32 atau dalam UU Perseroan terbatas tahun 1997, dikaitkan juga dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016, dikaitkan dengan peraturan jaksa agung nomor 24 tahun 2014, semua itu mengisyaratkan bahwa direktur utama dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ada perbuatan yang diancam yang diharuskan direksi untuk bertanggung jawab;
- Bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam konteks pasal 39 ayat 1 setiap orang yang dimaksud

Halaman 112 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal itu apa, pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 2 pasal 1 angka 3, dst, karena ini berkaitan, disitu dijelaskan orang atau badan hukum. Artinya subjek hukum dapat dikenakan terhadap orang atau badan, karena ini undang-undang administratif maka harus dilihat subjek hukum badan atau orang dalam pasal ini siapa, dan tadi sudah Ahli sampaikan subjek hukum orang dalam hal ini dapat dipidana berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Karena dia bukan lagi otonom, ketika Ahli sebagai wajib pajak perorangan dan tidak punya perusahaan maka treatment dari ancaman pidananya adalah perseorangan, tetapi ketika wajib pajak tersebut adalah direktur yang punya kapasitas dan peranan tertentu, maka ancaman pidananya terkait dia sebagai direktur;

- Bahwa Wakil dalam pasal 43 UU KUP merupakan perwujudan nyata daripada siapa setiap orang dan badan, wakil yang mewakili perusahaan bisa direktur utama dan direktur lainnya sepanjang dia mewakili. Dalam konteks ini menurut Ahli mesti dapat dibuktikan, pendelegasian secara tertulis saja apabila direktur utama memberikan kuasa kepada direktur operasional untuk membayar pajak tetapi pajak tersebut tidak dibayarkan oleh direktur operasionalnya, itu tidak dapat digunakan untuk menghilangkan pertanggung jawaban perbuatan pidananya dari direktur utama, apalagi itu tidak dilakukan secara tertulis hanya secara lisan saja, karena wakil badan itu secara keseluruhan adalah sebagai satu direksi dalam suatu perusahaan;
- Bahwa terkait apakah direksi itu semua yang termasuk dalam akta? Contoh misal didalam akta ada direktur tehnik tetapi direktur itu tidak tahu perbuatan tersebut, apakah direktur tehnik juga dapat dimintai pertanggung jawaban, menurut Ahli Direktur teknik kan dibawah direktur utama, direktur utama kan yang mempunyai wewenang, sehingga dalam konteks ini menurut Ahli direktur teknik tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana karena semua wewenang dan kewajiban pengelolaan perusahaan ada didirektur utama;
- Bahwa Ahli mengatakan yang dimaksud wakil adalah seluruh direksi, jadi apakah direktur tehnik termasuk juga sebagai direksi, menurut Ahli Direktur tehnik bukan sebagai direksi;
- Bahwa yang dimaksud direksi adalah yang paling tinggi kedudukannya dalam perseroan terbatas dalam UU perseroan terbatas adalah direktur utama, karena dia mempunyai kewenangan kewajiban untuk mengelola perusahaan;

Halaman 113 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan direktur operasional, sepanjang dia bekerja sama dan mengetahui pembayaran pajak itu atas perintah direktur utama, dan setiap proses-proses tersebut dilaporkan kepada direktur utama baik diawal maupun diakhir maka dapat dimintai pertanggung jawabannya juga;
- Bahwa terkait jika tidak dilaporkan oleh direktur operasiional kepada direktur utamanya terkait proses-proses tersebut, menurut Ahli sulit juga, karena tidak mungkin direktur utama tidak mengetahui;
- Bahwa seandainya tidak ada laporan sama sekali dan direktur operasional tidak menyampaikannya kepada direktur utamanya, menurut Ahli direktur utama dapat dimintai pertanggung jawaban karena direktur utama mempunyai kewajiban mengelola perusahaan termasuk didalamnya mengenai keuangan;
- Bahwa terkait masalah pertanggung jawaban pidana dikaitkan dengan undang-undang perseoran terbatas, menurut Ahli tidak dapat menjelaskan dalam konteks menjelaskan mengenai undang-undang perseroan terbatas, tetapi Ahli akan menjelaskan menurut hukum pidana secara umum, bahwasanya direktur utama menerima laporan-laporan bahkan direktur utama memerintahkan bawahannya yaitu ke direktur operasional untuk menjalankan perusahaannya;
- Bahwa terkait jika direktur utama dan direktur mempunyai kewenangan yang sama, kemudian direktur dianggap direksi dalam perseroan, anggaran dasar perseroan terbatas juga mengatur bahwa direktur utama dengan direktur dia mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, kemudian jika suatu tindak pidana dilakukan oleh direktur, apakah direktur utama juga kena, menurut Ahli sepanjang perbuatan yang dilakukan secara administratif mewakili perusahaan menurut Ahli direktur utama dapat dikenakan juga;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan administratif itu mengacu kepada perjanjian atau keperdataan, jadi misalnya perbuatan itu dilakukan oleh badan hukum atau tidak berbadan hukum yang itu ada perseroannya berarti organ-organ itu bisa kena semua, menurut Ahli jika didalam ketentuan undang-undang, perseorangan atau korporasi bisa juga perseorangan dan korporasi, dan apakah perbuatan itu masuk ke ranah perdata atau pidana tergantung dari apa perbuatannya, jika dari ranah perjanjian itu keperdata tetapi Ahli tidak menjelaskan ke arah sana, yang Ahli sampaikan adalah satu perbuatan

Halaman 114 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



pidana yang didakwakan kepada direktur operasional kemudian direktur utamanya tidak mau dimintai pertanggung jawabannya, dalam konteks ini menurut Ahli agak sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa selanjutnya tindak pidana yang sifatnya administratif itu hanya suatu tindak pidana perpajakan atau ada tindak pidana lain, contoh : pada kasus ada orang membakar hutan tetapi diketahui dari fakta-fakta yang ada ternyata orang yang membakar itu suruhan pihak lain, yang mana orang yang menyuruh itu lawan perusahaan dan yang orang membakar itu ada berada diperusahaan, apakah perusahaan juga bisa kena karena dia sebagai karyawannya, menurut Ahli dalam hal ini adalah aspek pidana yang lain karena kaitannya dengan tindak pidana umum, maksud Ahli selain undang-undang administratif dari perpajakan ada banyak undang-undang lain;
- Bahwa ada dua azas untuk dapat mempidana seseorang yaitu asas legalitas untuk menentukan kesalahan suatu perbuatan, untuk menentukan orang dapat dipidana adalah azas kesalahan, apa kesalahan itu : dapat dicelanya seseorang manakala dilihat dari sisi masyarakat dia memilih perbuatan yang lain, untuk adanya kesalahan harus ada perbuatan pidana, dalam konteks ini ada pemisahan dalam perkembangannya, ada teori dualistis dan teori monistis, dan teori monistis ada dalam kuhp yang akan ditinggalkan, dan beberapa hakim agung ada yang sudah menggunakan teori dualistis dalam putusannya. Teori monistis adalah menggabungkan perbuatan pidana dengan kesalahan. Sedangkan teori dualistis memisahkan perbuatan pidana dengan kesalahan. Hal ini lebih ditujukan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan dipengadilan, jadi apabila perbuatan pidananya itu ada maka dilihat dulu apakah ada orang yang mampu bertanggung jawab atau tidak, apabila tidak mampu bertanggung jawab maka tidak dapat dipidana;
- Bahwa Korporasi itu bukan orangnya, namun korporasi bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari pengurus atau direksi dalam hal ini direktur utama, sepanjang perbuatan yang dilakukan secara legal, maka tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana, namun apabila pengurus atau direksi melakukan tindakan-tindakan atau melanggar ketentuan peraturan undang-undangan maka korporasinya dapat dikenai pertanggung jawaban pidananya karena keuntungannya didapatkan dari perbuatan direksinya tadi;

Halaman 115 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusnya sendiri, apakah dapat dimintai pertanggung jawaban sedangkan yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku atas nama korporasi, menurut Ahli intinya pada dasarnya pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi ada dua, yaitu bersifat alternatif yaitu pengurus atau korporasi dan bersifat kumulatif yaitu pengurus dan korporasi. Dalam yurisprudensi mahkamah agung dua-duanya baik alternatif maupun kumulatif sudah diputus oleh mahkamah agung artinya tergantung kepada dakwaan jaksa penuntut umum, sepanjang itu bisa dibuktikan keuntungan dibawa oleh korporasi yang diperoleh oleh pengurus meskipun korporasi tidak tahu menahu, pengurus ini mens rea nya sudah ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan Terdakwa PT. GANSA FURINDO yang diwakili sdr. YOHANES SUSETYO MUHANDOKO selaku Direktur Utama yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan Yohanes di PT. Gansa Furindo dalam Akta pendirian sebagai Direktur Utama sebelum adanya permasalahan yang berkaitan dengan Direktur Utama;
- Bahwa pada tahun 2015 Yohanes secara struktur organisasi telah menyerahkan kewenangan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa pelimpahan kewenangan tersebut ada didalam struktur organisasi;
- Bahwa saat dipenyidikan sudah Yohanes serahkan struktur organisasinya;
- Bahwa Yohanes menyerahkan semua kewenangan Yohanes tanpa adanya akta notaris;
- Bahwa Yohanes melimpahkan kewenangan tanpa akta notaris karena Yohanes orang awam dan tidak mengerti;
- Bahwa Yohanes pernah mempunyai perusahaan dan mengerti kapasitas direktur utama itu untuk menjalankan suatu perusahaan, namun Yohanes tidak tahu tupoksi Yohanes sebagai Direktur Utama, karena yang menjalankan perusahaan saksi Akhmad Indra Wirawan, semua Yohanes serahkan ke saksi Akhmad Indra Wirawan, info keuangan sampai perpajakan itu saksi Akhmad Indra Wirawan yang melaksanakannya;
- Bahwa tupoksi Yohanes sebagai Direktur Utama semua yang ada di perusahaan tersebut tanggung jawab Yohanes, akan tetapi karena

Halaman 116 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes jarang ada dikantor karena kesibukan Yohanes, maka Yohanes melimpahkan kewenangan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan saat itu dibuat struktur organisasi oleh pak Didi dan dibuat di rumah Yohanes;

- Bahwa pada tahun 2017 Yohanes masih sebagai Direktur Utama;
- Bahwa ada saham saksi Akhmad Indra Wirawan sebesar 21%;
- Bahwa semua modal dari Yohanes, karena Yohanes hutang di Bank, jadi nanti ketika semua hutang lunas maka sahamnya saksi Akhmad Indra Wirawan sebesar itu 21%;
- Bahwa Yohanes tidak paham ketika Yohanes diangkat sebagai Direktur Utama PT. Gansa Furindo, dan ketika Yohanes mengikatkan diri sebagai direktur utama dan ada kewajiban-kewajiban hukum Yohanes tidak paham meskipun Yohanes sudah mengikatkan diri secara hukum;
- Bahwa menurut Yohanes tidak secara lisan, karena saat itu Yohanes disodorkan oleh saksi Akhmad Indra Wirawan dan pak Didi struktur organisasi;
- Bahwa Yohanes masuk ke struktur organisasi dijadikan sebagai komisariss;
- Bahwa yang Yohanes maksud itu adalah bagan organisasi;
- Bahwa sebagaimana Yohanes sampaikan bahwa Yohanes tidak mengerti sebagai direktur utama dan Yohanes menyerahkan kewenangan Yohanes kepada saksi Akhmad Indra Wirawan berdasarkan bagan organisasi, namun Yohanes tidak tahu cara Yohanes mempertanggung jawabkan sebagai direktur utama yang terikat secara hukum karena Yohanes orang awam sehingga keluar masuk cash flow uang yang ngatur saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa Yohanes sampaikan seperti itu ke saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa hanya mengenai cashflow, uang masuk, Yohanes minta laporan keuangan tetapi Yohanes hanya diberikan satu kali saja;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban teknis tidak pernah Yohanes sampaikan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan karena Yohanes orang awam jadi Yohanes tidak paham apa saja tanggung jawab dari Direktur Utama;
- Bahwa kewajiban sebagai wajib pajak Yohanes sudah sampaikan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan yaitu pada saat Yohanes dipanggil saksi Agus Dirtjen Pajak;
- Bahwa saat itu Yohanes disuruh membuat cashflow lalu Yohanes diminta kesanggupannya, lalu Yohanes sanggup Rp.150.000.000,00 (seratus

Halaman 117 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi Akhmad Indra Wirawan dan saksi Wongso membayar itu;

- Bahwa saat itu saksi Akhmad Indra Wirawan memanggil Yohanes dan mengajak Yohanes untuk ketemu oleh saksi Agus, lalu Yohanes tanya siapa saksi Agus, lalu dijawab oleh saksi Akhmad Indra Wirawan, saksi Agus orang pajak;
- Bahwa awalnya memang cashflow Yohanes yang menandatangani, tetapi karena Yohanes jarang ke kantor karena sering keluar maka saksi Akhmad Indra Wirawan meminta agar saksi Akhmad Indra Wirawan yang menjadi Direktur Utama;
- Bahwa semua keputusan saksi Akhmad Indra Wirawan tanpa sepengetahuan Yohanes, yang Yohanes maksud de facto dalam BAP point 8 yaitu pada saat diawal saja;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah dibuat akta perubahan, saat itu Yohanes sebagai komisaris;
- Bahwa pada saat pertama kali tahun 2014 saksi Wongso selalu bawa invoice untuk minta Yohanes menandatangani cek, lalu karena Yohanes jarang ada, khawatir ada permasalahan dalam pembayaran, maka saksi Akhmad Indra Wirawan pada malam hari bawa struktur organisasi untuk melakukan perubahan struktur pengurusan;
- Bahwa saksi Akhmad Indra Wirawan datang melapor ke Yohanes satu kali pada tahun 2014 saja;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Akhmad Indra Wirawan melaporkan dan saat itu saksi Akhmad Indra Wirawan mengatakan butuh uang untuk perusahaan lalu Yohanes memberikan uang ke saksi Akhmad Indra Wirawan, jadi memang saksi Akhmad Indra Wirawan melapor ke Yohanes ketika saksi Akhmad Indra Wirawan butuh uang saja;
- Bahwa sebelum Yohanes dipanggil saksi Agus, Yohanes tidak pernah menanyakan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan terkait pajak, karena Yohanes hanya menanyakan masalah keuangan global saja;
- Bahwa Yohanes tidak pernah menanyakan terkait memperdulikan mengenai tanggung jawab Yohanes terkait wajib pajak kepada saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa Yohanes secara sadar memberikan delegasi kewenangan direktur utama kepada saksi Akhmad Indra Wirawan dan untuk mengambil kebijakan dan keputusan oleh saksi Akhmad Indra Wirawan;

Halaman 118 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yohanes diajak oleh saksi Akhmad Indra Wirawan untuk menghadap ke kantor pajak, tanggapan Yohanes saat itu saat itu saksi Agus meminta agar Yohanes mencicil untuk pembayaran pajaknya, saat itu Yohanes ditanya kemampuannya berapa, lalu terjadi kesepakatan yaitu Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa batas waktunya sampai lunas;
- Bahwa Yohanes tahu ada permasalahan perpajakan setelah Yohanes dipanggil oleh saksi Agus, Yohanes sempat kaget lalu Yohanes mengatakan ke saksi Akhmad Indra Wirawan agar segera dibayar;
- Bahwa Yohanes tidak pernah menanyakan selama ini kepada saksi Akhmad Indra Wirawan mengenai pajak tidak pernah dibayar karena Yohanes percaya saja dengan saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa terkait BAP point 14, tidak benar tahun 2018, namun maksud Yohanes itu tahun 2019;
- Bahwa Yohanes tidak mengetahui seluruhnya hutang pajak terhutang;
- Bahwa pada saat Yohanes diminta oleh saksi Akhmad Indra Wirawan untuk hadir, saksi Akhmad Indra Wirawan hanya mengatakan “ayo ke kantor pajak” lalu Yohanes tanya ada apa? lalu dijawab ada masalah pajak;
- Bahwa Yohanes tidak tahu jika permasalahan pajak tidak Yohanes selesaikan, maka efeknya ke perusahaan seperti apa;
- Bahwa waktu itu saksi Akhmad Indra Wirawan pada tahun 2019 melapor ke Yohanes dan mengatakan tidak bisa menyelesaikan masalah ini, lalu Yohanes berencana untuk menjual perusahaan, dan saat itu ada investor yang mau membeli perusahaan dan sudah memberikan cek, tetapi ternyata cek tersebut cek kosong;
- Bahwa terkait uang yang tidak dibayarkan untuk pajak digunakan untuk apa awalnya Yohanes tidak tahu, tetapi setelah dipanggil pak agus Yohanes diberitahu bahwa uang tersebut digunakan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa Yohanes tidak pernah menerima laporan keuangan;
- Bahwa setelah kasus ini Yohanes tahu konsekuensi dari pajak tidak dibayar;
- Bahwa terkait pengambilalihan PT. Gansa Furindo, Yohanes membeli dari Mr Cang, sepengetahuan Yohanes pada saat itu kondisi PT. Gansa Furindo sales nya rendah, hanya 2,3 milyar tetapi Yohanes diberitahu

Halaman 119 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dibulan ketujuh sales akan naik ke 6-7 milyar, makanya Yohanes setuju;

- Bahwa saksi Jaumi Wongso dari Mr. Cang sampai saat ini jabatannya direktur keuangan;
- Bahwa setiap PT. Gansa Furindo melakukan transaksi semua atas nama perusahaan;
- Bahwa terkait pungutan pajak PPN atas nama Perusahaan PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Yohanes sebagai Direktur Utama dari awal berdiri PT. Gansa Furindo sampai tahun 2019, selama kurun waktu itu pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 tidak pernah Yohanes sebagai Direktur Utama menerima laporan dari saksi Jaumi Wongso atau saksi Akhmad Indra Wirawan mengenai ada tidak disetorkannya PPN 10% dari nilai transaksi yang dipungut;
- Bahwa Yohanes tidak setiap hari berada di PT. Gansa Furindo dan mempercayakan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa benar karena adanya struktur atau bagan organisasi tersebut sehingga Yohanes percayakan kepada saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa Yohanes sebagai Direktur Utama dari tahun 2018 terhadap pajak yang tidak disetor, Yohanes mengetahuinya setelah Yohanes dipanggil saksi Agus (kepala kantor pajak);
- Bahwa terkait selama Yohanes tidak mengetahui hal tersebut, apakah Yohanes tahu pajak yang tidak disetorkan oleh perusahaan itu dikemana uangnya, sementara tadi Yohannes katakan bahwa Yohanes sering memberikan uang ketika perusahaan kesulitan keuangan, padahal pajak yang tidak disetorkan itu nilainya juga besar, Itulah kesalahan Yohanes;
- Bahwa PT. Gansa Furindo kekurangan uang terus sejak tahun 2016 PT. Gansa Furindo sudah mulai kekurangan uang terus;
- Bahwa pada saat saksi Akhmad Indra Wirawan atau saksi Jaumi Wongso meminta uang kepada Yohanes terkait kesulitan keuangan perusahaan, saat itu dikatakan oleh saksi Akhmad Indra Wirawan ataupun saksi Jaumi Wongso kepada Yohanes hanya mengatakan ada kekurangan uang diperusahaan tanpa diberikan laporan keuangan kepada Yohanes;
- Bahwa proses waktu dipenyidik, setelah diketahui ada tunggakan dan Yohanes dipanggil dan diperiksa, saat itu Yohanes ditanya apakah

Halaman 120 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes tahu berapa pajak yang belum dibayar, lalu Yohanes jawab tidak tahu;

- Bahwa Yohanes tidak setiap bulan dikasih uang, kadang-kadang Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) kadang-kadang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa semua sudah diapraisall oleh Bank, karena Yohanes punya hutang dibank sebesar Rp.50 milyar dan kondisinya macet, semua surat-surat ada di Bank;
- Bahwa terkait nama-nama perusahaan yang sudah Yohanes pungut pajaknya, mengenai apa-apa saja nama perusahaannya Yohanes baru tahu setelah tahun 2019;
- Bahwa nilai pajak yang tidak disetorkan Yohanes baru tahu dari Pak Doni, awalnya 4,6 milyar lalu setelah ada pembayaran menjadi 2,6 milyar yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Lien Marlina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PT. Gansa Furindo karena Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo sejak tanggal 10 September 1995;
- Bahwa saat itu pemilik PT. Gansa Furindo Mr. Chang;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Purchasing dan Marketing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya PT. Gansa Furindo bergerak dibidang furniture, lalu ketika furniture kurang baik kemudian beralih ke jasa pengecatan;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Gansa Furindo sebagai marketing adalah menawarkan kepada customer, lalu Saksi juga berkunjung ke customer, sedangkan tugas Saksi untuk bagian purchasing yaitu Saksi membuatkan PO dan membeli barang-barang yang mau diproduksi, kadang Saksi suka bantu nagih ke calon cutomer apabila ada yang belum bayar;
- Bahwa saat PT. Gansa Furindo dipegang oleh Mr. Cang, gaji yang Saksi terima penuh, namun setelah PT. Gansa Furindo diambil alih oleh saksi Yohanes gaji yang Saksi terima sering terlambat dan sering dicicil;

Halaman 121 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Saksi sering telat dan dicicil sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi kondisi perusahaan kurang baik;
- Bahwa pada tahun pertama dan kedua pembayaran lancar tetapi semakin kesini sering nunggak;
- Bahwa ada beberapa customer yang tidak lancar pembayarannya, tetapi kadang ada yang Saksi tagih ke customer sebelum jatuh tempo pembayaran, alasan Saksi untuk membayar gaji karyawan di PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pembayaran itu sudah termasuk dengan PPn;
- Bahwa uang PPn itu memang digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan, karena kadang supplier minta pembayarannya cash dan langsung, sehingga untuk membayar supplier tersebut jadi Saksi harus meminta uang ke customer untuk beli barang lagi, sehingga untuk pembayaran yang lain jd terkendala dan gaji dicicil;
- Bahwa sebenarnya saksi Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes adalah orang baik, perbandingan dengan bos yang lama yaitu secara financial Mr. Cang memang ada, jadi ketika PT. Gansa Furindo omsetnya lagi menurun, maka Mr. Chang bisa menanggulangnya dengan menggunakan uang pribadinya untuk membayar gaji karyawan dan lain-lain, sedangkan pada masa saksi Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes, PT. Gansa Furindo dibeli dengan menggunakan uang bank, sehingga biaya produksi dan lain-lain kekurangan karena harus ada pembayaran ke bank;
- Bahwa setahu Saksi, uang yang diterima dari customer itu tidak dipergunakan untuk pribadi saksi Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi bekerja ketika kepemilikan PT. Gansa Furindo beralih ke saksi Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bagian Saksi saat itu purchasing dan marketing;
- Bahwa proses jasa yang ditawarkan PT. Gansa Furindo, kadang ada permintaan dari customer, tetapi tidak semuanya ke PT. Gansa Furindo;
- Bahwa dalam waktu satu bulan ada sekitar 6 customer setiap satu bulan;
- Bahwa untuk barangnya, biasanya sehari ada 200 barang;

Halaman 122 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu cash flow perusahaan tidak bagus karena pada kepemilikan yang sekarang kurang modal karena PT. Gansa Furindo dibeli dari uang bank, sehingga pemasukan dari marketing digunakan untuk membayar tagihan bank juga;
- Bahwa pada awal tahun pertama dan kedua kepemilikan saksi Yohanes pendapatan perusahaan masih sama, tetapi semakin kesini semakin berkurang;
- Bahwa saksi Akhmad Indra Wirawan dan sdr. Yohanes sampai dengan meja persidangan setahu Saksi karena perkara pajak, perusahaan tidak membayar pajak;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan tersebut untuk memutuskan membayar pajak setahu Saksi, sdr. Yohanes dan saksi Akhmad Indra Wirawan;
- Bahwa uang yang masuk dari customer digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, Saksi tahu karena kadang-kadang Saksi dimintai bantuan oleh bagian keuangan untuk menagih ke customer, lalu Saksi nagih ke customer lalu setelah Saksi kasih bon, customer mentransfer pembayaran ke rekening perusahaan, kemudian karena ada supplier yang harus dibayar, maka uang yagn dari customer tersebut digunakan untuk membayar supplier yang menagih;
- Bahwa uang yang diterima dari customer tersebut untuk membayar supplier, Saksi tahu dari bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini saksi Akhmad Indra Wirawan didakwa perkara pajak yang tidak disetorkan, Saksi tahu kejadian ini sejak Saksi mulai dirumah sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa setiap transaksi perusahaan atas nama perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi masih bekerja di PT. Gansa Furindo, posisi saksi Akhmad Indra Wirawan sebagai Direktur Operasional, sedangkan sdr. Yohanes sebagai Direktur Utama;
- Bahwa selama Saksi sebagai marketing di PT. Gansa Furindo, Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat pengurus untuk mengambil keputusan masalah pajak;
- Bahwa sdr. Yohanes jarang datang ke PT. Gansa Furindo;
- Bahwa ketika sdr. Yohanes datang ke PT. Gansa Furindo, Saksi hanya mengobrol biasa saja dengan sdr. Yohanes;
- Bahwa nilai pajak yang tidak disetorkan oleh PT. Gansa Furindo Saksi tidak tahu;

Halaman 123 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak yang tidak disetorkan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang sudah dikembalikan atau belum pajak tersebut Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nugrahadhi Djazaul Mukhsinin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PT. Gansa Furindo karena Saksi bekerja di PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT. Gansa Furindo sejak bulan April 2019 dan Saksi sebagai komite untuk membantu komisaris maupun pemegang saham dalam rangka memaping permasalahan;
- Bahwa Saksi dua minggu sekali mengadakan kunjungan ke PT. Gansa Furindo;
- Bahwa pada saat itu dikemukakan kondisi-kondisi yang agak berat di PT. Gansa Furindo, ada permintaan untuk memaping kondisi perusahaan, baik dari segi produksi, pemasaran, keuangan, pemasaran dan sdm, termasuk intruksi dari ownernya untuk menyelesaikan tunggakan pajak;
- Bahwa setelah Saksi menjadi komite lalu Saksi diangkat sebagai Direktur Utama, pada bulan Desember 2019;
- Bahwa tanggung jawab dan wewenang Saksi saat menjadi Direktur Utama intinya mengelola perusahaan agar tercapai apa yang dicitakan pemegang saham dan komisaris dalam hal ini adanya profit dan perusahaan dapat berjalan;
- Bahwa pada saat itu saat Saksi jadi komite, ada beberapa hal yang harus dilakukan efisiensi, kebetulan prosesing tidak bisa seketika dilakukan, lalu saat bulan Desember 2019 saat Saksi menjadi Direktur maka ini modal Saksi untuk melakukan aktifitas pembenahan hasil maping secara keseluruhan, jadi ini merupakan program lanjutan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 PSBB mulai berlaku sehingga truk tidak bisa masuk sehingga delivery tidak bisa lancar, kemudian ada aturan-aturan yang membuat perusahaan mengurangi aktifitas dan customer mengurangi order juga;
- Bahwa saat itu sdr. Yohanes sebagai komisaris dan pemegang saham;

Halaman 124 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama, Saksi melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan, awalnya Saksi minta laporan perbulan, kemudian Saksi minta laporan tahunan dibulan maret, didalam laporan bulanan sebagai Analisa kami melihat apakah Perusahaan ini dapat dijalankan atau tidak terkait adanya biaya-biaya yang timbul maupun pendapat yang masuk, dan disamping itu Saksi juga melakukan secara mingguan untuk memplaning cashflow atas dasar invoice dari customer, jadi kita dapat melihat skala prioritas, uang yang masuk dari customer akan digunakan untuk membayar apa dulu termasuk pembayaran pajak;
- Bahwa setelah tahun 2019 sejak Saksi pegang, pembayaran pajak normal semua;
- Bahwa Saksi tahu ada penggelapan pajak tahun 2018;
- Bahwa tahun 2018 Saksi belum masuk ke PT. Gansa Furindo;
- Bahwa Saksi selalu menyetorkan PPN yang dipungut dari customer;
- Bahwa struktur organisasi PT. Gansa Furindo tahun 2018 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat di dalam Akta bahwa sdr. Yohanes sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi memiliki tupoksi dan wewenang pada intinya mengelola perusahaan, namun tidak termasuk mengambil kebijakan arah perusahaan, karena untuk ambil keputusan Saksi selalu komunikasikan dengan komisaris;
- Bahwa saat Saksi sebagai Direktur Utama dan mengatur cash flow perusahaan, menurut Saksi dengan adanya pandemi customer mengurangi order sehingga Perusahaan mengalami penurunan income, meskipun sudah diatur untuk mengurangi efisiensi tetapi tetap kondisi perusahaan semakin menurun;
- Bahwa saat Saksi masuk menjadi komite dan direktur utama, jika melihat cash flow perusahaan maka dapat dilihat bahwa pendapatan menurun dan Saksi mengatur agar siapa yang menjadi prioritas pembayaran, dan saat itu operasional perusahaan masih berjalan, dan masih ada transaksi dengan perusahaan yang lain;
- Bahwa saat Saksi menjabat, Saksi mengetahui kondisi sebelumnya, pejabat sebelumnya, jadi ketika Saksi menjabat Saksi mengetahui kejadian ditahun 2018, namun Saksi tidak melihat secara detail, yang

Halaman 125 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dilaporkan ada pajak yang belum disetorkan ke negara dan Saksi ditunjuk untuk mencari solusi terhadap pembayaran tersebut;

- Bahwa selama Saksi menjabat, ada pajak yang sudah dibayar untuk tahun 2019 pajak sudah dibayar;
- Bahwa terkait laporan adanya uang pajak dialihkan untuk perusahaan, Saksi hanya melihat laporan tahunan dan masih ada tagihan tetapi tidak secara detail;
- Bahwa secara formil Saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama tetapi faktanya Saksi sudah berhenti menjabat sebagai Direktur Utama karena perusahaan juga berhenti karena pandemi, semua karyawan dirumahkan;
- Bahwa terkait dengan masalah pajak yang tahun 2018, memang belum selesai sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait tunggakan pajak PT. Gansa Furindo tahun 2018, Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi walaupun perusahaan berhenti beroperasi tetapi para pemegang saham dan komisaris sedang berusaha mencari investor untuk Kerjasama, dan Saksi bantu dalam hal data-data dan analisa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Daniel Benyamin De Poere, SE, M.Ak, Ak, CA, CPA, BKP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli selama ini berkecimpung dibidang perpajakan khususnya mulai tahun 2005, 2006 dan hari ini Ahli membuat kantor konsultan pajak dengan ijin pribadi, bisa dipakai untuk pajak international, selain berpraktek sebagai konsultan pajak, Ahli juga sebagai instruktur diberbagai tempat kursus privat dan selama 20 tahun Ahli mengabdikan sebagai Dosen;
- Bahwa Pajak keluaran terkait dengan suatu entitas apabila entitas yang bersangkutan peredaran usahanya jasa maupun produksi barang melampaui 4,8 milyar maka secara self adjustment wajib pajak yang bersangkutan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan konsekuensi setiap transaksi wajib pajak yang bersangkutan punya

Halaman 126 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



kewajiban untuk memungut PPN yang istilahnya disebut pajak pengeluaran, dan nilainya 10 persen dari omset.

- Bahwa Pajak masukan karena wajib pajak yang sudah berstatus PKP maka ketika wajib pajak yang PKP memperoleh barang atau jasa yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis utamanya, maka dituntut pajak pada saat perolehan, dan pajak tersebut disebut pajak masukan dan setiap bulan bulan pelaporannya masa di kreditkan, jadi pajak keluaran dikurangi pajak masukan;
- Bahwa boleh dikategorikan bahwa Pajak Masukan yang sudah dibayar oleh pengusaha saat membeli barang, adalah merupakan pajak biaya yang sudah disetorkan ke Negara saat awal transaksi;
- Bahwa masa untuk pelaporan PPN dari satu PKP melekat pajak pengeluaran, jadi berapa pajak pengeluaran pada satu masa tersebut dikurangi pajak masukan, dan jika ada selisih misal pajak keluarannya lebih besar maka selisih itu yang disetor ke Negara, apabila PK nya yang lebih besar bisa dilakukan permohonan restitusi selama satu tahun jika ada Pajak Masukannya lebih besar;
- Bahwa SP2DK itu levelnya suatu penelitian yang bisa dilakukan pihak DJP melalui KPP, atas permintaan data komplit untuk dikonfirmasi, SP2DK sendiri nantinya tidak ada produk hukum yang terbit, namun apabila dari pihak KPP apabila SP2DK perlu ditindak lanjuti maka bisa dirubah menjadi SP2 pemeriksaan biasa, yang hasilnya SP2 itu produk hukumnya yaitu surat ketetapan pajak;
- Bahwa selama Ahli menjalankan ini menurut Ahli untuk ke ranah pidana masih jauh, karena setiap persoalan perpajakan harus berujung pidana maka akan banyak sekali yang masuk penjara, karena diindonesia sendiri belum bisa membudaya;
- Bahwa untuk pemeriksaan SP2 itu untuk satu tahun buku, untuk januari sampai dengan Desember, dan jika akhirnya diindikasikan si pemeriksa itu ada pidana, maka memang bisa dikeluarkan bukper, jadi SP2 di tutup / disumir dulu lalu dibuka SP2 bukper, yang mana bukper itu diterbitkan apabila pemeriksa pajak ada indikasi pidana dibidang perpajakan. Dalam kasus ini (PT. Gansa Furindo) agak ada keanehan karena terbit SKP, lalu Februari sampai Juli di bukper, lalu di Desember bukper juga, lalu periode Agustus sudah dibayar, yang Ahli sampaikan apabila Ahli berkomunikasi dengan pemeriksa pajak, yaitu pemeriksaan pajak saat ini bukan bertujuan untuk menagih pajak, tetapi untuk

Halaman 127 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



membuktikan kepatuhan wajib pajak. Pada umumnya wajib pajak itu banyak yang tidak tahu, wajib pajak nakal, maka melalui pemeriksaan pajak diharapkan ada edukasi dari pihak DJP dan pihak KPP ke wajib pajak untuk diberitahu solusinya, tidak semua berujung ke bukper atau pengadilan karena perlu dipahami juga bahwa pajak ini hubungan wajib pajak dengan pemerintah adalah perdata; apabila ada masalah dalam hal keperdataan ini, misal disinyalir atau diduga ada tindak pidana, maka di bicarakan lewat pemeriksaan dimana kesanggupan wajib pajak, apakah wajib sanggup bayar. Masalah ketidakmampuan membayar, undang-undang perpajakan mengatur wajib pajak bisa menyampaikan permohonan cicilan, jadi menurut Ahli masalah perpajakan itu selesai dilevel pemeriksaan dan disepakati oleh wajib pajak dengan pemeriksa;

- Bahwa menurut Ahli ini adalah satu hal yang tidak semestinya, karena pajak itu sifatnya perdata maka apabila satu pihak sudah melakukan janji untuk melakukan pembayaran, semestinya kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan DJP dalam hal ini KPP saling pengertian, biasanya wajib pajak disuruh membuat surat pernyataan bahkan yang sering terjadi adanya suatu jaminan misalnya BPKP kendaraan, jaminan bahwa wajib pajak akan memenuhi janjinya. Jadi fungsi pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatutan selain ada juga fungsi edukasi;
- Bahwa PPN itu sifatnya perkreditan, PPN merupakan pajak tidak langsung, satu pihak dipungut lalu PKP yang bersangkutan juga dipungut, lalu ujung-ujungnya konsumen akhir yang menanggung pajaknya, jika kita kejar satu PKP maka PPN nya itu adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan, jadi harus diperhitungkan, baru bisa dinilai potensi kerugiannya;
- Bahwa Saksi telah membuat rekapan dari materi yang Ahli terima, dan dari dakwaan yang didakwa kepada saksi Yohanes kerugian Negara adalah Rp.2.639.670.584,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan jumlah itu diambil dari pajak keluaran saja, padahal yang Ahli ketahui ada pajak masukan, dan Ahli mencoba mensandingkan pajak keluaran dan pajak masukan, jadi dari perhitungan Ahli semestinya kerugian Negara adalah Rp.1.811.462.099,00. (satu milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang wakil tidak bisa mengearisil semua yang ada dalam daftar itu terlibat, kita harus perlu pembuktian lebih jauh, jadi yang bersangkutan benar-benar terlibat harus dibuktikan, misal yang bersangkutan ada satu saran dalam suatu meeting, maka harus dibuktikan dengan adanya notulen rapat. Intinya harus dibuktikan dan tidak serta merta yang ada diakta perusahaan bertanggung jawab atas tindak pidana;
- Bahwa wakil adalah personal yang melakukan dan harus dibuktikan, jadi yang tidak terlibat dan tidak mengetahui tidak ikut terlibat;
- Bahwa terkait pengertian pajak keluaran dan pajak masukan itu diatur dalam undang-undang PPn, objek PPn diatur didalam pasal 4, 16c dan 16d;
- Bahwa pengertian pajak keluaran dan pajak masukan itu satu istilah umum, biasanya diaturan pelaksanaan, PP nomor 1 tahun 2012 tentang pajak pertambahan nilai, dan itu yang sampai saat ini masih digunakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu tindak pidana tahun 2018 masa februari sampai juli, lalu desember;
- Bahwa mengenai peraturan pajak masukan dan pajak keluaran, itu prinsip dasar dari pajak pertambahan nilai;
- Bahwa menurut Ahli itu ada diatur didalam peraturan undang-undang dan untuk sengketa pertambahan nilai dasar hokum yang digunakan adalah PP nomor 1 tahun 2012;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan pasal 9 ayat 8 huruf I UU nomor 8 1983, terkait pajak masukan yang tidak dilaporkan maka pajak masukan tersebut tidak dihitung, sebagaimana dalam dakwaan kami, terkait tindak pidana, tadi Ahli sudah menjelaskan, SP2DK lalu SP2 kemudian disinyalir ada tindak pidana maka bisa beralih ke SP2 bukper, apakah Ahli mengetahui fakta-fakta terkait perkara ini. Menurut Ahli terkait siapa yang mempunyai kewenangan untuk menaikan perkara untuk menjadi bukper, Ahli tidak tahu, yang bisa menjawab langsung adalah pihak DJP, tetapi dari pengalaman Ahli selama ini, untuk sampai di bukper itu perlu betul betul pertimbangan yang benar-benar istilahnya senjatanya DJP yaitu bukper, sehingga wajib pajak itu bisa atau punya rasa takut dan siap untuk membayar;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai pajak tahun 2019 oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo;

Halaman 129 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penuntut umum menjelaskan dari keterangan saksi Yohanes, bahwa tahun 2019 terjadi permasalahan lagi sehingga pajaknya diblokir oleh pihak perpajakan, sehingga dibulan September saksi Yohanes meminjam uang sebesar Rp.2.1milyar, sehingga pertanyaan Ahli tadi mengapa masih tahap penyicilan kemudian tiba-tiba perkaranya ditingkatkan lagi, padahal tahun 2019 ada masalah lagi, menurut Ahli terkait bagaimana ketika ditahun 2018 ditingkatkan menjadi bukper karena ada permasalahan di tahun 2019 jadi urutan waktu tahun 2018 itu pemeriksaannya ditahun 2019, tadi disampaikan itu adalah berkaitan dengan 2018;
- Bahwa menurut Ahli itu tidak bisa menaikkan seseorang menjadi terpidana kasus perpajakan tidak bisa seperti itu, karena pajak begini, tahun 2017 diperiksa, siapa tim pemeriksa lalu tahun 2018 diperiksa siapa tim pemeriksanya, istilanya begini tidak boleh ada dendam karena tidak setor maka akan dikejar terus, jadi tidak boleh mengeneralisasi, itu harus perlu pembuktian, dan Ahli ingin menyampaikan, ketentuan pajak masukan tidak boleh dikreditkan apabila belum dilaporkan, itu aturan ideal biar wajib pajak mengerti resikonya, tetapi dalam pembuktian untuk keadilan, dalam hukum ada istilah substansi mengungguli bukti, memang dalam hal ini butuh kebijaksanaan dari pihak pemeriksa, pihak KPP, jadi kalo mau gagah-gagahan wajib pajak pasti kalah, tetapi kita harus tahu posisi keadilan, sehingga wajib pajak juga perlu keadilan, sehingga tidak bisa seperti itu;
- Bahwa menurut Ahli dalam menegakan hukum pajak kita harus berjalan sesuai aturan atau rasa pribadi seseorang, karena jika kita bicara aturan itu adalah keadilan yang sudah dikristalisasi, dan itu harus ditegakkan, jadi bagaimana persepsi Ahli terhadap hal itu, menurut Ahli ini adalah pertanyaan klasik, jadi dalam praktek pemeriksaan pajak sampai level pemeriksaan pajak kemudian timbul keberatan, lalu wajib pajak berhak untuk banding, sampai dengan dua level ini yang jalan adalah aturan, dan Ahli sepakat, tetapi nanti wajib pajak punya hak lagi, yaitu pengadilan pajak, dan di pengadilan pajak itu pertimbangannya itu ke keadilan;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa undang-undang pajak itu intinya kepatuhan dan bukan untuk dibayar, jadi apakah menurut Ahli sebenarnya dalam undang-undang pajak itu yang dikejar itu bukan kitab undang-undang pajaknya untuk memberi efek agar orang takut,

Halaman 130 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



menurut Ahli tidak, itu harus seimbang antara wewenang pemerintah untuk memaksakan ke wajib pajak untuk dibayar;

- Bahwa menurut Ahli terkait proses-proses yang sudah dilewati, sampai tahap penyidikan pun jika ada pembayaran wajib pajak maka penyidikan bisa dihentikan, itu benar, memang ada ketentuannya, ada level-levelnya dan ada sanksinya;
- Bahwa jadi memang ada celah apabila dilunasi oleh wajib pajak, maka penyidikan bisa dihentikan, namun jika perkara sudah sampai tahap persidangan, berarti sudah berkurang niat baik atau itikad baik dari wajib pajak yang sudah diberi keluasaan dari undang-undang, menurut Ahli, tidak bisa menyatakan seperti itu karena tadi ada fakta-fakta dari tim pembela, bahwa urutan waktunya wajib pajak ini setelah SP2DK wajib pajak ini bersedia untuk menyelesaikan persoalan ini pembayaran lewat menyicil, dan ini satu itikad baik dan harusnya direspon positif oleh KPP, bukan malah satu KPP menerapkan satu sanksi untuk menggiring ke sanksi yang besar. Mungkin bisa dilihat trend pemeriksaan pajak itu diakhiri di bulan-bulan nopember dan desember, karena harapan-harapan pemenuhan target dari satu KPP, dan penerapannya bisa beda-beda antara satu KPP dan KPP lainnya;
- Bahwa secara prinsip pengaturan dalam perundang-undangnya tidak ada, jadi semua kembali dalam kewenangannya, bagaimana mereka menilai dan mereka mempunyai pertimbangan;
- Bahwa terkait apabila penyidikan sudah masuk ketinggian penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan, itu niat atau itikad baik wajib pajak serta merta gugur atau tidak, menurut Ahli jika kondisinya seperti ini Ahli tidak tahu kondisi wajib pajak sampai pasrah dan proses berjalan sampai ke pengadilan, dan menurut Ahli perlu digali lagi bagaimana kondisi wajib pajak, karena menghentikan proses bukper, karna bukper sanksinya tinggi apalagi sampai ke penyidikan sanksinya lebih tinggi lagi, dan Ahli tidak tahu apakah wajib pajak melihat kondisi itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah
<b>Dokumen PT MENARA TERUS MAKMUR</b>		
1.	Perjanjian Kerjasama ( <i>Cooperation Agreement</i> ) No 18 Dokumen CA-018/LDPUR/MTM/XIII tanggal 2 Desember 2013	Lembar



2.	Daftar pembelian dan faktur pajak PT GANSA FURINDO tahun 2018	100 Lembar
3.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.06.18.MT-0036, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0151/MTM/V/2018, GF/0136/MTM/IV/2018, GF/0142/MTM/V/2018, GF/0139/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	267 Lembar
4.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.07.18.MT-0214, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0171/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	147 Lembar
5.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.07.18.MT.0214, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0178/MTM/VI/2018, GF/0182/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	172 Lembar
6.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0211/MTM/VII/2018, GF/0214/MTM/VII/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	136 Lembar
7.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0215/MTM/VII/2018, GF/0217/MTM/VII/2018, GF/0205/MTM/VII/2018, GF/0201/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	257 Lembar
8.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.12.18.MT.0184, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0315/MTM/X/2018, GF/0312/MTM/X/2018, GF/0322/MTM/X/2018, GF/0325/MTM/X/2018, GF/0340/MTM/X/2018, Surat Jalan, Goods receipt	310 Lembar



	From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	
9.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-2.01.19.MT.0187, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0355/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	80 Lembar
10.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.01.19.MT.0187, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0377/MTM/XII/2018, GF/0377/MTM/XI/2018, GF/0360/MTM/XI/2018, GF/0348/MTM/XI/2018, GF/0350/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	386 Lembar
11.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0003, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0002/MTM/II/2018, GF/0017/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	181 Lembar
12.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0113/MTM/IV/2018, GF/0097/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	178 Lembar
13.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0110/MTM/IV/2018, GF/0101/MTM/IV/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	218 Lembar
14.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Dokumen Receipt, Invoice nomor: GF/0041/MTM/II/2018, GF/0030/MTM/II/2018, GF/0038/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	140 Lembar
15.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Dokumen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming	110 Lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0034/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	
16.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.04.18.MT.0057, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0058/MTM/III/2018, GF/0064/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	139 Lembar
<b>Dokumen PT KAYABA INDONESIA</b>		
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Februari 2018	8 lembar
18.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
19.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
20.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
21.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	2 lembar
22.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
23.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Maret 2018	6 lembar
24.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
25.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
26.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
27.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak April 2018	5 lembar
28.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
29.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar
30.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
31.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Mei 2018	6 lembar
32.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar

Halaman 134 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



33.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
34.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
35.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
36.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juni 2018	5 lembar
37.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	3 lembar
38.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
39.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juli 2018	5 lembar
40.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
41.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
42.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
43.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Desember 2018	6 lembar
44.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
45.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
46.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
47.	Purchase Agreement (Perjanjian Jual/Beli) antara PT Kayab Indonesia dan PT Gansa Furindo tanggal 29 November 2016	28 lembar
<b>Dokumen PT MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS</b>		
48.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988097 tanggal 28 Feb 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0044 dan Quotation Summary	15 lembar
49.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988114 tanggal 28 Februari 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0061, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
50.	Surat Pemberitahuan (Revisi) Nomor: 011/GF/II/2018 tgl 3 Februari 2018	8 lembar
51.	Surat Jalan Februari 2018	179



		lembar
52.	Purchase Order Februari 2018	6 lembar
53.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988142 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0089, dan Purchase Order	18 lembar
54.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988143 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0090, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar
55.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988152 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0099 dan Surat Jalan	21 lembar
56.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988161 tanggal 15 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0108 dan Tanda Terima Invoice	6 lembar
57.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988183 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0130 dan Tanda Terima Invoice	9 lembar
58.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988184 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0131, Tanda Terima Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
59.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987843 tanggal 25 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0154, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
60.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987854 tanggal 31 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0165 dan Quotation Summary	17 lembar
61.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987877 tanggal 28 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0188, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
62.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987888 tanggal 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0199	9 lembar
63.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987907 tanggal 11 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0219, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar
64.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987919 tanggal 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0231	10 lembar
65.	Faktur Pajak Nomor Seri "0110021863985246 tanggal	16



	26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0393, dan Purchase Order	lembar
66.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985247 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0394, Surat Jalan dan Purchase Order	14 lembar
<b>Dokumen PT GLOBAL DIMENSI METALINDO</b>		
67.	Bukti Pengeluaran Bank No.45 BK tanggal 6 Juni 2018,Permintaan transfer,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0121/GDM/IV/2018 tanggal 30 April 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63988174 tanggal 30 April 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 007/CDM/XII/17	29 Lembar
68.	Bukti Pengeluaran Bank No.47 BK tanggal 6 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0155/GDM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63987844 tanggal 30 Mei 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 016/GDM/VI/18	16 Lembar
69.	Bukti Pengeluaran Bank No.133 BK tanggal 17 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0200/GDM/VII/2018 tanggal 30 Juni 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987889 tanggal 30 Juni 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 014/GDM/VII/18	15 Lembar
70.	Bukti Pengeluaran Bank No.43 BK tanggal 05 September 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0221/GDM/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987909 tanggal 30 Juli 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 012/GDM/VIII/18	18 Lembar
71.	Bukti Pengeluaran Bank No.35 BK tanggal 12 Februari 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0396/GDM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri	9 Lembar



	faktur pajak :010.002-18.63985249 tanggal 20 Desember 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 008/GDM/I/19	
<b>Dokumen PT MEGATAMA SPRING</b>		
72.	<p>Dokumen Pembelian yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0027/MS/I/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988080 tgl 31/01/2018,</li><li>• Invoice GF/0376/MS/XI/2018 tanggal 30/11/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985229 tgl 30/11/2018,</li><li>• Invoice GF/0135/MS/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988188 tgl 30/04/2018,</li><li>• Invoice GF/0166/MS/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987855 tgl 30/04/2018,</li><li>• Invoice GF/0082/MS/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988135 tgl 31/03/2018,</li><li>• Invoice GF/0194/MS/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987883 tgl 30/06/2018,</li><li>• Invoice GF/0225/MS/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987913 tgl 31/07/2018,</li><li>• Invoice GF/0269/MS/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987957 tgl 31/08/2018,</li><li>• Invoice GF/0343/MS/X/2018 tanggal 31/10/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985196 tgl 31/10/2018,</li><li>• Invoice GF/0398/MS/XII/2018 tanggal 31/12/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985251 tgl 31/12/2018,</li><li>• Invoice GF/0302/MS/IX/2018 tanggal 30/09/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985155 tgl 30/09/2018,</li></ul>	51 Lembar





73.	1 Set Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 800113856200 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Maret 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan April 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Mei 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Juni 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Juli 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Agustus 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan September 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Oktober 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan November 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Desember 2018;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Januari 2019;</li><li>• Laporan TranTerdakwa bulan Februari 2019.</li></ul>	12 Lembar
<b>Dokumen PT ASAHI DENSO INDONESIA</b>		
74.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0049/ADI/II/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988102 tgl 28 Februari 2018, Rekap Surat Jalan Feb 2018 dan Nota Pembatalan NP 007/II/2018	12 lembar
75.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0075/ADI/III/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988128 tgl 29 Maret 2018, Rekap Surat Jalan Maret 2018 dan Nota Pembatalan NP 012/III/2018	11 lembar
76.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0115/ADI/IV/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988168 tgl 27 April 2018, Rekap Surat Jalan April 2018 dan Nota Pembatalan NP 017/IV/2018	11 lembar
77.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0160/ADI/V/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987849 tgl 31 Mei 2018, Rekap Surat Jalan Mei 2018 dan Nota Pembatalan NP 021/V/2018	11 lembar
78.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0186/ADI/VI/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987875 tgl 29 Juni 2018, Rekap Surat Jalan Juni 2018 dan Nota Pembatalan NP 026/VI/2018	8 lembar
79.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0230/ADI/VII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987918 tgl 31 Juli 2018, Rekap Surat Jalan Juli 2018 dan Nota	11 lembar



	Pembatalan NP 030/VII/2018	
80.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0390/ADI/XII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63985243 tgl 24 Desember 2018, Rekap Surat Jalan Des 2018 dan Nota Pembatalan NP 057/XII/2018	8 lembar
81.	Fotokopi Rekening Bank Mizuho Indonesia a.n PT ASAHI DENSO INDONESIA Nomor 3058540151 periode Januari s.d Desember 2018	12 lembar
<b>Dokumen PT UMEDA FACTORY INDONESIA</b>		
82.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988105, Invoice No GF/0052/UFI/II/2018, Debit Note 003/DB/UFI/II/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
83.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988138, 010.002-18.63988139, Invoice No GF/0085/UFI/III/2018, GF/0086/UFI/III/2018, Debit Note 005;006/DB/UFI/III/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	8 lembar
84.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988179, Invoice No GF/0126/UFI/IV/2018, Debit Note 007;008/DB/UFI/IV/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	5 lembar
85.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987853, Invoice No GF/0164/UFI/V/2018, Debit Note 012/DB/UFI/V/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
86.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987886, Invoice No GF/0197/UFI/VI/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	3 lembar
87.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987916, Invoice No GF/0228/UFI/VII/2018, Debit Note 017/DB/UFI/VII/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
88.	Faktur Pajak No 010.002-18.63985254, Invoice No GF/0401/UFI/XII/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
<b>Dokumen PT BAKRIE AUTOPARTS</b>		
89.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0025/BA/I/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 011.002-18.63988078 tgl 31/01/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/04/2018;</li></ul>	25 Lembar



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0046/BA/II/2018 tanggal 28/02/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988099 tgl 28/02/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 18/05/2018;</li><li>• Invoice GF/0083/BA/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988136 tgl 31/03/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 02/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0119/BA/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988172 tgl 30/04/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0169/BA/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987858 tgl 31/05/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/08/2018;</li><li>• Invoice GF/0202/BA/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987891 tgl 30/06/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 01/10/2018;</li><li>• Invoice GF/0237/BA/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987905 tgl 31/07/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 21/06/2019;</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 15/11/2018;</li><li>• Invoice GF/0270/BA/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987958 tgl 31/08/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/02/2020;</li></ul>	
<b>Dokumen PT MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA</b>		
90.	DETAIL PAYMENT TO GANSA, Bukti TranTerdakwa	51



	dan SURAT PERINTAH kepada Bank	lembar
91.	Invoice No: GF/0125/MAI/IV/2018 tgl 30 April 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	37 lembar
92.	Invoice No: GF/0198/MAI/VI/2018 tgl 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	42 lembar
93.	Invoice No: GF/0208/MAI/VII/2018 tgl 13 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	78 lembar
94.	Invoice No: GF/0229/MAI/VII/2018 tgl 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	99 lembar
95.	Invoice No: GF/0391/MAI/XII/2018 tgl 26 Desember 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	104 lembar
<b>Dokumen TERDAKWA PELAPOR</b>		
96.	1 Set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-8/WPJ.22/2020 tanggal 24 Juli 2020	33 lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAHCIPTA</b>		
97.	Rekap Penjualan ke PT GANSA FURINDO tahun 2018	1 Lembar
98.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 84/3, Invoice GF/0023/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988076	3 Lembar
99.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 40/4, Invoice GF/0043/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988096	3 Lembar
100.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 26/5, Invoice GF/0077/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988130	3 Lembar
101.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 37/6, Invoice GF/0133/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988186	3 Lembar
102.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 70/7, Invoice GF/0157/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-	3 Lembar



	18.63987846	
103.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 53/8, Invoice GF/0195/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987884	3 Lembar
104.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 8/9, Invoice GF/0224/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987912	3 Lembar
105.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 2/10, Invoice GF/0257/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987945	3 Lembar
106.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 1/11, Invoice GF/0290/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985143	3 Lembar
107.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 30/12, Invoice GF/0341/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985194	3 Lembar
108.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 17/1, Invoice GF/0362/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985215	3 Lembar
109.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 16/2, Invoice GF/0395/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985248	3 Lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAH CEMERLANG</b>		
110.	Perincian Invoice dan Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO Tahun 2018	1 Lembar
111.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0024/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988077, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	5 Lembar
112.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0042/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988095, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar





113.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0078/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988131, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
114.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0129/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988182, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
115.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0156/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987845, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
116.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0189/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987878, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
117.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0220/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987908, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
118.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0262/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987950, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
119.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0291/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985144, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
120.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0342/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985195, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	9 Lembar
121.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0363/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985216, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
122.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0408/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985261, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	4 Lembar



123.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0392/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985245, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
<b>Dokumen NUR EFFENDI (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
124.	Printout Daftar Pajak Keluaran PT GANSA FURINDO Masa 201801 – 201812	14 lembar
125.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
126.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
127.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
128.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak September 2018	7 lembar
129.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Oktober 2018	7 lembar
130.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
131.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
<b>Dokumen NANA MAULANA RAHMAT (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
132.	Nota Penghitungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2017	12 lembar
133.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Desember 2017	19 lembar
134.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Januari 2018	18 lembar
<b>Dokumen PT CABININDO PUTRA</b>		
135.	Invoice (GF/0048/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988101), Bukti Transfer (2708-1) , Debit Note (017-DN/CP/III/18)	5 Lembar
136.	Invoice (GF/0060/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988113), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
137.	Invoice (GF/0080/CP/III/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988133), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
138.	Invoice (GF/0081/CP/III/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988134), Bukti Transfer (2991-1)	4 Lembar
139.	Invoice (GF/0128/CP/IV/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988181), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar



140.	Invoice (GF/0132/CP/IV/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988185), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
141.	Invoice (GF/0158/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987847), Bukti Transfer (3537-1), Surat perubahan no. rekening	4 Lembar
142.	Invoice (GF/0159/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987848), Bukti Transfer (3537-1)	4 Lembar
143.	Invoice (GF/0187/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987876), Bukti Transfer (3671-1)	3 Lembar
144.	Invoice (GF/0193/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987882), Bukti Transfer (3671-1)	4 Lembar
145.	Invoice (GF/0233/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987921), Bukti Transfer (3978-1)	4 Lembar
146.	Invoice (GF/0234/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987922), Bukti Transfer (3978-1)	3 Lembar
147.	Invoice (GF/0386/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985239), Bukti Transfer (5666-1)	4 Lembar
148.	Invoice (GF/0399/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985252), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
149.	Invoice (GF/0405/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985258), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
<b>Dokumen AKHMAD INDRA WIRAWAN (Direktur PT GANSA FURINDO)</b>		
150.	AKTA tanggal 8 September 1994 Nomor 19 Notaris SUTJIPTO. SH.	1 lembar
151.	AKTA tanggal 8 Mei 2014 Nomor 227 dan AKTA tanggal 12 Mei 2014 Nomor 332 Notaris ROSITA RIANALI SIANIPAR, S.H. M.Kn	1 lembar
152.	AKTA tanggal 07 April 2019 Nomor 01 Notaris INDRA WAHYUDI, S.H., M.Kn	1 lembar
153.	Surat Nomor AHU-AH.01.03-0372582 tanggal 13 Desember 2019 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 2 Notaris WINDA FEBRIANI, S.H., M.Kn.	1 lembar
154.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Desember 2015	1 lembar
155.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Mei 2016	1 lembar
156.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 7 Juni 2016	1 lembar



157.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 5 Februari 2018	1 lembar
158.	Bagan Layout Produksi PT GANSA FURINDO	1 lembar
159.	Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar	5 lembar
160.	Laporan Penjualan Lokal PT GANSA FURINDO Januari s.d Desember 2018	108 lembar
161.	Rekening Bank BNI Cabang JABABEKA Nomor rekening 5555666176 periode tanggal 14/09/2017 s.d 12/09/2018 atas nama PT GANSA FURINDO	12 lembar
162.	Account Statement BNI No. 3987398733 - GANSA FURINDO periode 01 Jan 2018 s.d 31 Des 2018	42 lembar
163.	Rekening Giro Bank Artha Graha International, Tbk. atas nama GANSA FURINDO Nomer Rekening 0921215151 periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018	14 lembar
164.	Laporan TranTerdakwa Bank BRI atas nama PT GANSA FURINDO No. Rekening 114401000386308 periode 01/01/18 s.d 31/12/18	47 lembar
165.	SPT Masa PPN tahun 2018 masa pajak Agustus, September, Oktober dan November	46 lembar
166.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988054 tanggal 31- JAN-18	3 lembar
167.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988055 tanggal 31- JAN-18	1 lembar
168.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988056 tanggal 31- JAN-18	2 lembar
169.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988057 tanggal 31- JAN-18	2 lembar
170.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988058 tanggal 31- JAN-18	2 lembar
171.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988059 tanggal 31- JAN-18	2 lembar
172.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988060 tanggal 31- JAN-18	1 lembar
173.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988061 tanggal 31- JAN-18	1 lembar
174.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988062 tanggal 31- JAN-18	2 lembar
175.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988063 tanggal 31- JAN-18	2 lembar



176.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988064 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
177.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988065 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
178.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988066 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
179.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988067 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
180.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988068 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
181.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988069 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
182.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988070 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
183.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
184.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
185.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988073 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
186.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988074 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
187.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988075 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
188.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988076 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
189.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988077 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
190.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988079 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
191.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988080 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
192.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988081 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
193.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988082 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
194.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988083 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
195.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988078 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
196.	Nota Retur Nomor MAI/2018/I/09/LOC/S tanggal 02/01/2018	2 lembar
197.	Nota pembatalan Nomor 004/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar





198.	Nota pembatalan Nomor 005/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
199.	Nota pembatalan Nomor 006/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
200.	Nota pembatalan Nomor 007/NP/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
201.	Nota retur Nomor 023/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
202.	Nota retur Nomor 024/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
203.	Nota retur Nomor 025/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
204.	Nota retur Nomor 026/NR/I/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
205.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988084 tanggal 01-FEB-18	2 lembar
206.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988085 tanggal 08-FEB-18	2 lembar
207.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
208.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988087 tanggal 14-FEB-18	1 lembar
209.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988088 tanggal 14-FEB-18	2 lembar
210.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988089 tanggal 15-FEB-18	1 lembar
211.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988090 tanggal 20-FEB-18	2 lembar
212.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988091 tanggal 22-FEB-18	1 lembar
213.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988092 tanggal 22-FEB-18	2 lembar
214.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988094 tanggal 26-FEB-18	1 lembar
215.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988095 tanggal 26-FEB-18	1 lembar
216.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	4 lembar
217.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988096 tanggal 27-FEB-18	1 lembar
218.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988098 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
219.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988099 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
220.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
221.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988101 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
222.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988102 tanggal 28-FEB-18	1 lembar



	FEB-18	
223.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988103 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
224.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988104 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
225.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988105 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
226.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988107 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
227.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988108 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
228.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988109 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
229.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988110 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
230.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988111 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
231.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988112 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
232.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988113 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
233.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988114 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
234.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988097 tanggal 28-FEB-18	4 lembar
235.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988106 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
236.	Nota Retur Nomor 048/NR/02/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
237.	Nota Retur Nomor 060/NR/02/2018 tgl 08-FEB-18	1 lembar
238.	Nota Retur Nomor 072/NR/02/2018 tgl 01-FEB-18	1 lembar
239.	Debit Note Nomor MAI/2018/II/05/LOC/S tanggal 01-FEB-18	4 lembar
240.	Nota Pembatalan Nomor NP007/II/2018 tanggal 28-FEB-18	3 lembar
241.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988115 tanggal 01-MAR-18	1 lembar
242.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988116 tanggal 08-MAR-18	2 lembar
243.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988117 tanggal 08-MAR-18	1 lembar
244.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
245.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988119 tanggal 12-	1 lembar



	MAR-18	
246.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988120 tanggal 15-MAR-18	2 lembar
247.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988121 tanggal 15-MAR-18	1 lembar
248.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988122 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
249.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988123 tanggal 22-MAR-18	1 lembar
250.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988124 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
251.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988125 tanggal 22-MAR-18	2 lembar
252.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988126 tanggal 25-MAR-18	1 lembar
253.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
254.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988128 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
255.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988129 tanggal 29-MAR-18	2 lembar
256.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988130 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
257.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988131 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
258.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988132 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
259.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988133 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
260.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988135 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
261.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988136 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
262.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988137 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
263.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988138 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
264.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988139 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
265.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988140 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
266.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988141 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
267.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988143 tanggal 31-MAR-18	1 lembar



	MAR-18	
268.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988144 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
269.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988145 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
270.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988146 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
271.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
272.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988148 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
273.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988149 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
274.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988150 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
275.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988151 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
276.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988134 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
277.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988142 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
278.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988152 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
279.	Nota pembatalan Nomor 018/NP/III/2018 tanggal 08-03-18	1 lembar
280.	Nota pembatalan Nomor 019/NP/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
281.	Nota pembatalan Nomor 020/NP/III/2018 tgl 16-03-18	1 lembar
282.	Nota pembatalan nomor 022/NP/III/2018 tgl 27-03-18	1 lembar
283.	Nota Retur Nomor 083/NR/III/2018 tgl 08-03-18	1 lembar
284.	Nota Retur nomor 089/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
285.	Nota retur Nomor 101/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
286.	Nota Retur Nomor 111/NR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018	1 lembar
287.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/07/LOC/S tgl 01-MAR-18	5 lembar
288.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/12/LOC/S tgl 31-03-18	5 lembar
289.	Nota Pembatalan Nomor NP012/III/2018 tanggal 31-03-18	3 lembar
290.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988153 tanggal 05-APR-18	2 lembar
291.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988154 tanggal 10-APR-18	1 lembar
292.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988155 tanggal 10-	2 lembar



	APR-18	
293.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988156 tanggal 10-APR-18	1 lembar
294.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988157 tanggal 12-APR-18	2 lembar
295.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988158 tanggal 15-APR-18	1 lembar
296.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988160 tanggal 15-APR-18	1 lembar
297.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988161 tanggal 15-APR-18	2 lembar
298.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988159 tanggal 15-APR-18	2 lembar
299.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988162 tanggal 19-APR-18	2 lembar
300.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988163 tanggal 19-APR-18	1 lembar
301.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988164 tanggal 20-APR-18	1 lembar
302.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988165 tanggal 21-APR-18	1 lembar
303.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988166 tanggal 25-APR-18	1 lembar
304.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
305.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988168 tanggal 27-APR-18	3 lembar
306.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988169 tanggal 26-APR-18	2 lembar
307.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988170 tanggal 27-APR-18	1 lembar
308.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988171 tanggal 30-APR-18	1 lembar
309.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988172 tanggal 30-APR-18	1 lembar
310.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988173 tanggal 30-APR-18	1 lembar
311.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988174 tanggal 30-APR-18	1 lembar
312.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988175 tanggal 30-APR-18	1 lembar
313.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988176 tanggal 30-APR-18	1 lembar
314.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988177 tanggal 30-APR-18	1 lembar





	APR-18	
315.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988179 tanggal 30-APR-18	1 lembar
316.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988180 tanggal 30-APR-18	2 lembar
317.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988181 tanggal 30-APR-18	2 lembar
318.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988182 tanggal 30-APR-18	1 lembar
319.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988184 tanggal 30-APR-18	1 lembar
320.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988186 tanggal 30-APR-18	1 lembar
321.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
322.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988188 tanggal 30-APR-18	2 lembar
323.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988189 tanggal 30-APR-18	1 lembar
324.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988190 tanggal 29-APR-18	1 lembar
325.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988178 tanggal 30-APR-18	2 lembar
326.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988183 tanggal 30-APR-18	4 lembar
327.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988185 tanggal 30-APR-18	2 lembar
328.	Nota Pembatalan Nomor '023/NP/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
329.	Nota Pembatalan Nomor '024/NP/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar
330.	Nota Pembatalan Nomor '031/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
331.	Nota Pembatalan Nomor '032/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
332.	Nota Pembatalan Nomor '033/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
333.	Nota Pembatalan Nomor '034/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
334.	Nota Pembatalan Nomor '035/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
335.	Nota Retur Nomor '123/NR/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
336.	Nota Retur Nomor '124/NR/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar



	18	
337.	Nota Retur Nomor '142/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
338.	Nota Retur Nomor '143/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
339.	Nota Retur Nomor '161/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
340.	Nota Retur Nomor '162/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
341.	Nota Retur Nomor '163/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
342.	Nota Pembatalan Nomor 'NP017/IV/2018 tanggal 30-APR-18	3 lembar
343.	Debit Note No: DN 001/2018 tgl 30-APR-18	1 lembar
344.	Debit Note No: 007/DB/UFI/IV/18 tgl 30-APR-18	3 lembar
345.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987827 tanggal 03-MAY-18	2 lembar
346.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987828 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
347.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar
348.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987830 tanggal 10-MAY-18	2 lembar
349.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987831 tanggal 15-MAY-18	1 lembar
350.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987833 tanggal 16-MAY-18	1 lembar
351.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
352.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987835 tanggal 17-MAY-18	2 lembar
353.	Faktur Pajak Nomor '0710021863987834 tanggal 17-MAY-18	3 lembar
354.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987836 tanggal 20-MAY-18	1 lembar
355.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987837 tanggal 21-MAY-18	1 lembar
356.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987838 tanggal 24-MAY-18	2 lembar
357.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
358.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987840 tanggal 22-MAY-18	1 lembar



359.	Debit Note No: DN 002/2018 tgl 25 mei 2018	1 lembar
360.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987842 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
361.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987843 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
362.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987841 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
363.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987844 tanggal 30-MAY-18	1 lembar
364.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987845 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
365.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987846 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
366.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987847 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
367.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987848 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
368.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987849 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
369.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987850 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
370.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987851 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
371.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987852 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
372.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987853 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
373.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987855 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
374.	Faktur Pajak Nomor 0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
375.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987857 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
376.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987858 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
377.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987860 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
378.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987861 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
379.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987863 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
380.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987859 tanggal 31-MAY-18	2 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987854 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
382.	Nota Pembatalan Nomor '039/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
383.	Nota Pembatalan Nomor '041/NP/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
384.	Nota Pembatalan Nomor '042/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
385.	Nota Pembatalan Nomor '044/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
386.	Nota Pembatalan Nomor '045/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
387.	Nota Pembatalan Nomor '046/NP/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
388.	Nota Pembatalan Nomor '047/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
389.	Nota Pembatalan Nomor '048/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
390.	Nota Pembatalan Nomor '049/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
391.	Nota Retur Nomor '172/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
392.	Nota Retur Nomor '188/NR/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
393.	Nota Retur Nomor '189/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
394.	Nota Retur Nomor '206/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
395.	Nota Retur Nomor '207/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
396.	Nota Retur Nomor '208/NR/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
397.	Nota Retur Nomor '226/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
398.	Nota Retur Nomor '227/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
399.	Nota Retur Nomor '228/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
400.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/V/02/LOC/S tanggal 01-MAY-18	3 lembar
401.	Nota Pembatalan Nomor 'NP021/V/2018 tanggal 31-MAY-18	3 lembar
402.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987864 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
403.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987865 tanggal 07-JUN-18	2 lembar
404.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987866 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
405.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987867 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
406.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987869 tanggal 20-	1 lembar

Halaman 157 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	JUN-18	
407.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987870 tanggal 21-JUN-18	2 lembar
408.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987871 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
409.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987873 tanggal 15-JUN-18	1 lembar
410.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987874 tanggal 28-JUN-18	2 lembar
411.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987875 tanggal 29-JUN-18	1 lembar
412.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987876 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
413.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987877 tanggal 28-JUN-18	1 lembar
414.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987878 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
415.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
416.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987880 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
417.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987881 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
418.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987882 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
419.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987883 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
420.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987884 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
421.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987885 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
422.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987886 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
423.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987887 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
424.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987889 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
425.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987890 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
426.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987891 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
427.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987892 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
428.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987872 tanggal 25-	6 lembar





	JUN-18	
429.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987888 tanggal 30-JUN-18	4 lembar
430.	Nota Pembatalan Nomor '053/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
431.	Nota Pembatalan Nomor '054/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
432.	Faktur Pajak Nomor '0700021863987868 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
433.	Nota Retur Nomor '246/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
434.	Nota Retur Nomor '247/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
435.	Faktur Pajak Nomor 'NP026/VI/2018 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
436.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987893 tanggal 05-JUL-18	2 lembar
437.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987894 tanggal 09-JUL-18	2 lembar
438.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
439.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987896 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
440.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987897 tanggal 13-JUL-18	1 lembar
441.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987898 tanggal 14-JUL-18	1 lembar
442.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987899 tanggal 16-JUL-18	1 lembar
443.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987900 tanggal 19-JUL-18	2 lembar
444.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987901 tanggal 19-JUL-18	1 lembar
445.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987902 tanggal 20-JUL-18	1 lembar
446.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987903 tanggal 24-JUL-18	1 lembar
447.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
448.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987905 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
449.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987906 tanggal 26-JUL-18	2 lembar
450.	Faktur Pajak Nomor 0100021863987907 tanggal 11-JUL-18	1 lembar



451.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987908 tanggal 28-JUL-18	1 lembar
452.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987909 tanggal 30-JUL-18	1 lembar
453.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987910 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
454.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987912 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
455.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987913 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
456.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987914 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
457.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987915 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
458.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987916 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
459.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987917 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
460.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987918 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
461.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987920 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
462.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987921 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
463.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987922 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
464.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987923 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
465.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987924 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
466.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987925 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
467.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987926 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
468.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987927 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
469.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987930 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
470.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987911 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
471.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987919 tanggal 31-JUL-18	4 lembar
472.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/VII/003/LOC/S tanggal	7 lembar



	01-JUL-18	
473.	Faktur Pajak Nomor 'NP030/VII/2018 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
474.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987928 tanggal 02-AUG-18	2 lembar
475.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987929 tanggal 06-AUG-18	1 lembar
476.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987931 tanggal 04-AUG-18	1 lembar
477.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987932 tanggal 09-AUG-18	2 lembar
478.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987933 tanggal 13-AUG-18	2 lembar
479.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987934 tanggal 14-AUG-18	1 lembar
480.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987935 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
481.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987936 tanggal 15-AUG-18	1 lembar
482.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987937 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
483.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987938 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
484.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987939 tanggal 21-AUG-18	1 lembar
485.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987940 tanggal 23-AUG-18	2 lembar
486.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987941 tanggal 25-AUG-18	2 lembar
487.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987942 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
488.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987943 tanggal 28-AUG-18	1 lembar
489.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987944 tanggal 29-AUG-18	1 lembar
490.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987945 tanggal 30-AUG-18	1 lembar
491.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987946 tanggal 24-AUG-18	1 lembar
492.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987947 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
493.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987948 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
494.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987950 tanggal 31-	1 lembar



	AUG-18	
495.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987951 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
496.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987952 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
497.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987953 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
498.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987954 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
499.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987955 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
500.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987956 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
501.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987957 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
502.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987958 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
503.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987959 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
504.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987960 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
505.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987961 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
506.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987962 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
507.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987949 tanggal 31-AUG-18	4 lembar
508.	Nota Pembatalan Nomor 'NP035/VIII/2018 tanggal 31-AUG-18	3 lembar
509.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985129 tanggal 06-SEP-18	1 lembar
510.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985130 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
511.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985131 tanggal 03-SEP-18	1 lembar
512.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985132 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
513.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985133 tanggal 17-SEP-18	1 lembar
514.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985135 tanggal 15-SEP-18	2 lembar
515.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985136 tanggal 20-SEP-18	1 lembar
516.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985137 tanggal 20-	2 lembar



	SEP-18	
517.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985138 tanggal 21-SEP-18	1 lembar
518.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985139 tanggal 22-SEP-18	1 lembar
519.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985140 tanggal 26-SEP-18	2 lembar
520.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985141 tanggal 27-SEP-18	2 lembar
521.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985143 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
522.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985144 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
523.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985146 tanggal 18-SEP-18	1 lembar
524.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985147 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
525.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985148 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
526.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985149 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
527.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985150 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
528.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985151 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
529.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985152 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
530.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985153 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
531.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985154 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
532.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985155 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
533.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985156 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
534.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985157 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
535.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985158 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
536.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985159 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
537.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985160 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
538.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985161 tanggal 30-	1 lembar





	SEP-18	
539.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987963 tanggal 06-SEP-18	2 lembar
540.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985145 tanggal 29-SEP-18	4 lembar
541.	Nota Pembatalan Nomor 'NP041/IX/2018 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
542.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985162 tanggal 01-OCT-18	1 lembar
543.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985163 tanggal 02-OCT-18	1 lembar
544.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985164 tanggal 04-OCT-18	2 lembar
545.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985165 tanggal 09-OCT-18	1 lembar
546.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985166 tanggal 11-OCT-18	3 lembar
547.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985167 tanggal 11-OCT-18	2 lembar
548.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985168 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
549.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985170 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
550.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985172 tanggal 18-OCT-18	2 lembar
551.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985173 tanggal 18-OCT-18	1 lembar
552.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985174 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
553.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985175 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
554.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985176 tanggal 24-OCT-18	2 lembar
555.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985177 tanggal 25-OCT-18	2 lembar
556.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985178 tanggal 29-OCT-18	1 lembar
557.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985179 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
558.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985180 tanggal 25-OCT-18	1 lembar
559.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985182 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
560.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985184 tanggal 31-	2 lembar



	OCT-18	
561.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985185 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
562.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985186 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
563.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985187 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
564.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985188 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
565.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985189 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
566.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985190 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
567.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985191 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
568.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985192 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
569.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985193 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
570.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985194 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
571.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985195 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
572.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985196 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
573.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985197 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
574.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985198 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
575.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985200 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
576.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985169 tanggal 16-OCT-18	3 lembar
577.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985171 tanggal 15-OCT-18	2 lembar
578.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985181 tanggal 31-OCT-18	4 lembar
579.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985183 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
580.	Nota Pembatalan Nomor 'NP047/X/2018 tanggal 31-OCT-18	3 lembar
581.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985199 tanggal 01-NOV-18	2 lembar
582.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985201 tanggal 05-	1 lembar



	NOV-18	
583.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985202 tanggal 08-NOV-18	2 lembar
584.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985205 tanggal 15-NOV-18	3 lembar
585.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985206 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
586.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985207 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
587.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985208 tanggal 19-NOV-18	1 lembar
588.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985209 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
589.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985210 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
590.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985211 tanggal 22-NOV-18	2 lembar
591.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985212 tanggal 26-NOV-18	2 lembar
592.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985213 tanggal 28-NOV-18	1 lembar
593.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985214 tanggal 22-NOV-18	1 lembar
594.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985215 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
595.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985216 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
596.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985217 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
597.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985218 tanggal 29-NOV-18	2 lembar
598.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985219 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
599.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985220 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
600.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985221 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
601.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985222 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
602.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985223 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
603.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985224 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
604.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985225 tanggal 30-	1 lembar



	NOV-18	
605.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985226 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
606.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985227 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
607.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985228 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
608.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985229 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
609.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985230 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
610.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
611.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985232 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
612.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985203 tanggal 12-NOV-18	2 lembar
613.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985204 tanggal 15-NOV-18	4 lembar
614.	Nota Pembatalan Nomor '096/NP/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
615.	Nota Pembatalan Nomor '097/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
616.	Nota Pembatalan Nomor '098/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
617.	Nota Pembatalan Nomor '103/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
618.	Nota Pembatalan Nomor '105/NP/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
619.	Nota Retur Nomor '453/NR/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
620.	Nota Retur Nomor '459/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
621.	Nota Retur Nomor '460/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
622.	Nota Retur Nomor '465/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
623.	Nota Retur Nomor '482/NR/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
624.	Nota Retur Nomor 'MAI/2018/XI/01/LOC/S tanggal 01-NOV-18	9 lembar
625.	Nota Pembatalan Nomor 'NP052/XI/2018 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
626.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-	1 lembar



	DEC-18	
627.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18	2 lembar
628.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18	1 lembar
629.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
630.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
631.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18	1 lembar
632.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18	2 lembar
633.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18	1 lembar
634.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18	2 lembar
635.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
636.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985243 tanggal 24-DEC-18	1 lembar
637.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985244 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
638.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985245 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
639.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985247 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
640.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985248 tanggal 27-DEC-18	1 lembar
641.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985249 tanggal 20-DEC-18	1 lembar
642.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985250 tanggal 28-DEC-18	1 lembar
643.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985251 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
644.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985252 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
645.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985253 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
646.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985254 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
647.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985255 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
648.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985256 tanggal 31-	1 lembar





	DEC-18	
649.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985257 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
650.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985258 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
651.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985259 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
652.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985260 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
653.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985261 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
654.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985262 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
655.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985246 tanggal 26-DEC-18	4 lembar
656.	Nota Pembatalan Nomor '107/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
657.	Nota Pembatalan Nomor '108/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
658.	Nota Pembatalan Nomor '109/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
659.	Nota Pembatalan Nomor '511/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
660.	Nota Pembatalan Nomor '512/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
661.	Nota Pembatalan Nomor '513/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
662.	Nota Pembatalan Nomor 'NP057/XII/2018 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
663.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	5 lembar
664.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	15 lembar
665.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	47 lembar
666.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	49 lembar
667.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18,	23 lembar



	Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	
668.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	13 lembar
669.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	73 lembar
670.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	24 lembar
671.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	33 lembar
672.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	45 lembar
673.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0334/JIC-PP/X/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985187, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 10-2018	6 lembar
674.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0229/JIC-PP/IX/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985152, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 09-2018	8 lembar
675.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0265/JIC-PP/VIII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987953, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 08-2018	11 lembar
676.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0226/JIC-PP/VII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987914, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 07-2018	10 lembar
677.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0161/JIC-PP/V/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987850, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 05-2018	9 lembar
678.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0124/JIC-PP/IV/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988177, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 04-2018	9 lembar



679.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0088/JIC-PP/III/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988141, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 03-2018	10 lembar
680.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0055/JIC-PP/II/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988108, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 02-2018	8 lembar
681.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0014/JIC-PP/II/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988067, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 01-2018	6 lembar
682.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-125, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
683.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-126, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
684.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-127, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
685.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-129, Bukti Penerimaan, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	4 Lembar
686.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-130, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
687.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-132, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	82 Lembar
688.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-133, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
689.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-134, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
690.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-135, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
691.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal	2 Lembar



	Voucher no. BB-1802-136, Bukti Pengeluaran	
692.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-170, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
693.	Printout General Ledger A/C:10.01.018 BNI-IDR	2 Lembar
<b>Dokumen PT SHOWA INDONESIA MANUFACTURING</b>		
694.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/025, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Nota Retur, Nota Pembatalan, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0062/SIM/III/2018, Invoice nomor GF/0054/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988115, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak 010.002-18.63988107.	69 Lembar
695.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/019, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0032/SIM/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988085, Surat Jalan, Purchase Order.	27 Lembar
696.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/027, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Nota Pembatalan, Nota Retur, Billing Statement, Invoice nomor GF/0063/SIM/III/2018, Nota Kredit, Faktur Pajak 010.002-18.63988116, Surat Jalan, Purchase Order.	37 Lembar
697.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank Of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/021, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal	27 Lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0035/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988088, Surat Jalan, Purchase Order.	
698.	1 Set Dokumen Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO tahun 2018.	106 Lembar
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
699.	Painting Equipment Low Temperature. Terdiri dari: - Mesin Conveyor dan dynamo penggerak Merk JOIL, - 1 Mesin Pompa Cat Merk ANZEN, - 1 Panel/Kontrol Mesin, - 2 Ruang Painting dan, - Ruang Oven	1 Set
700.	Sand Blasting Rear Grip Equipment, Merk/Buatan PT KAKAZU INDONESIA serial no. TCH-AS6 700	1 Set
<b>Dokumen PT ASTRA OTOPARTS</b>		
701.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Surat Pemberitahuan, Verification Letter, Invoice Nomor GF/0213/AOP/VII/2018, GF/0209/AOP/VI/2018, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak No 010.00218.63987901, 010.00218.63987864, Bukti Transfer, Order Sheet Subcontracting	178 Lembar
702.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Incoming Document Receipt, Invoice nomor GF/0103/AOP/IV/2018, GF/0098/AOP/III/2018, GF/0112/AOP/IV/2018, GF/0095/AOP/III/2018, Berita Acara Sewa Gedung, Service Entry Sheet Acceptance, Purchase Order, Faktur Pajak Nomor 010.00218.63988156, 010.00218.63988151, 010.00218.63988165, 010.00218.63988148, Surat Jalan, Order Sheet Subcontracting	133 Lembar
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
703.	Liquid Painting Coating Machine, terdiri dari: e. 1 (satu) Chain Hoist Merk Kito, Tipe Single, Kapasitas 2 Ton, ukuran 17.2 m P x 6 m L, hanger isi 30 pcs; f. 1 (satu) Air Blow; g. 1 (satu) Painting Liquid Merk Kakazu Indonesia,	1 Set

Halaman 173 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





	Tipe PCN-TM-250, ukuran 360 cm P x 245 cm L x 215 cm T dengan motor listrik 640 watt dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) Spray Gun Merk Anzen, Tipe DP-3</li><li>• 1 (satu) Blower dengan motor listrik 5.5 HP dan cerobong asap 25 m P x diameter 60 cm</li><li>• 1 (satu) Backing Oven ukuran 420 cm P x 290 cm L x 150 cm T, dengan motor listrik 2 x 1.5 HP dan 1 (satu) Conveyer Jig ukuran 2500 cm P</li></ul> h. Panel control	
<b>Dokumen ELYSA ROSITA (Staf Accounting dan Pajak PT GANSA DURINDO)</b>		
704.	1 set Rekening Koran Bank BII cabang KK Lippo Cikarang nomor 2-246-000433 atas nama PT GANSA FURINDO	9 Lembar
705.	General Ledger A/C: 10.01.018 BNI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	12 Lembar
706.	General Ledger A/C: 10.01.017 ARTHA GRAHA BANK-IDR Periode 1 Oktober 2017 to 31 Desember 2019	8 Lembar
707.	General Ledger A/C: 10.01.019 BRI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	21 Lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 19 tanggal 08 September 1994 dan Persetujuan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-11.223 HT.01.01 tahun 95 tanggal 6 September 1995 dengan pemilik perusahaan Mr. Chang Shan Tsung, namun pada tahun 2014, sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko membeli Terdakwa PT. Gansa Furindo dari Mr. Chang Shan Tsung, dimana Terdakwa PT. Gansa Furindo beralamat di Jl. Akasia II Delta Silicon Blok A9 N0.8 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi sejak tanggal 26 September 1994 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.084.733.3-341.000 juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 September 1994 dan sejak tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan

Halaman 174 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KPP Pratama Cikarang Selatan dengan jenis usaha sesuai master file Wajib Pajak Badan yaitu industri brankas, filing kantor dan sejenisnya (KLU 25991), sedangkan usaha sesuai keadaan sebenarnya adalah industri pengecatan (liquid painting and powder coating) parts kendaraan bermotor yang bahan bakunya berupa cat dan bubuk pewarna, dimana Terdakwa PT. Gansa Furindo terdata dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang selaku Wajib Pajak Badan dengan kewajiban perpajakan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final pasal 4 ayat (2), sehingga Terdakwa PT. Gansa Furindo memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Asessment);

- Bahwa struktur kepengurusan dan pemegang saham Terdakwa PT.Gansa Furindo tahun 2014 - 2018 yaitu : sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko selaku Direktur Utama dengan kepemilikan saham sebesar 61,5 % atau senilai Rp.2.475.003.540,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur dengan kepemilikan saham sebesar 21% atau senilai Rp.845.123.160,- (delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), Agustinus Suhendro Prasetya selaku Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 7,5% atau senilai Rp.301.829.700,- (tiga ratus satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), Sisa saham sebesar 10% atau senilai Rp.402.439.600,- (empat ratus dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) masih dimiliki oleh Chang Shan Tsung (pemilik awal perusahaan), akan tetapi pembagian kepemilikan saham yang tertuang dalam akta Notaris tersebut sifatnya formalitas saja, faktanya seluruh saham Terdakwa PT. Gansa Furindo (100%) milik sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko;
- Bahwa sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko selain selaku Direktur Utama Terdakwa PT. Gansa Furindo berdasarkan akta Notaris Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn Nomor : 227 tanggal 08 Mei 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-07542.40.22.2014 tanggal 09 Mei 2014. Sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko juga merupakan pemilik saham terbesar Terdakwa PT. Gansa Furindo, sedangkan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan

Halaman 175 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Terdakwa PT. Gansa Furindo yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn Nomor 332 tanggal 12 Mei 2014, dalam operasional Saksi Akhmad Indra Wirawan mempunyai tugas dan wewenang antara lain yaitu: Mencari customer dan maintenance customer untuk menjaga kelangsungan bisnis dan Menjalankan urusan internal untuk pemenuhan kebutuhan *customer* (proses manufakturnya), menjaga jalannya fungsi marketing, produksi, financial (termasuk diantaranya pelaporan (menandatangani SPT Masa PPN) dan pembayaran pajak), HRD, general affairs, dan lain-lain.

- Bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo pernah melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang/jasa dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 dengan beberapa perusahaan diantaranya yaitu : PT. Menara Terus Makmur, PT. Mitsuba Indonesia Pipe Parts, PT. Kabaya Indonesia, PT. Megatama Spring, PT. Asahi Denso Indonesia, PT. Minda Automotive Indonesia, PT. Jaya Indah Casting, PT. Bakrie Autoparts, PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Chandra Nugerah Cemerlang, dan PT. Chandra Nugerah Cipta, dimana perusahaan-perusahaan tersebut telah membayar nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo dari transaksi penjualan atau penyerahan jasa sebesar 10%, dengan cara mentransfer sejumlah dana langsung ke rekening atas nama PT. Gansa Furindo di : Bank BNI Cabang Cikarang akun nomor 3987398733, Bank Artha Graha Cabang Cibusah Cikarang akun nomor 0921215151 dan Bank BRI Cabang Soekarno Hatta akun nomor 114401000386308.
- Bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo dalam periode masa pajak Januari s/d Desember 2018 telah menerbitkan faktur pajak terhadap penjualan atau penyerahan barang/jasa dengan cara langsung memungut atau memotong PPN dari lawan transaksi dengan total nilai PPN yang dipungut atau dipotong seluruhnya sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang apabila dikelompokkan per Masa Pajak berdasarkan data yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	PPN (Rupiah)
1	Januari 2018	388.061.542

Halaman 176 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



2	Februari 2018	337.245.888
3	Maret 2018	452.267.786
4	April 18	483.917.715
5	Mei 2018	421.570.023
6	Juni 2018	268.071.832
7	Juli 2018	374.433.680
8	Agustus 2018	417.027.791
9	September 2018	395.904.462
10	Oktober 2018	434.561.637
11	November 2018	375.297.875
12	Desember 2018	302.164.060
	<b>TOTAL</b>	<b>4.650.524.291</b>

- Bahwa dari total nilai PPN yang sudah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo kepada lawan transaksi dalam pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), namun hanya sebesar Rp.1.622.791.765,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo ke KPP sebagaimana laporan SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo bulan Agustus, September, Oktober dan November 2018 dengan perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PEMBELI BKP/JKP	NPWP PEMBELI	Jumlah FP	HARGA JUAL/ DPP	Total PPN
'PT. BAKRIE AUTOPARTS	'010017788431000	1	34.589.000	3.458.900
'PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING	'010022184092000	25	1.354.883.860	135.488.386
'PT. KAYABA Indonesia	'010028322092000	12	2.358.223.650	235.822.365
'PT. MENARA TERUS MAKMUR	'010621050431000	22	3.536.658.900	353.665.890
'PT. HANKEN Indonesia	'010709905055000	2	760.500	76.050
'PT. NAKAKIN Indonesia	'010710507055000	4	50.318.500	5.031.850
'JOTUN Indonesia	'010711745052000		-	-
'PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY	'010813350055000	1	829.120	82.912
'PT. CABININDO PUTRA	'010815801431000	12	1.380.299.360	138.029.936
'PT. JAYA INDAH CASTING	'010847440055000	3	79.517.340	7.951.734
'PT. ASTRA OTOPARTS TBK	'013452438054000	17	497.046.460	49.704.646
'PT. CHANDRA NUGERAH CIPTA	'017137977431000	4	226.474.120	22.647.412
'PT. MEGATAMA SPRING	'018099614431000	4	918.340.100	91.834.010
'YKT GEAR Indonesia	'018693598055000		-	-
'PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS	'018695247055000	10	3.248.167.950	324.816.795
'PT. ASAHI DENSO INDONESIA	'018696195055000	8	1.336.525.370	133.652.537
'PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE	'018696252055000	1	1.454.400	145.440
'PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG	'020488532431000	4	584.554.080	58.455.408
'PT. HONDA TRADING INDONESIA	'021157599059000	1	2.916.250	291.625
'PT. GLOBAL DIMENSI METALINDO	'023561541431000	4	188.130.000	18.813.000
'PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING	'024495533421000	5	174.578.050	17.457.805
'PT. UMEDA FACTORY INDONESIA	'028584993413000	4	39.149.520	3.914.952
'PT. MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA	'314700691431000	9	214.501.120	21.450.112
<b>Total</b>		<b>153</b>	<b>16.227.917.650</b>	<b>1.622.791.765</b>





- Bahwa untuk SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo bulan Januari 2018, telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Bekasi dan telah diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan nilai PPN sebesar Rp.388.061.542,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga terdapat kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi dari bulan Pebruari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah) yang dihitung berdasarkan Nilai PPN yang telah diterbitkan dalam Faktur Pajak dan telah dipungut atau dipotong PPN-nya oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo namun tidak disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang.
- Bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

Halaman 179 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipungut untuk SPT Masa PPN bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut karena awalnya pada tahun 2015 sdr. Yohanes secara lisan telah mendelegasikan kewenangannya selaku direktur utama kepada Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku direktur dan pendelegasian tersebut dibuat struktur organisasi, dimana dalam menjalankan kewenangannya Saksi Akhmad Indra Wirawan diminta untuk mengontrol Terdakwa PT. Gansa Furindo dengan kewajiban Saksi Akhmad Indra Wirawan untuk memberi laporan kepada sdr. Yohanes, kewenangan dimaksud adalah secara keseluruhan termasuk juga wajib pajak, dimana terkait pajak Saksi Akhmad Indra Wirawan tahu adanya cashflow perusahaan yang tidak mampu menunjang operasional perusahaan, sehingga manajemen harus menentukan prioritas penggunaan dana yang ada untuk tetap dapat menjaga performa perusahaan agar tetap bisa beroperasi dengan harapan penjualan membaik dan cashflow juga bisa membaik, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur yang telah menerima delegasi kewenangan dari sdr. Yohanes selaku Utama dengan inisiatif Saksi Akhmad Indra Wirawan sendiri memutuskan agar PPN sebesar 10% dari nilai DPP yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo kepada lawan transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran ke supplier dan pengeluaran operasional lainnya seperti pembayaran gaji, listrik, dan lain-lain daripada digunakan untuk pembayaran pajak, karena kalau supplier tidak dibayar, otomatis perusahaan tidak akan dapat bahan baku yang akan dipakai dalam pekerjaan pengecatan, hal ini dilakukan Saksi Akhmad Indra Wirawan tanpa sepengetahuan dari sdr. Yohanes sedangkan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur mengetahui uang yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo dari lawan transaksi untuk pembayaran PPN sebesar 10%, harus dilaporkan kepada sdr. Yohanes dan disetorkan serta dibuatkan laporan SPT Masa PPM ke KPP agar tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, akan tetapi Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur tetap memutuskan untuk tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut/dipotong tersebut ke Kas Negara dan tidak membuat

Halaman 180 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/menyampaikan / menyerahkan Laporan SPT Masa PPN periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
4. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pemenuhan unsur pasal ini mengacu kepada subyek hukum yang dalam ketentuan pidana perpajakan berupa wajib pajak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 181 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU KUP**"), yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur setiap orang dalam hal ini, pada dasarnya mengacu kepada setiap orang baik berupa pribadi atau badan yang menjadi subyek hukum pidana perpajakan didepan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya (*error in persona*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa yang merupakan subyek hukum wajib pajak di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Terdakwa yang diwakili sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko selaku Direktur Utama, para Saksi, bukti surat, dan barang bukti yang materinya secara substansial bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap subyek hukum yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah Terdakwa PT. Gansa Furindo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 19 tanggal 08 September 1994 dan Persetujuan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-11.223 HT.01.01 tahun 95 tanggal 6 September 1995 dengan pemilik perusahaan Mr. Chang Shan Tsung, namun pada tahun 2014, sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko membeli Terdakwa PT. Gansa Furindo dari Mr. Chang Shan Tsung, dimana Terdakwa PT. Gansa Furindo beralamat di Jl. Akasia II Delta Silicon Blok A9 N0.8 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi sejak tanggal 26 September 1994 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.084.733.3-341.000 juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 26 September 1994 dan sejak tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa PT. Gansa Furindo terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cikarang Selatan dengan jenis usaha sesuai master file Wajib Pajak Badan yaitu industri brankas, filing kantor dan sejenisnya (KLU 25991), sedangkan usaha sesuai keadaan sebenarnya adalah industri pengecatan



(liquid painting and powder coating) parts kendaraan bermotor yang bahan bakunya berupa cat dan bubuk pewarna, dimana Terdakwa PT. Gansa Furindo terdata dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang selaku Wajib Pajak Badan dengan kewajiban perpajakan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final pasal 4 ayat (2), sehingga Terdakwa PT. Gansa Furindo memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Asessment), yang mana hal tersebut pada pokoknya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan lainnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori Hukum Pidana, adalah suatu sikap batin atas perbuatan yang berupa kesengajaan (*opzet*), yang oleh pelakunya sesungguhnya disadari, dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*en wetens*) akibatnya yang ditujukan untuk dapat menimbulkan sesuatu akibat hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Dalam hal untuk dapat menentukan adanya “kesengajaan”, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oogmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari “*si pembuat*” tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana, sedangkan menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain si pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya”.





Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4 Ayat (2) bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN"* menurut hemat majelis adalah sama sekali tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN dengan maksud untuk menghindari pemenuhan kewajiban-kewajiban Perpajakan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang menjadi kewajibannya, dengan demikian di dalam SPT tersebut berisi mengenai informasi-informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak seperti pembayaran pajak, objek pajak, harta dan kewajiban, PPN Masukan, PPN Keluaran dan sebagainya, dimana seluruh informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, sedangkan yang dimaksud dengan *"tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut"* adalah sama sekali tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut /atau menyetorkan Pajak yang telah dipotong dan dipungut namun tidak pada tempat resmi yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terhutang, yang berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut, dimana SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya yang jatuh tempo pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja bukan lagi merupakan



pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat daripada perbuatan karena kealpaan yang sifatnya adalah pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo pernah melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang/jasa dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 dengan beberapa perusahaan diantaranya yaitu : PT. Menara Terus Makmur, PT. Mitsuba Indonesia Pipe Parts, PT. Kabaya Indonesia, PT. Megatama Spring, PT. Asahi Denso Indonesia, PT. Minda Automotive Indonesia, PT. Jaya Indah Casting, PT. Bakrie Autoparts, PT. Showa Indonesia Manufacturing, PT. Chandra Nugerah Cemerlang, dan PT. Chandra Nugerah Cipta, dimana perusahaan-perusahaan tersebut telah membayar nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo dari transaksi penjualan atau penyerahan jasa sebesar 10%, dengan cara mentransfer sejumlah dana langsung ke rekening atas nama PT. Gansa Furindo di : Bank BNI Cabang Cikarang akun nomor 3987398733, Bank Artha Graha Cabang Cibarusah Cikarang akun nomor 0921215151 dan Bank BRI Cabang Soekarno Hatta akun nomor 114401000386308.

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo dalam periode masa pajak Januari s/d Desember 2018 telah menerbitkan faktur pajak terhadap penjualan atau penyerahan barang/jasa dengan cara langsung memungut atau memotong PPN dari lawan transaksi dengan total nilai PPN yang dipungut atau dipotong seluruhnya sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang apabila dikelompokkan per Masa Pajak berdasarkan data yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	PPN (Rupiah)
1	Januari 2018	388.061.542
2	Februari 2018	337.245.888
3	Maret 2018	452.267.786
4	April 2018	483.917.715
5	Mei 2018	421.570.023
6	Juni 2018	268.071.832
7	Juli 2018	374.433.680
8	Agustus 2018	417.027.791
9	September 2018	395.904.462
10	Oktober 2018	434.561.637



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	November 2018	375.297.875
12	Desember 2018	302.164.060
	<b>TOTAL</b>	<b>4.650.524.291</b>

Menimbang, bahwa dari total nilai PPN yang sudah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo kepada lawan transaksi dalam pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), namun hanya sebesar Rp.1.622.791.765,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang telah dilaporkan oleh PT. Gansa Furindo ke KPP sebagaimana laporan SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo bulan Agustus, September, Oktober dan November 2018 dengan perincian :

NAMA PEMBELI BKP/JKP	NPWP PEMBELI	Jumlah FP	HARGA JUAL/ DPP	Total PPN
'PT. BAKRIE AUTOPARTS	'010017788431000	1	34.589.000	3.458.900
'PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING	'010022184092000	25	1.354.883.860	135.488.386
'PT. KAYABA Indonesia	'010028322092000	12	2.358.223.650	235.822.365
'PT. MENARA TERUS MAKMUR	'010621050431000	22	3.536.658.900	353.665.890
'PT. HANKEN Indonesia	'010709905055000	2	760.500	76.050
'PT. NAKAKIN Indonesia	'010710507055000	4	50.318.500	5.031.850
'JOTUN Indonesia	'010711745052000		-	-
'PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY	'010813350055000	1	829.120	82.912
'PT. CABININDO PUTRA	'010815801431000	12	1.380.299.360	138.029.936
'PT. JAYA INDAH CASTING	'010847440055000	3	79.517.340	7.951.734
'PT. ASTRA OTOPARTS TBK	'013452438054000	17	497.046.460	49.704.646
'PT. CHANDRA NUGERAH CIPTA	'017137977431000	4	226.474.120	22.647.412
'PT. MEGATAMA SPRING	'018099614431000	4	918.340.100	91.834.010
'YKT GEAR Indonesia	'018693598055000		-	-
'PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS	'018695247055000	10	3.248.167.950	324.816.795
'PT. ASAHI DENSO INDONESIA	'018696195055000	8	1.336.525.370	133.652.537
'PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE	'018696252055000	1	1.454.400	145.440
'PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG	'020488532431000	4	584.554.080	58.455.408
'PT. HONDA TRADING INDONESIA	'021157599059000	1	2.916.250	291.625
'PT. GLOBAL DIMENSI METALINDO	'023561541431000	4	188.130.000	18.813.000
'PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING	'024495533421000	5	174.578.050	17.457.805
'PT. UMEDA FACTORY INDONESIA	'028584993413000	4	39.149.520	3.914.952
'PT. MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA	'314700691431000	9	214.501.120	21.450.112
<b>Total</b>		<b>153</b>	<b>16.227.917.650</b>	<b>1.622.791.765</b>

Halaman 186 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa untuk SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo bulan Januari 2018, telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Bekasi dan telah diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan nilai PPN sebesar Rp.388.061.542,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga terdapat kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah) yang dihitung berdasarkan Nilai PPN yang telah diterbitkan dalam Faktur Pajak dan telah dipungut atau dipotong PPN-nya oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo namun tidak disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk SPT Masa PPN bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut karena awalnya pada tahun 2015 saksi Yohanes secara lisan telah mendelegasikan kewenangannya selaku Direktur Utama kepada Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur dan pendelegasian tersebut dibuat struktur organisasi, dimana dalam menjalankan kewenangannya Saksi Akhmad Indra Wirawan diminta untuk mengontrol Terdakwa PT. Gansa Furindo dengan kewajiban Saksi Akhmad Indra Wirawan untuk memberi laporan kepada sdr. Yohanes, kewenangan dimaksud adalah secara keseluruhan termasuk juga wajib pajak, dimana terkait pajak Saksi Akhmad Indra Wirawan tahu adanya cashflow perusahaan yang tidak mampu menunjang operasional perusahaan, sehingga manajemen harus menentukan prioritas penggunaan dana yang ada untuk tetap dapat menjaga performa perusahaan agar tetap bisa beroperasi dengan harapan penjualan membaik dan cashflow juga bisa membaik, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur yang telah menerima delegasi kewenangan dari sdr. Yohanes selaku Utama dengan inisiatif Saksi Akhmad Indra Wirawan sendiri memutuskan agar PPN sebesar 10% dari nilai DPP yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo kepada lawan transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran ke supplier dan pengeluaran operasional lainnya seperti pembayaran gaji, listrik, dan lain-lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daripada digunakan untuk pembayaran pajak, karena kalau supplier tidak dibayar, otomatis perusahaan tidak akan dapat bahan baku yang akan dipakai dalam pekerjaan pengecatan, hal ini dilakukan Saksi Akhmad Indra Wirawan tanpa sepengetahuan dari sdr. Yohanes sedangkan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur mengetahui uang yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo dari lawan transaksi untuk pembayaran PPN sebesar 10%, harus dilaporkan kepada sdr. Yohanes dan disetorkan serta dibuatkan laporan SPT Masa PPM ke KPP agar tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, akan tetapi Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur tetap memutuskan untuk tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut/dipotong tersebut ke Kas Negara dan tidak membuat /menyampaikan / menyerahkan Laporan SPT Masa PPN periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur "dengan sengaja", terkait tidak disetorkannya PPN yang telah dipungut/dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke Kas Negara dan tidak membuat / menyampaikan / menyerahkan Laporan SPT Masa PPN periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang adalah akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Gansa Furindo melalui Saksi Akhmad Indra Wirawan setelah melihat adanya cashflow yang tidak mampu menunjang operasional sehingga atas inisiatif Saksi Akhmad Indra Wirawan sendiri agar tetap dapat menjaga performa Terdakwa PT. Gansa Furindo supaya tetap bisa beroperasi, Saksi Akhmad Indra Wirawan memutuskan agar PPN sebesar 10% dari nilai DPP yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo kepada lawan transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran ke supplier dan pengeluaran operasional lainnya seperti pembayaran gaji, listrik, dan lain-lain daripada digunakan untuk pembayaran pajak tanpa melaporkan keadaan tersebut kepada sdr. Yohanes, padahal diketahui oleh Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku pengurus sudah paham terkait tugas dan tanggung jawabnya, bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo selaku wakil wajib pajak yang didelegasikan kepadanya adalah suatu kewajiban Terdakwa PT. Gansa Furindo selaku Wajib Pajak Badan untuk melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah

Halaman 188 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipungut/dipotong tersebut agar tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Saksi Akhmad Indra Wirawan yang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut/dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) ke Kas Negara dan tidak membuat /menyampaikan/menyerahkan Laporan SPT Masa PPN periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang adalah ditujukan murni dilakukan untuk kepentingan Terdakwa PT. Gansa Furindo demi menjaga performa Terdakwa PT. Gansa Furindo supaya tetap bisa beroperasi dan tidak ada digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Akhmad Indra Wirawan, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.**

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan Negara pada hakikatnya adalah sebagai bentuk akibat atas perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU KUP, dimana dalam hal ini secara khusus terhadap perbuatan dari wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungutnya ke dalam kas Negara;

Menimbang, bahwa PPN terutang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu atas penyerahan jasa kena pajak yang ditemukan dikalikan 10 % dikurangi dengan kredit pajak. Adapun Dasar Pengenaan Pajak (DPP) secara pasti dapat dicari melalui mekanisme konfirmasi atau permintaan keterangan kepada lawan transaksi yang kemudian dicocokkan nilainya dengan data-data transaksi dari Aplikasi yang terdapat pada Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Nilai DPP yang sudah didapat dapat dikuatkan dengan data uang masuk (sisi kredit) pada Rekening Koran Wajib Pajak. Dengan pengujian baik secara arus uang, dokumen dan barang dapat menjadi dasar yang valid untuk menentukan jumlah penyerahan Wajib Pajak yang terutang PPN. Namun untuk lebih validnya tinggal menghitung berdasarkan nilai PPN dalam Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh Pengguna Jasa atau Lawan transaksi dari Terdakwa PT. Gansa Furindo dalam Seperti Masa PPNnya. Nilai Kerugian pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Negara pada hakikatnya paling sedikit adalah sebesar Nilai PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo yang telah dipungut PPN nya tanpa memperhitungkan faktur pajak masukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa PT. Gansa Furindo dalam periode masa pajak Januari s/d Desember tahun 2018 telah menerbitkan faktur pajak terhadap penjualan atau penyerahan barang/jasa dengan cara langsung memungut atau memotong PPN dari lawan transaksi dengan total nilai PPN yang dipungut atau dipotong seluruhnya sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang apabila dikelompokkan per Masa Pajak berdasarkan data yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	PPN (Rupiah)
1	Januari 2018	388.061.542
2	Februari 2018	337.245.888
3	Maret 2018	452.267.786
4	April 2018	483.917.715
5	Mei 2018	421.570.023
6	Juni 2018	268.071.832
7	Juli 2018	374.433.680
8	Agustus 2018	417.027.791
9	September 2018	395.904.462
10	Oktober 2018	434.561.637
11	November 2018	375.297.875
12	Desember 2018	302.164.060
<b>TOTAL</b>		<b>4.650.524.291</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari total nilai PPN yang sudah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT.Gansa Furindo kepada lawan transaksi dalam pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), namun hanya sebesar Rp.1.622.791.765,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo ke KPP sebagaimana laporan SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo bulan Agustus, September, Oktober dan November 2018 dengan perincian :

NAMA PEMBELI BKP/JKP	NPWP PEMBELI	Jumlah FP	HARGA JUAL/ DPP	Total PPN
'PT. BAKRIE AUTOPARTS	'010017788431000	1	34.589.000	3.458.900
'PT. SHOWA INDONESIA MANUFACTURING	'010022184092000	25	1.354.883.860	135.488.386
'PT. KAYABA Indonesia	'010028322092000	12	2.358.223.650	235.822.365
'PT. MENARA TERUS MAKMUR	'010621050431000	22	3.536.658.900	353.665.890
'PT. HANKEN Indonesia	'010709905055000	2	760.500	76.050
'PT. NAKAKIN Indonesia	'010710507055000	4	50.318.500	5.031.850
'JOTUN Indonesia	'010711745052000		-	-
'PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY	'010813350055000	1	829.120	82.912
'PT. CABININDO PUTRA	'010815801431000	12	1.380.299.360	138.029.936
'PT. JAYA INDAH CASTING	'010847440055000	3	79.517.340	7.951.734
'PT. ASTRA OTOPARTS TBK	'013452438054000	17	497.046.460	49.704.646
'PT. CHANDRA NUGERAHCIPITA	'017137977431000	4	226.474.120	22.647.412
'PT. MEGATAMA SPRING	'018099614431000	4	918.340.100	91.834.010
'YKT GEAR Indonesia	'018693598055000		-	-
'PT. MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS	'018695247055000	10	3.248.167.950	324.816.795
'PT. ASAHI DENSO INDONESIA	'018696195055000	8	1.336.525.370	133.652.537
'PT. MINDA ASEAN AUTOMOTIVE	'018696252055000	1	1.454.400	145.440
'PT. CHANDRA NUGERAH CEMERLANG	'020488532431000	4	584.554.080	58.455.408
'PT. HONDA TRADING INDONESIA	'021157599059000	1	2.916.250	291.625
'PT. GLOBAL DIMENSI METALINDO	'023561541431000	4	188.130.000	18.813.000
'PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING	'024495533421000	5	174.578.050	17.457.805
'PT. UMEDA FACTORY INDONESIA	'028584993413000	4	39.149.520	3.914.952
'PT. MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA	'314700691431000	9	214.501.120	21.450.112
<b>Total</b>		<b>153</b>	<b>16.227.917.650</b>	<b>1.622.791.765</b>

Menimbang, bahwa untuk SPT Masa PPN Terdakwa PT.Gansa Furindo bulan Januari 2018, telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Bekasi dan telah diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan nilai

Halaman 191 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebesar Rp.388.061.542,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka diperoleh kesimpulan Terdakwa PT. Gansa Furindo telah memungut PPN kepada para customer sebagaimana tertulis dalam Faktur Pajak yang telah diterbitkan dari setiap penjualan/penyerahan jasa *painting dan powder coating* dalam periode Januari s.d Desember 2018 seluruhnya sebesar Rp.4.650.524.291,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), namun hanya sebesar Rp.1.622.791.765,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo ke KPP sebagaimana laporan SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo bulan Agustus, September, Oktober dan November 2018, sedangkan Masa Pajak Januari 2018 telah diperiksa oleh KPP Madya Bekasi dan telah diterbitkan SKPKB dengan PPN Rp.388.061.542,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga total yang tidak dilaporkan sebesar Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah) untuk Masa Pajak Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 yang dihitung berdasarkan Nilai PPN yang telah diterbitkan dalam Faktur Pajak dan telah dipungut atau dipotong PPN-nya oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo, namun tidak disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Terdakwa PT. Gansa Furindo sehingga mengakibatkan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Menimbang, bahwa mengenai wakil Wajib Pajak Badan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku juga harus dikaitkan dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal mana yang

Halaman 192 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



dimaksud dengan pengurus perseroan terbatas adalah Direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Menimbang, bahwa Pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi. Bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa “Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan sehingga sesuai dengan pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen. Sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam

Halaman 193 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (Terdakwa)"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut : Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan"

- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.
- Bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana, yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang

Halaman 194 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa apabila ada pihak lain yang membantu melakukan pasal-pasal pidana perpajakan dapat juga dijerat dengan ketentuan tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

Menimbang, bahwa lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor : 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi: "Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"; Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 43 tersebut yaitu : "Ketentuan pidana dibidang perpajakan tidak saja ditujukan kepada diri Wajib Pajak tetapi juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang diberi pelimpahan tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas pada pertimbangan unsur-unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa PT. Gansa Furindo diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pihak-pihak lain mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awal pada tahun 2015 sdr. Yohanes secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan telah mendelegasikan kewenangannya selaku direktur utama kepada Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku direktur dan pendelegasian tersebut dibuat struktur organisasi, dimana dalam menjalankan kewenangannya Saksi Akhmad Indra Wirawan diminta untuk mengontrol PT. Gansa Furindo dengan kewajiban Saksi Akhmad Indra Wirawan untuk memberi laporan kepada sdr. Yohanes, kewenangan dimaksud adalah secara keseluruhan termasuk juga wajib pajak, dimana terkait pajak Saksi Akhmad Indra Wirawan tahu adanya cashflow perusahaan yang tidak mampu menunjang operasional perusahaan, sehingga manajemen harus menentukan prioritas penggunaan dana yang ada untuk tetap dapat menjaga performa perusahaan agar tetap bisa beroperasi dengan harapan penjualan membaik dan cashflow juga bisa membaik, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur yang telah menerima delegasi kewenangan dari sdr. Yohanes selaku Direktur Utama dengan inisiatif Saksi Akhmad Indra Wirawan sendiri memutuskan agar PPN sebesar 10% dari nilai DPP yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo kepada lawan transaksi tersebut digunakan untuk pembayaran ke supplier dan pengeluaran operasional lainnya seperti pembayaran gaji, listrik, dan lain-lain daripada digunakan untuk pembayaran pajak, karena kalau supplier tidak dibayar, otomatis perusahaan tidak akan dapat bahan baku yang akan dipakai dalam pekerjaan pengecatan, hal ini dilakukan Saksi Akhmad Indra Wirawan tanpa sepengetahuan dari sdr. Yohanes sedangkan Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur mengetahui uang yang telah dipungut atau dipotong oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo dari lawan transaksi untuk pembayaran PPN sebesar 10%, harus disetorkan serta dibuatkan laporan SPT Masa PPM ke KPP agar tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, akan tetapi Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku Direktur tetap memutuskan untuk tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut/dipotong tersebut ke Kas Negara dan tidak membuat / menyampaikan / menyerahkan Laporan SPT Masa PPM periode bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dan bulan Desember 2018 ke KPP Madya Bekasi maupun KPP Pratama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa PT. Gansa Furindo melalui Saksi Akhmad Indra Wirawan yang telah memungut pajak dari lawan transaksi namun tidak menyetorkan dan melaporkannya kepada Kantor Pajak merupakan sebuah perbuatan tindak pidana perpajakan dimana perbuatan tersebut terjadi karena Saksi Akhmad Indra Wirawan selaku wakil, kuasa wajib pajak Terdakwa PT. Gansa Furindo

Halaman 196 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi pelimpahan tanggung jawab secara renteng atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan kepadanya telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan Terdakwa PT. Gansa Furindo bukan untuk kepentingan pribadi Saksi Akhmad Indra Wirawan dengan tujuan agar Terdakwa PT. Gansa Furindo tetap bisa beroperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap saksi a de charge yang telah dihadirkan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo oleh karena keterangan saksi a de charge tersebut hanya menerangkan mengenai kepemilikan PT. Gansa Furindo dan mengetahui adanya transaksi didalam perusahaan tersebut serta hanya mengetahui cash flow perusahaan tidak bagus sehingga uang transaksi tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan namun saksi a de charge tidak dilibatkan dalam masalah pajak maka Majelis Hakim berpendapat saksi a de charge yang demikian haruslah dikesampingkan keterangannya dan hanya menjadi pertimbangan yang meringankan untuk Terdakwa PT. Gansa Furindo.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa PT. Gansa Furindo yang pada pokoknya agar membebaskan (*Vrijspreek*) atau melepaskan (*onslag*) Terdakwa PT. Gansa Furindo dari semua tuntutan hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidaklah beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus telah menjawab tentang pledoi Penasehat Hukum Terdakwa PT. Gansa Furindo oleh karenanya permohonan

Halaman 197 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa PT. Gansa Furindo agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa PT. Gansa Furindo (Vrijspraak) dan/atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag) haruslah ditolak dan Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa PT. Gansa Furindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, yang mana sifat penerapannya bersifat kumulatif dengan pidana penjaranya, namun penjatuhan pidana terhadap Korporasi tetap mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 dimana pidana terhadap Korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana denda dan terhadap penentuan besaran dendanya terdapat aturan minimum, dan maksimum khususnya, dimana secara khusus terhadap jumlah nilai dasar denda dalam perkara ini akan didasarkan terhadap keseluruhan jumlah pajak terutang dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak atau kurang dibayar Terdakwa PT. Gansa Furindo, sehingga menjadi kerugian pendapatan negara dalam periode/masa pajak bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Desember 2018 dengan total sejumlah Rp.2.639.670.984,- (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah) (untuk selanjutnya dikalikan paling sedikit 2 (dua) kali, dan paling banyak 4 (empat) kali), yang setelah Majelis Hakim pelajari, dan cermati dengan merelevansikannya pada seluruh fakta persidangan, dan kaitannya dengan bukti-bukti, keterangan ahli perpajakan baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa PT. Gansa Furindo dan/atau Penasihat Hukumnya, laporan tersebut telah memuat secara rinci, dan benar mengenai keseluruhan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo, sehingga terhadap penerapan ataupun penjatuhan pidana dendanya yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini Majelis Hakim mendasarkannya pada alasan-alasan,

Halaman 198 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





dan pertimbangan secara komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa PT. Gansa Furindo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam berkas terpisah atas nama Terdakwa Akhmad Indra Wirawan telah dijatuhkan putusan denda yang sama jumlahnya terkait keseluruhan jumlah pajak terutang dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak atau kurang dibayar Terdakwa PT. Gansa Furindo, sehingga menjadi kerugian pendapatan negara maka untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindari tindakan sewenang-wenang dengan mempertimbangkan kepantasan serta keadilan terhadap kerugian tersebut sehingga terhadap pidana denda tersebut harus dibayar secara tanggung renteng dengan Terdakwa Akhmad Indra Wirawan dan Terdakwa PT. Gansa Furindo;

Menimbang, bahwa walaupun pidana denda tersebut tidak dijelaskan oleh karena pidana denda tersebut adalah merupakan kerugian yang diderita oleh Negara atau merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa PT. Gansa Furindo dimana telah ada beberapa asset milik Terdakwa PT. Gansa Furindo yang telah dilakukan penyitaan dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini maka menurut Majelis Hakim denda tersebut wajib untuk dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa PT. Gansa Furindo tidak bisa membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah
<b>Dokumen PT MENARA TERUS MAKMUR</b>		
1.	Perjanjian Kerjasama (Cooperation Agreement) No Dokumen CA-018/LDPUR/MTM/XIII tanggal 2 Desember 2013	18 Lembar
2.	Daftar pembelian dan faktur pajak PT GANSA FURINDO tahun 2018	100 Lembar
3.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.06.18.MT-0036, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0151/MTM/V/2018, GF/0136/MTM/IV/2018, GF/0142/MTM/V/2018, GF/0139/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	267 Lembar
4.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.07.18.MT-0214, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0171/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	147 Lembar
5.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.07.18.MT.0214, Incoming Documen Receipt, Invoice	172 Lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor:GF/0178/MTM/VI/2018, GF/0182/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	
6.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0211/MTM/VII/2018, GF/0214/MTM/VII/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	136 Lembar
7.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0215/MTM/VII/2018, GF/0217/MTM/VII/2018, GF/0205/MTM/VII/2018, GF/0201/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	257 Lembar
8.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.12.18.MT.0184, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0315/MTM/X/2018, GF/0312/MTM/X/2018, GF/0322/MTM/X/2018, GF/0325/MTM/X/2018, GF/0340/MTM/X/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	310 Lembar
9.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.01.19.MT.0187, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0355/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	80 Lembar
10.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.01.19.MT.0187, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0377/MTM/XII/2018, GF/0377/MTM/XI/2018, GF/0360/MTM/XI/2018, GF/0348/MTM/XI/2018, GF/0350/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	386 Lembar
11.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0003, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0002/MTM/II/2018, GF/0017/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	181 Lembar
12.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0113/MTM/IV/2018, GF/0097/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	178 Lembar
13.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0110/MTM/IV/2018, GF/0101/MTM/IV/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	218 Lembar
14.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0041/MTM/II/2018, GF/0030/MTM/II/2018, GF/0038/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	140 Lembar
15.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0034/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	110 Lembar
16.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.04.18.MT.0057, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0058/MTM/II/2018, GF/0064/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	139 Lembar
<b>Dokumen PT KAYABA INDONESIA</b>		
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Februari 2018	8 lembar

Halaman 200 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
19.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
20.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
21.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	2 lembar
22.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
23.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Maret 2018	6 lembar
24.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
25.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
26.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
27.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak April 2018	5 lembar
28.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
29.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar
30.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
31.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Mei 2018	6 lembar
32.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar
33.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
34.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
35.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
36.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juni 2018	5 lembar
37.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	3 lembar
38.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
39.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juli 2018	5 lembar
40.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
41.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
42.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
43.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Desember 2018	6 lembar
44.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
45.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
46.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
47.	Purchase Agreement (Perjanjian Jual/Beli) antara PT Kayab Indonesia dan PT Gansa Furindo tanggal 29 November 2016	28 lembar
<b>Dokumen PT MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS</b>		
48.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988097 tanggal 28 Feb 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0044 dan Quotation Summary	15 lembar
49.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988114 tanggal 28 Februari 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0061, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
50.	Surat Pemberitahuan (Revisi) Nomor: 011/GF/II/2018 tgl 3 Februari 2018	8 lembar
51.	Surat Jalan Februari 2018	179 lembar
52.	Purchase Order Februari 2018	6 lembar
53.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988142 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0089, dan Purchase Order	18 lembar
54.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988143 tanggal 31 Maret 2018, Purchase	12 lembar

Halaman 201 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0090, Surat Jalan dan Purchase Order	lembar
55.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988152 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0099 dan Surat Jalan	21 lembar
56.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988161 tanggal 15 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0108 dan Tanda Terima Invoice	6 lembar
57.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988183 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0130 dan Tanda Terima Invoice	9 lembar
58.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988184 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0131, Tanda Terima Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
59.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987843 tanggal 25 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0154, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
60.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987854 tanggal 31 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0165 dan Quotation Summary	17 lembar
61.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987877 tanggal 28 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0188, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
62.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987888 tanggal 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0199	9 lembar
63.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987907 tanggal 11 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0219, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar
64.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987919 tanggal 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0231	10 lembar
65.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863985246 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0393, dan Purchase Order	16 lembar
66.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985247 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0394, Surat Jalan dan Purchase Order	14 lembar
<b>Dokumen PT GLOBAL DIMENSI METALINDO</b>		
67.	Bukti Pengeluaran Bank No.45 BK tanggal 6 Juni 2018,Permintaan transfer,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0121/GDM/IV/2018 tanggal 30 April 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63988174 tanggal 30 April 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 007/CDM/XII/17	29 Lembar
68.	Bukti Pengeluaran Bank No.47 BK tanggal 6 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0155/GDM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987844 tanggal 30 Mei 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 016/GDM/VI/18	16 Lembar
69.	Bukti Pengeluaran Bank No.133 BK tanggal 17 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0200/GDM/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987889 tanggal 30 Juni 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 014/GDM/VII/18	15 Lembar
70.	Bukti Pengeluaran Bank No.43 BK tanggal 05 September 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0221/GDM/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987909 tanggal 30 Juli 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 012/GDM/VIII/18	18 Lembar
71.	Bukti Pengeluaran Bank No.35 BK tanggal 12 Februari 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0396/GDM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63985249 tanggal 20 Desember 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 008/GDM/II/19	9 Lembar
<b>Dokumen PT MEGATAMA SPRING</b>		
72.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0027/MS/II/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988080 tgl 31/01/2018,</li><li>• Invoice GF/0376/MS/XI/2018 tanggal 30/11/2018,</li></ul>	51 Lembar

Halaman 202 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



	<ul style="list-style-type: none"><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985229 tgl 30/11/2018,</li><li>Invoice GF/0135/MS/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63988188 tgl 30/04/2018,</li><li>Invoice GF/0166/MS/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63987855 tgl 30/04/2018,</li><li>Invoice GF/0082/MS/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63988135 tgl 31/03/2018,</li><li>Invoice GF/0194/MS/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63987883 tgl 30/06/2018,</li><li>Invoice GF/0225/MS/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63987913 tgl 31/07/2018,</li><li>Invoice GF/0269/MS/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63987957 tgl 31/08/2018,</li><li>Invoice GF/0343/MS/X/2018 tanggal 31/10/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985196 tgl 31/10/2018,</li><li>Invoice GF/0398/MS/XII/2018 tanggal 31/12/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985251 tgl 31/12/2018,</li><li>Invoice GF/0302/MS/IX/2018 tanggal 30/09/2018,</li><li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985155 tgl 30/09/2018,</li></ul>	
73.	1 Set Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 800113856200 yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>Laporan TranTerdakwa bulan Maret 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan April 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Mei 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Juni 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Juli 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Agustus 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan September 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Oktober 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan November 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Desember 2018;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Januari 2019;</li><li>Laporan TranTerdakwa bulan Februari 2019.</li></ul>	12 Lembar
<b>Dokumen PT ASAHI DENSO INDONESIA</b>		
74.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0049/ADI/III/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988102 tgl 28 Februari 2018, Rekap Surat Jalan Feb 2018 dan Nota Pembatalan NP 007/III/2018	12 lembar
75.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0075/ADI/III/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988128 tgl 29 Maret 2018, Rekap Surat Jalan Maret 2018 dan Nota Pembatalan NP 012/III/2018	11 lembar
76.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0115/ADI/IV/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988168 tgl 27 April 2018, Rekap Surat Jalan April 2018 dan Nota Pembatalan NP 017/IV/2018	11 lembar
77.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0160/ADI/V/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987849 tgl 31 Mei 2018, Rekap Surat Jalan Mei 2018 dan Nota Pembatalan NP 021/V/2018	11 lembar
78.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0186/ADI/VI/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987875 tgl 29 Juni 2018, Rekap Surat Jalan Juni 2018 dan Nota Pembatalan NP 026/VI/2018	8 lembar
79.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0230/ADI/VII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987918 tgl 31 Juli 2018, Rekap Surat Jalan Juli 2018 dan Nota	11 lembar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembatalan NP 030/VII/2018	
80.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0390/ADI/XII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63985243 tgl 24 Desember 2018, Rekap Surat Jalan Des 2018 dan Nota Pembatalan NP 057/XII/2018	8 lembar
81.	Fotokopi Rekening Bank Mizuho Indonesia a.n PT ASAHI DENSO INDONESIA Nomor 3058540151 periode Januari s.d Desember 2018	12 lembar
<b>Dokumen PT UMEDA FACTORY INDONESIA</b>		
82.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988105, Invoice No GF/0052/UFI/III/2018, Debit Note 003/DB/UFI/III/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
83.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988138, 010.002-18.63988139, Invoice No GF/0085/UFI/III/2018, GF/0086/UFI/III/2018, Debit Note 005;006/DB/UFI/III/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	8 lembar
84.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988179, Invoice No GF/0126/UFI/IV/2018, Debit Note 007;008/DB/UFI/IV/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	5 lembar
85.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987853, Invoice No GF/0164/UFI/V/2018, Debit Note 012/DB/UFI/V/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
86.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987886, Invoice No GF/0197/UFI/VI/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	3 lembar
87.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987916, Invoice No GF/0228/UFI/VII/2018, Debit Note 017/DB/UFI/VII/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
88.	Faktur Pajak No 010.002-18.63985254, Invoice No GF/0401/UFI/XII/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
<b>Dokumen PT BAKRIE AUTOPARTS</b>		
89.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0025/BA/I/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 011.002-18.63988078 tgl 31/01/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/04/2018;</li><li>• Invoice GF/0046/BA/II/2018 tanggal 28/02/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988099 tgl 28/02/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 18/05/2018;</li><li>• Invoice GF/0083/BA/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988136 tgl 31/03/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 02/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0119/BA/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988172 tgl 30/04/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0169/BA/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987858 tgl 31/05/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/08/2018;</li><li>• Invoice GF/0202/BA/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987891 tgl 30/06/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 01/10/2018;</li><li>• Invoice GF/0237/BA/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987905 tgl 31/07/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 21/06/2019;</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 15/11/2018;</li><li>• Invoice GF/0270/BA/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987958 tgl 31/08/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/02/2020;</li></ul>	25 Lembar
<b>Dokumen PT MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA</b>		
90.	DETAIL PAYMENT TO GANSA, Bukti TranTerdakwa dan SURAT PERINTAH kepada Bank	51 lembar

Halaman 204 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	Invoice No: GF/0125/MAI/IV/2018 tgl 30 April 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	37 lembar
92.	Invoice No: GF/0198/MAI/VI/2018 tgl 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	42 lembar
93.	Invoice No: GF/0208/MAI/VII/2018 tgl 13 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	78 lembar
94.	Invoice No: GF/0229/MAI/VII/2018 tgl 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	99 lembar
95.	Invoice No: GF/0391/MAI/XII/2018 tgl 26 Desember 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	104 lembar
<b>Dokumen TERDAKWA PELAPOR</b>		
96.	1 Set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-8/WPJ.22/2020 tanggal 24 Juli 2020	33 lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAHCIPITA</b>		
97.	Rekap Penjualan ke PT GANSA FURINDO tahun 2018	1 Lembar
98.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 84/3, Invoice GF/0023/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988076	3 Lembar
99.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 40/4, Invoice GF/0043/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988096	3 Lembar
100.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 26/5, Invoice GF/0077/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988130	3 Lembar
101.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 37/6, Invoice GF/0133/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988186	3 Lembar
102.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 70/7, Invoice GF/0157/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987846	3 Lembar
103.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 53/8, Invoice GF/0195/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987884	3 Lembar
104.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 8/9, Invoice GF/0224/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987912	3 Lembar
105.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 2/10, Invoice GF/0257/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987945	3 Lembar
106.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 1/11, Invoice GF/0290/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985143	3 Lembar
107.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 30/12, Invoice GF/0341/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985194	3 Lembar
108.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 17/1, Invoice GF/0362/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985215	3 Lembar
109.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 16/2, Invoice GF/0395/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985248	3 Lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAH CEMERLANG</b>		
110.	Perincian Invoice dan Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO Tahun 2018	1 Lembar
111.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0024/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988077, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	5 Lembar
112.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0042/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988095, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
113.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0078/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988131, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
114.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0129/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988182, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
115.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0156/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987845, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
116.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0189/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987878, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
117.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0220/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987908, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar

Halaman 205 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0262/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987950, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
119.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0291/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985144, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
120.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0342/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985195, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	9 Lembar
121.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0363/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985216, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
122.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0408/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985261, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	4 Lembar
123.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0392/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985245, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
<b>Dokumen NUR EFFENDI (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
124.	Printout Daftar Pajak Keluaran PT GANSA FURINDO Masa 201801 - 201812	14 lembar
125.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
126.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
127.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
128.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak September 2018	7 lembar
129.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Oktober 2018	7 lembar
130.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
131.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
<b>Dokumen NANA MAULANA RAHMAT (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
132.	Nota Penghitungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2017	12 lembar
133.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Desember 2017	19 lembar
134.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Januari 2018	18 lembar
<b>Dokumen PT CABININDO PUTRA</b>		
135.	Invoice (GF/0048/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988101), Bukti Transfer (2708-1), Debit Note (017-DN/CP/II/18)	5 Lembar
136.	Invoice (GF/0060/CP/III/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988113), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
137.	Invoice (GF/0080/CP/III/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988133), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
138.	Invoice (GF/0081/CP/III/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988134), Bukti Transfer (2991-1)	4 Lembar
139.	Invoice (GF/0128/CP/IV/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988181), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
140.	Invoice (GF/0132/CP/IV/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988185), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
141.	Invoice (GF/0158/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987847), Bukti Transfer (3537-1), Surat perubahan no. rekening	4 Lembar
142.	Invoice (GF/0159/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987848), Bukti Transfer (3537-1)	4 Lembar
143.	Invoice (GF/0187/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987876), Bukti Transfer (3671-1)	3 Lembar
144.	Invoice (GF/0193/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987882), Bukti	4 Lembar

Halaman 206 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer (3671-1)	
145.	Invoice (GF/0233/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987921), Bukti Transfer (3978-1)	4 Lembar
146.	Invoice (GF/0234/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987922), Bukti Transfer (3978-1)	3 Lembar
147.	Invoice (GF/0386/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985239), Bukti Transfer (5666-1)	4 Lembar
148.	Invoice (GF/0399/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985252), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
149.	Invoice (GF/0405/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985258), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
<b>Dokumen AKHMAD INDRA WIRAWAN (Direktur PT GANSA FURINDO)</b>		
150.	AKTA tanggal 8 September 1994 Nomor 19 Notaris SUTJIPTO. SH.	1 lembar
151.	AKTA tanggal 8 Mei 2014 Nomor 227 dan AKTA tanggal 12 Mei 2014 Nomor 332 Notaris ROSITA RIANALI SIANIPAR, S.H. M.Kn	1 lembar
152.	AKTA tanggal 07 April 2019 Nomor 01 Notaris INDRA WAHYUDI, S.H., M.Kn	1 lembar
153.	Surat Nomor AHU-AH.01.03-0372582 tanggal 13 Desember 2019 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 2 Notaris WINDA FEBRIANI, S.H., M.Kn.	1 lembar
154.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Desember 2015	1 lembar
155.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Mei 2016	1 lembar
156.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 7 Juni 2016	1 lembar
157.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 5 Februari 2018	1 lembar
158.	Bagan Layout Produksi PT GANSA FURINDO	1 lembar
159.	Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar	5 lembar
160.	Laporan Penjualan Lokal PT GANSA FURINDO Januari s.d Desember 2018	108 lembar
161.	Rekening Bank BNI Cabang JABABEKA Nomor rekening 5555666176 periode tanggal 14/09/2017 s.d 12/09/2018 atas nama PT GANSA FURINDO	12 lembar
162.	Account Statement BNI No. 3987398733 - GANSA FURINDO periode 01 Jan 2018 s.d 31 Des 2018	42 lembar
163.	Rekening Giro Bank Artha Graha International, Tbk. atas nama GANSA FURINDO Nomer Rekening 0921215151 periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018	14 lembar
164.	Laporan TranTerakwa Bank BRI atas nama PT GANSA FURINDO No. Rekening 114401000386308 periode 01/01/18 s.d 31/12/18	47 lembar
165.	SPT Masa PPN tahun 2018 masa pajak Agustus, September, Oktober dan November	46 lembar
166.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
167.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988055 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
168.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988056 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
169.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988057 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
170.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988058 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
171.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988059 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
172.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988060 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
173.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988061 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
174.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988062 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
175.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988063 tanggal 31-JAN-18	2 lembar

Halaman 207 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988064 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
177.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988065 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
178.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988066 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
179.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988067 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
180.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988068 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
181.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988069 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
182.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988070 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
183.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
184.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
185.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988073 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
186.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988074 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
187.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988075 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
188.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988076 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
189.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988077 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
190.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988079 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
191.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988080 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
192.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988081 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
193.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988082 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
194.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988083 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
195.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988078 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
196.	Nota Retur Nomor MAI/2018//09/LOC/S tanggal 02/01/2018	2 lembar
197.	Nota pembatalan Nomor 004/NP//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
198.	Nota pembatalan Nomor 005/NP//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
199.	Nota pembatalan Nomor 006/NP//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
200.	Nota pembatalan Nomor 007/NP//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
201.	Nota retur Nomor 023/NR//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
202.	Nota retur Nomor 024/NR//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
203.	Nota retur Nomor 025/NR//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
204.	Nota retur Nomor 026/NR//2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
205.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988084 tanggal 01-FEB-18	2 lembar
206.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988085 tanggal 08-FEB-18	2 lembar
207.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
208.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988087 tanggal 14-FEB-18	1 lembar
209.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988088 tanggal 14-FEB-18	2 lembar
210.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988089 tanggal 15-FEB-18	1 lembar
211.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988090 tanggal 20-FEB-18	2 lembar
212.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988091 tanggal 22-FEB-18	1 lembar
213.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988092 tanggal 22-FEB-18	2 lembar
214.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988094 tanggal 26-FEB-18	1 lembar

Halaman 208 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988095 tanggal 26-FEB-18	1 lembar
216.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	4 lembar
217.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988096 tanggal 27-FEB-18	1 lembar
218.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988098 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
219.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988099 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
220.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
221.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988101 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
222.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988102 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
223.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988103 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
224.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988104 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
225.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988105 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
226.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988107 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
227.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988108 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
228.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988109 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
229.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988110 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
230.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988111 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
231.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988112 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
232.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988113 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
233.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988114 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
234.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988097 tanggal 28-FEB-18	4 lembar
235.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988106 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
236.	Nota Retur Nomor 048/NR/02/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
237.	Nota Retur Nomor 060/NR/02/2018 tgl 08-FEB-18	1 lembar
238.	Nota Retur Nomor 072/NR/02/2018 tgl 01-FEB-18	1 lembar
239.	Debit Note Nomor MAI/2018/II/05/LOC/S tanggal 01-FEB-18	4 lembar
240.	Nota Pembatalan Nomor NP007/II/2018 tanggal 28-FEB-18	3 lembar
241.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988115 tanggal 01-MAR-18	1 lembar
242.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988116 tanggal 08-MAR-18	2 lembar
243.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988117 tanggal 08-MAR-18	1 lembar
244.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
245.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988119 tanggal 12-MAR-18	1 lembar
246.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988120 tanggal 15-MAR-18	2 lembar
247.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988121 tanggal 15-MAR-18	1 lembar
248.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988122 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
249.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988123 tanggal 22-MAR-18	1 lembar
250.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988124 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
251.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988125 tanggal 22-MAR-18	2 lembar
252.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988126 tanggal 25-MAR-18	1 lembar
253.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar

Halaman 209 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988128 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
255.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988129 tanggal 29-MAR-18	2 lembar
256.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988130 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
257.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988131 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
258.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988132 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
259.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988133 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
260.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988135 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
261.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988136 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
262.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988137 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
263.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988138 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
264.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988139 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
265.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988140 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
266.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988141 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
267.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988143 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
268.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988144 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
269.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988145 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
270.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988146 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
271.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
272.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988148 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
273.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988149 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
274.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988150 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
275.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988151 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
276.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988134 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
277.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988142 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
278.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988152 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
279.	Nota pembatalan Nomor 018/NP/III/2018 tanggal 08-03-18	1 lembar
280.	Nota pembatalan Nomor 019/NP/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
281.	Nota pembatalan Nomor 020/NP/III/2018 tgl 16-03-18	1 lembar
282.	Nota pembatalan nomor 022/NP/III/2018 tgl 27-03-18	1 lembar
283.	Nota Retur Nomor 083/NR/III/2018 tgl 08-03-18	1 lembar
284.	Nota Retur nomor 089/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
285.	Nota retur Nomor 101/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
286.	Nota Retur Nomor 111/NR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018	1 lembar
287.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/07/LOC/S tgl 01-MAR-18	5 lembar
288.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/12/LOC/S tgl 31-03-18	5 lembar
289.	Nota Pembatalan Nomor NP012/III/2018 tanggal 31-03-18	3 lembar
290.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988153 tanggal 05-APR-18	2 lembar
291.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988154 tanggal 10-APR-18	1 lembar
292.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar

Halaman 210 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988156 tanggal 10-APR-18	1 lembar
294.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988157 tanggal 12-APR-18	2 lembar
295.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988158 tanggal 15-APR-18	1 lembar
296.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988160 tanggal 15-APR-18	1 lembar
297.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988161 tanggal 15-APR-18	2 lembar
298.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988159 tanggal 15-APR-18	2 lembar
299.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988162 tanggal 19-APR-18	2 lembar
300.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988163 tanggal 19-APR-18	1 lembar
301.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988164 tanggal 20-APR-18	1 lembar
302.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988165 tanggal 21-APR-18	1 lembar
303.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988166 tanggal 25-APR-18	1 lembar
304.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
305.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988168 tanggal 27-APR-18	3 lembar
306.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988169 tanggal 26-APR-18	2 lembar
307.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988170 tanggal 27-APR-18	1 lembar
308.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988171 tanggal 30-APR-18	1 lembar
309.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988172 tanggal 30-APR-18	1 lembar
310.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988173 tanggal 30-APR-18	1 lembar
311.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988174 tanggal 30-APR-18	1 lembar
312.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988175 tanggal 30-APR-18	1 lembar
313.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988176 tanggal 30-APR-18	1 lembar
314.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988177 tanggal 30-APR-18	1 lembar
315.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988179 tanggal 30-APR-18	1 lembar
316.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988180 tanggal 30-APR-18	2 lembar
317.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988181 tanggal 30-APR-18	2 lembar
318.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988182 tanggal 30-APR-18	1 lembar
319.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988184 tanggal 30-APR-18	1 lembar
320.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988186 tanggal 30-APR-18	1 lembar
321.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
322.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988188 tanggal 30-APR-18	2 lembar
323.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988189 tanggal 30-APR-18	1 lembar
324.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988190 tanggal 29-APR-18	1 lembar
325.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988178 tanggal 30-APR-18	2 lembar
326.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988183 tanggal 30-APR-18	4 lembar
327.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988185 tanggal 30-APR-18	2 lembar
328.	Nota Pembatalan Nomor '023/NP/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
329.	Nota Pembatalan Nomor '024/NP/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar
330.	Nota Pembatalan Nomor '031/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
331.	Nota Pembatalan Nomor '032/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar

Halaman 211 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332.	Nota Pembatalan Nomor '033/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
333.	Nota Pembatalan Nomor '034/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
334.	Nota Pembatalan Nomor '035/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
335.	Nota Retur Nomor '123/NR/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
336.	Nota Retur Nomor '124/NR/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar
337.	Nota Retur Nomor '142/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
338.	Nota Retur Nomor '143/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
339.	Nota Retur Nomor '161/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
340.	Nota Retur Nomor '162/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
341.	Nota Retur Nomor '163/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
342.	Nota Pembatalan Nomor 'NP017/IV/2018 tanggal 30-APR-18	3 lembar
343.	Debit Note No: DN 001/2018 tgl 30-APR-18	1 lembar
344.	Debit Note No: 007/DB/UFI/IV/18 tgl 30-APR-18	3 lembar
345.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987827 tanggal 03-MAY-18	2 lembar
346.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987828 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
347.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar
348.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987830 tanggal 10-MAY-18	2 lembar
349.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987831 tanggal 15-MAY-18	1 lembar
350.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987833 tanggal 16-MAY-18	1 lembar
351.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
352.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987835 tanggal 17-MAY-18	2 lembar
353.	Faktur Pajak Nomor '0710021863987834 tanggal 17-MAY-18	3 lembar
354.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987836 tanggal 20-MAY-18	1 lembar
355.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987837 tanggal 21-MAY-18	1 lembar
356.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987838 tanggal 24-MAY-18	2 lembar
357.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
358.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987840 tanggal 22-MAY-18	1 lembar
359.	Debit Note No: DN 002/2018 tgl 25 mei 2018	1 lembar
360.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987842 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
361.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987843 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
362.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987841 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
363.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987844 tanggal 30-MAY-18	1 lembar
364.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987845 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
365.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987846 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
366.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987847 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
367.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987848 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
368.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987849 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
369.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987850 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
370.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987851 tanggal 31-MAY-18	1 lembar

Halaman 212 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987852 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
372.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987853 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
373.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987855 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
374.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
375.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987857 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
376.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987858 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
377.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987860 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
378.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987861 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
379.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987863 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
380.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987859 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
381.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987854 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
382.	Nota Pembatalan Nomor '039/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
383.	Nota Pembatalan Nomor '041/NP/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
384.	Nota Pembatalan Nomor '042/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
385.	Nota Pembatalan Nomor '044/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
386.	Nota Pembatalan Nomor '045/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
387.	Nota Pembatalan Nomor '046/NP/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
388.	Nota Pembatalan Nomor '047/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
389.	Nota Pembatalan Nomor '048/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
390.	Nota Pembatalan Nomor '049/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
391.	Nota Retur Nomor '172/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
392.	Nota Retur Nomor '188/NR/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
393.	Nota Retur Nomor '189/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
394.	Nota Retur Nomor '206/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
395.	Nota Retur Nomor '207/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
396.	Nota Retur Nomor '208/NR/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
397.	Nota Retur Nomor '226/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
398.	Nota Retur Nomor '227/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
399.	Nota Retur Nomor '228/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
400.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/V/02/LOC/S tanggal 01-MAY-18	3 lembar
401.	Nota Pembatalan Nomor 'NP021/V/2018 tanggal 31-MAY-18	3 lembar
402.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987864 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
403.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987865 tanggal 07-JUN-18	2 lembar
404.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987866 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
405.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987867 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
406.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987869 tanggal 20-JUN-18	1 lembar
407.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987870 tanggal 21-JUN-18	2 lembar
408.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987871 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
409.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987873 tanggal 15-JUN-18	1 lembar

Halaman 213 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987874 tanggal 28-JUN-18	2 lembar
411.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987875 tanggal 29-JUN-18	1 lembar
412.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987876 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
413.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987877 tanggal 28-JUN-18	1 lembar
414.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987878 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
415.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
416.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987880 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
417.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987881 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
418.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987882 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
419.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987883 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
420.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987884 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
421.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987885 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
422.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987886 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
423.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987887 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
424.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987889 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
425.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987890 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
426.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987891 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
427.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987892 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
428.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	6 lembar
429.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987888 tanggal 30-JUN-18	4 lembar
430.	Nota Pembatalan Nomor '053/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
431.	Nota Pembatalan Nomor '054/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
432.	Faktur Pajak Nomor '0700021863987868 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
433.	Nota Retur Nomor '246/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
434.	Nota Retur Nomor '247/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
435.	Faktur Pajak Nomor 'NP026/VI/2018 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
436.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987893 tanggal 05-JUL-18	2 lembar
437.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987894 tanggal 09-JUL-18	2 lembar
438.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
439.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987896 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
440.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987897 tanggal 13-JUL-18	1 lembar
441.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987898 tanggal 14-JUL-18	1 lembar
442.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987899 tanggal 16-JUL-18	1 lembar
443.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987900 tanggal 19-JUL-18	2 lembar
444.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987901 tanggal 19-JUL-18	1 lembar
445.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987902 tanggal 20-JUL-18	1 lembar
446.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987903 tanggal 24-JUL-18	1 lembar
447.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
448.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987905 tanggal 31-JUL-18	1 lembar

Halaman 214 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987906 tanggal 26-JUL-18	2 lembar
450.	Faktur Pajak Nomor 0100021863987907 tanggal 11-JUL-18	1 lembar
451.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987908 tanggal 28-JUL-18	1 lembar
452.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987909 tanggal 30-JUL-18	1 lembar
453.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987910 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
454.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987912 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
455.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987913 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
456.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987914 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
457.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987915 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
458.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987916 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
459.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987917 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
460.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987918 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
461.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987920 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
462.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987921 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
463.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987922 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
464.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987923 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
465.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987924 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
466.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987925 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
467.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987926 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
468.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987927 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
469.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987930 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
470.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987911 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
471.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987919 tanggal 31-JUL-18	4 lembar
472.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/VII/003/LOC/S tanggal 01-JUL-18	7 lembar
473.	Faktur Pajak Nomor 'NP030/VII/2018 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
474.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987928 tanggal 02-AUG-18	2 lembar
475.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987929 tanggal 06-AUG-18	1 lembar
476.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987931 tanggal 04-AUG-18	1 lembar
477.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987932 tanggal 09-AUG-18	2 lembar
478.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987933 tanggal 13-AUG-18	2 lembar
479.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987934 tanggal 14-AUG-18	1 lembar
480.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987935 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
481.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987936 tanggal 15-AUG-18	1 lembar
482.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987937 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
483.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987938 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
484.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987939 tanggal 21-AUG-18	1 lembar
485.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987940 tanggal 23-AUG-18	2 lembar
486.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987941 tanggal 25-AUG-18	2 lembar
487.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987942 tanggal 15-AUG-18	2 lembar

Halaman 215 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987943 tanggal 28-AUG-18	1 lembar
489.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987944 tanggal 29-AUG-18	1 lembar
490.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987945 tanggal 30-AUG-18	1 lembar
491.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987946 tanggal 24-AUG-18	1 lembar
492.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987947 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
493.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987948 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
494.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987950 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
495.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987951 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
496.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987952 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
497.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987953 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
498.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987954 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
499.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987955 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
500.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987956 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
501.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987957 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
502.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987958 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
503.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987959 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
504.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987960 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
505.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987961 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
506.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987962 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
507.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987949 tanggal 31-AUG-18	4 lembar
508.	Nota Pembatalan Nomor 'NP035/VIII/2018 tanggal 31-AUG-18	3 lembar
509.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985129 tanggal 06-SEP-18	1 lembar
510.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985130 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
511.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985131 tanggal 03-SEP-18	1 lembar
512.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985132 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
513.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985133 tanggal 17-SEP-18	1 lembar
514.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985135 tanggal 15-SEP-18	2 lembar
515.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985136 tanggal 20-SEP-18	1 lembar
516.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985137 tanggal 20-SEP-18	2 lembar
517.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985138 tanggal 21-SEP-18	1 lembar
518.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985139 tanggal 22-SEP-18	1 lembar
519.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985140 tanggal 26-SEP-18	2 lembar
520.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985141 tanggal 27-SEP-18	2 lembar
521.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985143 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
522.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985144 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
523.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985146 tanggal 18-SEP-18	1 lembar
524.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985147 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
525.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985148 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
526.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985149 tanggal 30-SEP-18	2 lembar

Halaman 216 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

527.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985150 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
528.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985151 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
529.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985152 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
530.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985153 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
531.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985154 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
532.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985155 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
533.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985156 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
534.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985157 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
535.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985158 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
536.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985159 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
537.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985160 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
538.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985161 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
539.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987963 tanggal 06-SEP-18	2 lembar
540.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985145 tanggal 29-SEP-18	4 lembar
541.	Nota Pembatalan Nomor 'NP041/IX/2018 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
542.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985162 tanggal 01-OCT-18	1 lembar
543.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985163 tanggal 02-OCT-18	1 lembar
544.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985164 tanggal 04-OCT-18	2 lembar
545.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985165 tanggal 09-OCT-18	1 lembar
546.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985166 tanggal 11-OCT-18	3 lembar
547.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985167 tanggal 11-OCT-18	2 lembar
548.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985168 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
549.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985170 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
550.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985172 tanggal 18-OCT-18	2 lembar
551.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985173 tanggal 18-OCT-18	1 lembar
552.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985174 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
553.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985175 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
554.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985176 tanggal 24-OCT-18	2 lembar
555.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985177 tanggal 25-OCT-18	2 lembar
556.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985178 tanggal 29-OCT-18	1 lembar
557.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985179 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
558.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985180 tanggal 25-OCT-18	1 lembar
559.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985182 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
560.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985184 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
561.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985185 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
562.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985186 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
563.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985187 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
564.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985188 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
565.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985189 tanggal 31-OCT-18	2 lembar

Halaman 217 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985190 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
567.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985191 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
568.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985192 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
569.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985193 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
570.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985194 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
571.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985195 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
572.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985196 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
573.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985197 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
574.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985198 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
575.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985200 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
576.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985169 tanggal 16-OCT-18	3 lembar
577.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985171 tanggal 15-OCT-18	2 lembar
578.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985181 tanggal 31-OCT-18	4 lembar
579.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985183 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
580.	Nota Pembatalan Nomor 'NP047/X/2018 tanggal 31-OCT-18	3 lembar
581.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985199 tanggal 01-NOV-18	2 lembar
582.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985201 tanggal 05-NOV-18	1 lembar
583.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985202 tanggal 08-NOV-18	2 lembar
584.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985205 tanggal 15-NOV-18	3 lembar
585.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985206 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
586.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985207 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
587.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985208 tanggal 19-NOV-18	1 lembar
588.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985209 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
589.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985210 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
590.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985211 tanggal 22-NOV-18	2 lembar
591.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985212 tanggal 26-NOV-18	2 lembar
592.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985213 tanggal 28-NOV-18	1 lembar
593.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985214 tanggal 22-NOV-18	1 lembar
594.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985215 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
595.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985216 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
596.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985217 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
597.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985218 tanggal 29-NOV-18	2 lembar
598.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985219 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
599.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985220 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
600.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985221 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
601.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985222 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
602.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985223 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
603.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985224 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
604.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985225 tanggal 30-NOV-18	1 lembar

Halaman 218 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985226 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
606.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985227 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
607.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985228 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
608.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985229 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
609.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985230 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
610.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
611.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985232 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
612.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985203 tanggal 12-NOV-18	2 lembar
613.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985204 tanggal 15-NOV-18	4 lembar
614.	Nota Pembatalan Nomor '096/NP/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
615.	Nota Pembatalan Nomor '097/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
616.	Nota Pembatalan Nomor '098/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
617.	Nota Pembatalan Nomor '103/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
618.	Nota Pembatalan Nomor '105/NP/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
619.	Nota Retur Nomor '453/NR/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
620.	Nota Retur Nomor '459/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
621.	Nota Retur Nomor '460/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
622.	Nota Retur Nomor '465/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
623.	Nota Retur Nomor '482/NR/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
624.	Nota Retur Nomor 'MAI/2018/XI/01/LOC/S tanggal 01-NOV-18	9 lembar
625.	Nota Pembatalan Nomor 'NP052/XI/2018 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
626.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18	1 lembar
627.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18	2 lembar
628.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18	1 lembar
629.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
630.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
631.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18	1 lembar
632.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18	2 lembar
633.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18	1 lembar
634.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18	2 lembar
635.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
636.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985243 tanggal 24-DEC-18	1 lembar
637.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985244 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
638.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985245 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
639.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985247 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
640.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985248 tanggal 27-DEC-18	1 lembar
641.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985249 tanggal 20-DEC-18	1 lembar
642.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985250 tanggal 28-DEC-18	1 lembar
643.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985251 tanggal 31-DEC-18	2 lembar

Halaman 219 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985252 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
645.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985253 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
646.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985254 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
647.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985255 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
648.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985256 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
649.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985257 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
650.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985258 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
651.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985259 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
652.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985260 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
653.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985261 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
654.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985262 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
655.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985246 tanggal 26-DEC-18	4 lembar
656.	Nota Pembatalan Nomor '107/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
657.	Nota Pembatalan Nomor '108/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
658.	Nota Pembatalan Nomor '109/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
659.	Nota Pembatalan Nomor '511/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
660.	Nota Pembatalan Nomor '512/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
661.	Nota Pembatalan Nomor '513/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
662.	Nota Pembatalan Nomor 'NP057/XII/2018 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
663.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	5 lembar
664.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	15 lembar
665.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	47 lembar
666.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	49 lembar
667.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	23 lembar
668.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	13 lembar
669.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	73 lembar
670.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	24 lembar
671.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	33 lembar
672.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	45 lembar
673.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0334/JIC-PP/X/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985187, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 10-2018	6 lembar
674.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0229/JIC-PP/IX/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985152, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 09-2018	8 lembar
675.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0265/JIC-PP/VIII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987953, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 08-2018	11 lembar

Halaman 220 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0226/JIC-PP/VII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987914, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 07-2018	10 lembar
677.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0161/JIC-PP/V/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987850, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 05-2018	9 lembar
678.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0124/JIC-PP/IV/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988177, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 04-2018	9 lembar
679.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0088/JIC-PP/III/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988141, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 03-2018	10 lembar
680.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0055/JIC-PP/II/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988108, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 02-2018	8 lembar
681.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0014/JIC-PP/I/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988067, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 01-2018	6 lembar
682.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-125, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
683.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-126, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
684.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-127, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
685.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-129, Bukti Penerimaan, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	4 Lembar
686.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-130, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
687.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-132, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	82 Lembar
688.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-133, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
689.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-134, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
690.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-135, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
691.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-136, Bukti Pengeluaran	2 Lembar
692.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-170, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
693.	Printout General Ledger A/C:10.01.018 BNI-IDR	2 Lembar
<b>Dokumen PT SHOWA INDONESIA MANUFACTURING</b>		
694.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/025, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Nota Retur, Nota Pembatalan, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0062/SIM/III/2018, Invoice nomor GF/0054/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988115, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak 010.002-18.63988107.	69 Lembar
695.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/019, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0032/SIM/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988085, Surat Jalan, Purchase Order.	27 Lembar

Halaman 221 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/027, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Nota Pembatalan, Nota Retur, Billing Statement, Invoice nomor GF/0063/SIM/III/2018, Nota Kredit, Faktur Pajak 010.002-18.63988116, Surat Jalan, Purchase Order.	37 Lembar
697.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank Of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/021, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0035/SIM/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988088, Surat Jalan, Purchase Order.	27 Lembar
698.	1 Set Dokumen Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO tahun 2018.	106 Lembar
yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Kanwil DJP Jawa Barat;		
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
699.	Painting Equipment Low Temperature. Terdiri dari: - Mesin Conveyor dan dynamo penggerak Merk JOIL, - 1 Mesin Pompa Cat Merk ANZEN, - 1 Panel/Kontrol Mesin, - 2 Ruang Painting dan, - Ruang Oven	1 Set
700.	Sand Blasting Rear Grip Equipment, Merk/Buatan PT KAKAZU INDONESIA serial no. TCH-AS6 700	1 Set
yang merupakan milik Terdakwa PT. Gansa Furindo dan bernilai ekonomis serta karena kesalahan Terdakwa PT. Gansa Furindo tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk digunakan sebagai pembayaran denda;		
<b>Dokumen PT ASTRA OTOPARTS</b>		
701.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Surat Pemberitahuan, Verification Letter, Invoice Nomor GF/0213/AOP/VII/2018, GF/0209/AOP/VI/2018, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak No 010.00218.63987901, 010.00218.63987864, Bukti Transfer, Order Sheet Subcontracting	178 Lembar
702.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Incoming Document Receipt, Invoice nomor GF/0103/AOP/IV/2018, GF/0098/AOP/III/2018, GF/0112/AOP/IV/2018, GF/0095/AOP/III/2018, Berita Acara Sewa Gedung, Service Entry Sheet Acceptance, Purchase Order, Faktur Pajak Nomor 010.00218.63988156, 010.00218.63988151, 010.00218.63988165, 010.00218.63988148, Surat Jalan, Order Sheet Subcontracting	133 Lembar
yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak		

Halaman 222 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



melalui Kanwil DJP Jawa Barat;		
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
703.	Liquid Painting Coating Machine, terdiri dari: a. 1 (satu) Chain Hoist Merk Kito, Tipe Single, Kapasitas 2 Ton, ukuran 17.2 m P x 6 m L, hanger isi 30 pcs; b. 1 (satu) Air Blow; c. 1 (satu) Painting Liquid Merk Kakazu Indonesia, Tipe PCN-TM-250, ukuran 360 cm P x 245 cm L x 215 cm T dengan motor listrik 640 watt dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) Spray Gun Merk Anzen, Tipe DP-3</li><li>1 (satu) Blower dengan motor listrik 5.5 HP dan cerobong asap 25 m P x diameter 60 cm</li><li>1 (satu) Backing Oven ukuran 420 cm P x 290 cm L x 150 cm T, dengan motor listrik 2 x 1.5 HP dan 1 (satu) Conveyer Jig ukuran 2500 cm P</li></ul> d. Panel control	1 Set
yang merupakan milik Terdakwa PT. Gansa Furindo dan bernilai ekonomis serta karena kesalahan Terdakwa PT. Gansa Furindo tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk digunakan sebagai pembayaran denda;		
<b>Dokumen ELYSA ROSITA (Staf Accounting dan Pajak PT GANSA DURINDO)</b>		
704.	1 set Rekening Koran Bank BII cabang KK Lippo Cikarang nomor 2-246-000433 atas nama PT GANSA FURINDO	9 Lembar
705.	General Ledger A/C: 10.01.018 BNI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	12 Lembar
706.	General Ledger A/C: 10.01.017 ARTHA GRAHA BANK-IDR Periode 1 Oktober 2017 to 31 Desember 2019	8 Lembar
707.	General Ledger A/C: 10.01.019 BRI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	21 Lembar
yang sudah tidak diperlukan lagi untuk pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Kanwil DJP Jawa Barat;		

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa PT. Gansa Furindo tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang menggiatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak;
- Perbuatan Terdakwa PT. Gansa Furindo telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara yang nilainya yaitu Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar





enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah);

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa PT. Gansa Furindo melalui sdr. Yohanes Susetyo Muhandoko selaku Direktur Utama PT. Gansa Furindo berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa PT. Gansa Furindo telah membayar sebagian pajak terhutang tersebut;
- Terdakwa PT. Gansa Furindo belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa PT. Gansa Furindo** dalam hal ini Korporasi diwakili oleh Yohanes Susatyo Muhandoko selaku Direktur Utama PT. Gansa Furindo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PT. Gansa Furindo** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **2 (dua) x Rp.2.639.670.984,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan empat rupiah) = Rp.5.279.341.968,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah)** dibayar secara tanggung renteng dengan Terdakwa Akhmad Indra Wirawan, jika Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gansa Furindo tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Nama Barang Bukti	Jumlah
<b>Dokumen PT MENARA TERUS MAKMUR</b>		
1.	Perjanjian Kerjasama ( <i>Cooperation Agreement</i> ) No Dokumen CA-018/LDPUR/MTM/XIII tanggal 2 Desember 2013	18 Lembar
2.	Daftar pembelian dan faktur pajak PT GANSA FURINDO tahun 2018	100 Lembar
3.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.06.18.MT-0036, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0151/MTM/V/2018, GF/0136/MTM/IV/2018, GF/0142/MTM/V/2018, GF/0139/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	267 Lembar
4.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.07.18.MT-0214, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0171/MTM/V/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	147 Lembar
5.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.07.18.MT.0214, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0178/MTM/VI/2018, GF/0182/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	172 Lembar
6.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0211/MTM/VII/2018, GF/0214/MTM/VII/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	136 Lembar
7.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.08.18.MT.0118, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor:GF/0215/MTM/VII/2018, GF/0217/MTM/VII/2018, GF/0205/MTM/VII/2018, GF/0201/MTM/VI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	257 Lembar
8.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.12.18.MT.0184, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0315/MTM/X/2018, GF/0312/MTM/X/2018, GF/0322/MTM/X/2018, GF/0325/MTM/X/2018, GF/0340/MTM/X/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	310 Lembar
9.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-2.01.19.MT.0187, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0355/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	80 Lembar
10.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.01.19.MT.0187, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0377/MTM/XII/2018, GF/0377/MTM/XI/2018, GF/0360/MTM/XI/2018, GF/0348/MTM/XI/2018, GF/0350/MTM/XI/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	386 Lembar
11.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0003, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0002/MTM/II/2018, GF/0017/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	181 Lembar

Halaman 225 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



12.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0113/MTM/IV/2018, GF/0097/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	178 Lembar
13.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.05.18.MT.0150, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0110/MTM/IV/2018, GF/0101/MTM/IV/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	218 Lembar
14.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0041/MTM/III/2018, GF/0030/MTM/I/2018, GF/0038/MTM/II/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	140 Lembar
15.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.03.18.MT.0121, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0034/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	110 Lembar
16.	1 set dokumen pembelian yang terdiri dari Documen Checklist No. DC-D2.04.18.MT.0057, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor: GF/0058/MTM/III/2018, GF/0064/MTM/III/2018, Surat Jalan, Goods receipt From Supplier, Purchase Order, Faktur Pajak.	139 Lembar
<b>Dokumen PT KAYABA INDONESIA</b>		
17.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Februari 2018	8 lembar
18.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
19.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
20.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
21.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	2 lembar
22.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
23.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Maret 2018	6 lembar
24.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
25.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
26.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
27.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak April 2018	5 lembar
28.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
29.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar
30.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
31.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Mei 2018	6 lembar
32.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar
33.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
34.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
35.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
36.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juni 2018	5 lembar
37.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	3 lembar
38.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Juli 2018	5 lembar
40.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
41.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
42.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
43.	1 (satu) set SPT Masa PPN PT. KAYABA INDONESIA masa pajak Desember 2018	6 lembar
44.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
45.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
46.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
47.	Purchase Agreement (Perjanjian Jual/Beli) antara PT Kayab Indonesia dan PT Gansa Furindo tanggal 29 November 2016	28 lembar
<b>Dokumen PT MITSUBA INDONESIA PIPE PARTS</b>		
48.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988097 tanggal 28 Feb 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0044 dan Quotation Summary	15 lembar
49.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988114 tanggal 28 Februari 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0061, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
50.	Surat Pemberitahuan (Revisi) Nomor: 011/GF/II/2018 tgl 3 Februari 2018	8 lembar
51.	Surat Jalan Februari 2018	179 lembar
52.	Purchase Order Februari 2018	6 lembar
53.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988142 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0089, dan Purchase Order	18 lembar
54.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988143 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0090, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar
55.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988152 tanggal 31 Maret 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0099 dan Surat Jalan	21 lembar
56.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988161 tanggal 15 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0108 dan Tanda Terima Invoice	6 lembar
57.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863988183 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0130 dan Tanda Terima Invoice	9 lembar
58.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863988184 tanggal 30 April 2018, Purchase Voucher, Invoice GF/0131, Tanda Terima Invoice, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
59.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987843 tanggal 25 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0154, Surat Jalan dan Purchase Order	15 lembar
60.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987854 tanggal 31 Mei 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0165 dan Quotation Summary	17 lembar
61.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987877 tanggal 28 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0188, Surat Jalan dan Purchase Order	13 lembar
62.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987888 tanggal 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0199	9 lembar
63.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863987907 tanggal 11 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0219, Surat Jalan dan Purchase Order	12 lembar

Halaman 227 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Faktur Pajak Nomor Seri '0110021863987919 tanggal 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, dan Invoice GF/0231	10 lembar
65.	Faktur Pajak Nomor Seri "0110021863985246 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0393, dan Purchase Order	16 lembar
66.	Faktur Pajak Nomor Seri '0100021863985247 tanggal 26 Des 2018, Purchase Voucher, Tanda Terima Invoice, Invoice GF/0394, Surat Jalan dan Purchase Order	14 lembar
<b>Dokumen PT GLOBAL DIMENSI METALINDO</b>		
67.	Bukti Pengeluaran Bank No.45 BK tanggal 6 Juni 2018,Permintaan transfer,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0121/GDM/IV/2018 tanggal 30 April 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63988174 tanggal 30 April 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 007/CDM/XII/17	29 Lembar
68.	Bukti Pengeluaran Bank No.47 BK tanggal 6 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0155/GDM/V/2018 tanggal 30 Mei 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987844 tanggal 30 Mei 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 016/GDM/VI/18	16 Lembar
69.	Bukti Pengeluaran Bank No.133 BK tanggal 17 Juli 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0200/GDM/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-18.63987889 tanggal 30 Juni 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 014/GDM/VII/18	15 Lembar
70.	Bukti Pengeluaran Bank No.43 BK tanggal 05 September 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0221/GDM/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63987909 tanggal 30 Juli 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 012/GDM/VIII/18	18 Lembar
71.	Bukti Pengeluaran Bank No.35 BK tanggal 12 Februari 2018, Permintaan transfer ,Tanda Terima Invoice,Invoice nomor GF/0396/GDM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018,Faktur Pajak kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.63985249 tanggal 20 Desember 2018,Surat Jalan,Rincian Surat Jalan,Purchase Order No: 008/GDM/I/19	9 Lembar
<b>Dokumen PT MEGATAMA SPRING</b>		
72.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0027/MS/I/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988080 tgl 31/01/2018,</li><li>• Invoice GF/0376/MS/XI/2018 tanggal 30/11/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63985229 tgl 30/11/2018,</li><li>• Invoice GF/0135/MS/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988188 tgl 30/04/2018,</li><li>• Invoice GF/0166/MS/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987855 tgl 30/04/2018,</li><li>• Invoice GF/0082/MS/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988135 tgl 31/03/2018,</li><li>• Invoice GF/0194/MS/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987883 tgl 30/06/2018,</li><li>• Invoice GF/0225/MS/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987913 tgl 31/07/2018,</li><li>• Invoice GF/0269/MS/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li></ul>	51 Lembar

Halaman 228 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faktur Pajak 010.002-18. 63987957 tgl 31/08/2018,</li> <li>Invoice GF/0343/MS/X/2018 tanggal 31/10/2018,</li> <li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985196 tgl 31/10/2018,</li> <li>Invoice GF/0398/MS/XII/2018 tanggal 31/12/2018,</li> <li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985251 tgl 31/12/2018,</li> <li>Invoice GF/0302/MS/IX/2018 tanggal 30/09/2018,</li> <li>Faktur Pajak 010.002-18. 63985155 tgl 30/09/2018,</li> </ul>	
73.	<p>1 Set Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga nomor rekening 800113856200 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Maret 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan April 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Mei 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Juni 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Juli 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Agustus 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan September 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Oktober 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan November 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Desember 2018;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Januari 2019;</li> <li>Laporan TranTerdakwa bulan Februari 2019.</li> </ul>	12 Lembar
<b>Dokumen PT ASAHI DENSO INDONESIA</b>		
74.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0049/ADI/II/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988102 tgl 28 Februari 2018, Rekap Surat Jalan Feb 2018 dan Nota Pembatalan NP 007/II/2018	12 lembar
75.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0075/ADI/III/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988128 tgl 29 Maret 2018, Rekap Surat Jalan Maret 2018 dan Nota Pembatalan NP 012/III/2018	11 lembar
76.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0115/ADI/IV/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63988168 tgl 27 April 2018, Rekap Surat Jalan April 2018 dan Nota Pembatalan NP 017/IV/2018	11 lembar
77.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0160/ADI/V/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987849 tgl 31 Mei 2018, Rekap Surat Jalan Mei 2018 dan Nota Pembatalan NP 021/V/2018	11 lembar
78.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0186/ADI/VI/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987875 tgl 29 Juni 2018, Rekap Surat Jalan Juni 2018 dan Nota Pembatalan NP 026/VI/2018	8 lembar
79.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0230/ADI/VII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63987918 tgl 31 Juli 2018, Rekap Surat Jalan Juli 2018 dan Nota Pembatalan NP 030/VII/2018	11 lembar
80.	Bank Payment Slip, Invoice No: GF/0390/ADI/XII/2018, Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.63985243 tgl 24 Desember 2018, Rekap Surat Jalan Des 2018 dan Nota Pembatalan NP 057/XII/2018	8 lembar
81.	Fotokopi Rekening Bank Mizuho Indonesia a.n PT ASAHI DENSO INDONESIA Nomor 3058540151 periode Januari s.d Desember 2018	12 lembar
<b>Dokumen PT UMEDA FACTORY INDONESIA</b>		
82.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988105, Invoice No GF/0052/UF/II/2018, Debit Note 003/DB/UF/II/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
83.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988138, 010.002-18.63988139, Invoice No GF/0085/UF/III/2018, GF/0086/UF/III/2018, Debit Note 005/006/DB/UF/III/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	8 lembar
84.	Faktur Pajak No 010.002-18.63988179, Invoice No GF/0126/UF/IV/2018,	5 lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Debit Note 007;008/DB/UF/IV/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	
85.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987853, Invoice No GF/0164/UF/IV/2018, Debit Note 012/DB/UF/IV/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
86.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987886, Invoice No GF/0197/UF/VI/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	3 lembar
87.	Faktur Pajak No 010.002-18.63987916, Invoice No GF/0228/UF/VII/2018, Debit Note 017/DB/UF/VII/18, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
88.	Faktur Pajak No 010.002-18.63985254, Invoice No GF/0401/UF/XII/2018, Bukti pembayaran (histori tranTerdakwa )	4 lembar
<b>Dokumen PT BAKRIE AUTOPARTS</b>		
89.	Dokumen Pembelian yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• Invoice GF/0025/BA/I/2018 tanggal 31/01/2018,</li><li>• Faktur Pajak 011.002-18.63988078 tgl 31/01/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/04/2018;</li><li>• Invoice GF/0046/BA/II/2018 tanggal 28/02/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988099 tgl 28/02/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 18/05/2018;</li><li>• Invoice GF/0083/BA/III/2018 tanggal 31/03/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18.63988136 tgl 31/03/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 02/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0119/BA/IV/2018 tanggal 30/04/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63988172 tgl 30/04/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 16/07/2018;</li><li>• Invoice GF/0169/BA/V/2018 tanggal 31/05/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987858 tgl 31/05/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/08/2018;</li><li>• Invoice GF/0202/BA/VI/2018 tanggal 30/06/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987891 tgl 30/06/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 01/10/2018;</li><li>• Invoice GF/0237/BA/VII/2018 tanggal 31/07/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987905 tgl 31/07/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 21/06/2019;</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 15/11/2018;</li><li>• Invoice GF/0270/BA/VIII/2018 tanggal 31/08/2018,</li><li>• Faktur Pajak 010.002-18. 63987958 tgl 31/08/2018,</li><li>• Notifikasi TranTerdakwa Bank BNI norek 0845555554 tgl 27/02/2020;</li></ul>	25 Lembar
<b>Dokumen PT MINDA AUTOMOTIVE INDONESIA</b>		
90.	DETAIL PAYMENT TO GANSA, Bukti TranTerdakwa dan SURAT PERINTAH kepada Bank	51 lembar
91.	Invoice No: GF/0125/MAI/IV/2018 tgl 30 April 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	37 lembar
92.	Invoice No: GF/0198/MAI/VI/2018 tgl 30 Juni 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	42 lembar
93.	Invoice No: GF/0208/MAI/VII/2018 tgl 13 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	78 lembar
94.	Invoice No: GF/0229/MAI/VII/2018 tgl 31 Juli 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	99 lembar
95.	Invoice No: GF/0391/MAI/XII/2018 tgl 26 Desember 2018, Purchase Voucher, Faktur Pajak, Purchase Order, Surat Jalan dan Store Receiving Voucher	104 lembar
<b>Dokumen TERDAKWA PELAPOR</b>		
96.	1 Set Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-8/WPJ.22/2020	33

Halaman 230 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



tanggal 24 Juli 2020		lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAH CIPTA</b>		
97.	Rekap Penjualan ke PT GANSA FURINDO tahun 2018	1 Lembar
98.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 84/3, Invoice GF/0023/CNC/I/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988076	3 Lembar
99.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 40/4, Invoice GF/0043/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988096	3 Lembar
100.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 26/5, Invoice GF/0077/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988130	3 Lembar
101.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 37/6, Invoice GF/0133/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988186	3 Lembar
102.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 70/7, Invoice GF/0157/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987846	3 Lembar
103.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 53/8, Invoice GF/0195/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987884	3 Lembar
104.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 8/9, Invoice GF/0224/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987912	3 Lembar
105.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 2/10, Invoice GF/0257/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987945	3 Lembar
106.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 1/11, Invoice GF/0290/CNC/IX/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985143	3 Lembar
107.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 30/12, Invoice GF/0341/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985194	3 Lembar
108.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 17/1, Invoice GF/0362/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985215	3 Lembar
109.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Bukti Pengeluaran Bank BKN 16/2, Invoice GF/0395/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985248	3 Lembar
<b>Dokumen PT CHANDRA NUGERAH CEMERLANG</b>		
110.	Perincian Invoice dan Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO Tahun 2018	1 Lembar
111.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0024/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988077, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	5 Lembar
112.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0042/CNC/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988095, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
113.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0078/CNC/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988131, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
114.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0129/CNC/IV/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988182, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
115.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0156/CNC/V/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987845, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
116.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0189/CNC/VI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987878, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
117.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0220/CNC/VII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987908, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
118.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0262/CNC/VIII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63987950, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	7 Lembar
119.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0291/CNC/IX/2018,	7 Lembar



	Faktur Pajak 010.002-18.63985144, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	
120.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0342/CNC/X/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985195, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	9 Lembar
121.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0363/CNC/XI/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985216, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	6 Lembar
122.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0408/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985261, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	4 Lembar
123.	1 Set Dokumen Pembelian yang terdiri dari Invoice GF/0392/CNC/XII/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63985245, Pesanan Pembelian dan Bukti Pengeluaran Bank	8 Lembar
<b>Dokumen NUR EFFENDI (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
124.	Printout Daftar Pajak Keluaran PT GANSA FURINDO Masa 201801 - 201812	14 lembar
125.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
126.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
127.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-2 PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2018	7 lembar
128.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak September 2018	7 lembar
129.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak Oktober 2018	7 lembar
130.	Printout SPT Masa PPN Normal PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
131.	Printout SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 PT GANSA FURINDO masa pajak November 2018	7 lembar
<b>Dokumen NANA MAULANA RAHMAT (ACCOUNT REPRESENTATIVE)</b>		
132.	Nota Penghitungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Agustus 2017	12 lembar
133.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Desember 2017	19 lembar
134.	Nota Penghitungan, SKPKB dan Laporan Hasil Pemeriksaan PT GANSA FURINDO masa pajak Januari 2018	18 lembar
<b>Dokumen PT CABININDO PUTRA</b>		
135.	Invoice (GF/0048/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988101), Bukti Transfer (2708-1), Debit Note (017-DN/CP/III/18)	5 Lembar
136.	Invoice (GF/0060/CP/II/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988113), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
137.	Invoice (GF/0080/CP/III/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988133), Bukti Transfer (2991-1)	3 Lembar
138.	Invoice (GF/0081/CP/III/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988134), Bukti Transfer (2991-1)	4 Lembar
139.	Invoice (GF/0128/CP/IV/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63988181), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
140.	Invoice (GF/0132/CP/IV/2018), Faktur Pajak (011.002-18.63988185), Bukti Transfer (3183-1)	4 Lembar
141.	Invoice (GF/0158/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987847), Bukti Transfer (3537-1), Surat perubahan no. rekening	4 Lembar
142.	Invoice (GF/0159/CP/V/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987848), Bukti Transfer (3537-1)	4 Lembar
143.	Invoice (GF/0187/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987876), Bukti	3 Lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer (3671-1)	
144.	Invoice (GF/0193/CP/VI/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987882), Bukti Transfer (3671-1)	4 Lembar
145.	Invoice (GF/0233/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987921), Bukti Transfer (3978-1)	4 Lembar
146.	Invoice (GF/0234/CP/VII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63987922), Bukti Transfer (3978-1)	3 Lembar
147.	Invoice (GF/0386/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985239), Bukti Transfer (5666-1)	4 Lembar
148.	Invoice (GF/0399/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985252), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
149.	Invoice (GF/0405/CP/XII/2018), Faktur Pajak (010.002-18.63985258), Bukti Transfer (5812-1 & 5915-1), Surat Pernyataan (027/GF/XI/2018)	5 Lembar
<b>Dokumen AKHMAD INDRA WIRAWAN (Direktur PT GANSA FURINDO)</b>		
150.	AKTA tanggal 8 September 1994 Nomor 19 Notaris SUTJIPTO. SH.	1 lembar
151.	AKTA tanggal 8 Mei 2014 Nomor 227 dan AKTA tanggal 12 Mei 2014 Nomor 332 Notaris ROSITA RIANAU LI SIANIPAR, S.H. M.Kn	1 lembar
152.	AKTA tanggal 07 April 2019 Nomor 01 Notaris INDRA WAHYUDI, S.H., M.Kn	1 lembar
153.	Surat Nomor AHU-AH.01.03-0372582 tanggal 13 Desember 2019 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 2 Notaris WINDA FEBRIANI, S.H., M.Kn.	1 lembar
154.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Desember 2015	1 lembar
155.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 1 Mei 2016	1 lembar
156.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 7 Juni 2016	1 lembar
157.	Struktur Organisasi Perusahaan PT GANSA FURINDO, berlaku mulai 5 Februari 2018	1 lembar
158.	Bagan Layout Produksi PT GANSA FURINDO	1 lembar
159.	Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Surat Keterangan Terdaftar	5 lembar
160.	Laporan Penjualan Lokal PT GANSA FURINDO Januari s.d Desember 2018	108 lembar
161.	Rekening Bank BNI Cabang JABABEKA Nomor rekening 5555666176 periode tanggal 14/09/2017 s.d 12/09/2018 atas nama PT GANSA FURINDO	12 lembar
162.	Account Statement BNI No. 3987398733 - GANSA FURINDO periode 01 Jan 2018 s.d 31 Des 2018	42 lembar
163.	Rekening Giro Bank Artha Graha International, Tbk. atas nama GANSA FURINDO Nomer Rekening 0921215151 periode 01/01/2018 s.d 31/03/2018	14 lembar
164.	Laporan TranTerdakwa Bank BRI atas nama PT GANSA FURINDO No. Rekening 114401000386308 periode 01/01/18 s.d 31/12/18	47 lembar
165.	SPT Masa PPN tahun 2018 masa pajak Agustus, September, Oktober dan November	46 lembar
166.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988054 tanggal 31-JAN-18	3 lembar
167.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988055 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
168.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988056 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
169.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988057 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
170.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988058 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
171.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988059 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
172.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988060 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
173.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988061 tanggal 31-JAN-18	1 lembar

Halaman 233 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988062 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
175.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988063 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
176.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988064 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
177.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988065 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
178.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988066 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
179.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988067 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
180.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988068 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
181.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988069 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
182.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988070 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
183.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988071 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
184.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988072 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
185.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988073 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
186.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988074 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
187.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988075 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
188.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988076 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
189.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988077 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
190.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988079 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
191.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988080 tanggal 31-JAN-18	2 lembar
192.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988081 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
193.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988082 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
194.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988083 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
195.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988078 tanggal 31-JAN-18	1 lembar
196.	Nota Retur Nomor MAI/2018/II/09/LOC/S tanggal 02/01/2018	2 lembar
197.	Nota pembatalan Nomor 004/NP/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
198.	Nota pembatalan Nomor 005/NP/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
199.	Nota pembatalan Nomor 006/NP/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
200.	Nota pembatalan Nomor 007/NP/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
201.	Nota retur Nomor 023/NR/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
202.	Nota retur Nomor 024/NR/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
203.	Nota retur Nomor 025/NR/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
204.	Nota retur Nomor 026/NR/II/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
205.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988084 tanggal 01-FEB-18	2 lembar
206.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988085 tanggal 08-FEB-18	2 lembar
207.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988086 tanggal 14-FEB-18	3 lembar
208.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988087 tanggal 14-FEB-18	1 lembar
209.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988088 tanggal 14-FEB-18	2 lembar
210.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988089 tanggal 15-FEB-18	1 lembar
211.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988090 tanggal 20-FEB-18	2 lembar
212.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988091 tanggal 22-FEB-18	1 lembar

Halaman 234 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988092 tanggal 22-FEB-18	2 lembar
214.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988094 tanggal 26-FEB-18	1 lembar
215.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988095 tanggal 26-FEB-18	1 lembar
216.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988093 tanggal 26-FEB-18	4 lembar
217.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988096 tanggal 27-FEB-18	1 lembar
218.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988098 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
219.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988099 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
220.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988100 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
221.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988101 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
222.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988102 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
223.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988103 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
224.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988104 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
225.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988105 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
226.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988107 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
227.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988108 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
228.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988109 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
229.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988110 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
230.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988111 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
231.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988112 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
232.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988113 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
233.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988114 tanggal 28-FEB-18	1 lembar
234.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988097 tanggal 28-FEB-18	4 lembar
235.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988106 tanggal 28-FEB-18	2 lembar
236.	Nota Retur Nomor 048/NR/02/2018 tgl 31-JAN-18	1 lembar
237.	Nota Retur Nomor 060/NR/02/2018 tgl 08-FEB-18	1 lembar
238.	Nota Retur Nomor 072/NR/02/2018 tgl 01-FEB-18	1 lembar
239.	Debit Note Nomor MAI/2018/II/05/LOC/S tanggal 01-FEB-18	4 lembar
240.	Nota Pembatalan Nomor NP007/II/2018 tanggal 28-FEB-18	3 lembar
241.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988115 tanggal 01-MAR-18	1 lembar
242.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988116 tanggal 08-MAR-18	2 lembar
243.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988117 tanggal 08-MAR-18	1 lembar
244.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988118 tanggal 10-MAR-18	2 lembar
245.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988119 tanggal 12-MAR-18	1 lembar
246.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988120 tanggal 15-MAR-18	2 lembar
247.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988121 tanggal 15-MAR-18	1 lembar
248.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988122 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
249.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988123 tanggal 22-MAR-18	1 lembar
250.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988124 tanggal 21-MAR-18	1 lembar
251.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988125 tanggal 22-MAR-18	2 lembar

Halaman 235 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988126 tanggal 25-MAR-18	1 lembar
253.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988127 tanggal 26-MAR-18	3 lembar
254.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988128 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
255.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988129 tanggal 29-MAR-18	2 lembar
256.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988130 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
257.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988131 tanggal 29-MAR-18	1 lembar
258.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988132 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
259.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988133 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
260.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988135 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
261.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988136 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
262.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988137 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
263.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988138 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
264.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988139 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
265.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988140 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
266.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988141 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
267.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988143 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
268.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988144 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
269.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988145 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
270.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988146 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
271.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988147 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
272.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988148 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
273.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988149 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
274.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988150 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
275.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988151 tanggal 31-MAR-18	1 lembar
276.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988134 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
277.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988142 tanggal 31-MAR-18	2 lembar
278.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988152 tanggal 31-MAR-18	4 lembar
279.	Nota pembatalan Nomor 018/NP/III/2018 tanggal 08-03-18	1 lembar
280.	Nota pembatalan Nomor 019/NP/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
281.	Nota pembatalan Nomor 020/NP/III/2018 tgl 16-03-18	1 lembar
282.	Nota pembatalan nomor 022/NP/III/2018 tgl 27-03-18	1 lembar
283.	Nota Retur Nomor 083/NR/III/2018 tgl 08-03-18	1 lembar
284.	Nota Retur nomor 089/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
285.	Nota retur Nomor 101/NR/III/2018 tgl 15-03-18	1 lembar
286.	Nota Retur Nomor 111/NR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018	1 lembar
287.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/07/LOC/S tgl 01-MAR-18	5 lembar
288.	Nota Retur Nomor MAI/2018/III/12/LOC/S tgl 31-03-18	5 lembar
289.	Nota Pembatalan Nomor NP012/III/2018 tanggal 31-03-18	3 lembar
290.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988153 tanggal 05-APR-18	2 lembar

Halaman 236 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988154 tanggal 10-APR-18	1 lembar
292.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988155 tanggal 10-APR-18	2 lembar
293.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988156 tanggal 10-APR-18	1 lembar
294.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988157 tanggal 12-APR-18	2 lembar
295.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988158 tanggal 15-APR-18	1 lembar
296.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988160 tanggal 15-APR-18	1 lembar
297.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988161 tanggal 15-APR-18	2 lembar
298.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988159 tanggal 15-APR-18	2 lembar
299.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988162 tanggal 19-APR-18	2 lembar
300.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988163 tanggal 19-APR-18	1 lembar
301.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988164 tanggal 20-APR-18	1 lembar
302.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988165 tanggal 21-APR-18	1 lembar
303.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988166 tanggal 25-APR-18	1 lembar
304.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988167 tanggal 25-APR-18	3 lembar
305.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988168 tanggal 27-APR-18	3 lembar
306.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988169 tanggal 26-APR-18	2 lembar
307.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988170 tanggal 27-APR-18	1 lembar
308.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988171 tanggal 30-APR-18	1 lembar
309.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988172 tanggal 30-APR-18	1 lembar
310.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988173 tanggal 30-APR-18	1 lembar
311.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988174 tanggal 30-APR-18	1 lembar
312.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988175 tanggal 30-APR-18	1 lembar
313.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988176 tanggal 30-APR-18	1 lembar
314.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988177 tanggal 30-APR-18	1 lembar
315.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988179 tanggal 30-APR-18	1 lembar
316.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988180 tanggal 30-APR-18	2 lembar
317.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988181 tanggal 30-APR-18	2 lembar
318.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988182 tanggal 30-APR-18	1 lembar
319.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988184 tanggal 30-APR-18	1 lembar
320.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988186 tanggal 30-APR-18	1 lembar
321.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988187 tanggal 30-APR-18	1 lembar
322.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988188 tanggal 30-APR-18	2 lembar
323.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988189 tanggal 30-APR-18	1 lembar
324.	Faktur Pajak Nomor '0100021863988190 tanggal 29-APR-18	1 lembar
325.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988178 tanggal 30-APR-18	2 lembar
326.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988183 tanggal 30-APR-18	4 lembar
327.	Faktur Pajak Nomor '0110021863988185 tanggal 30-APR-18	2 lembar
328.	Nota Pembatalan Nomor '023/NP/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
329.	Nota Pembatalan Nomor '024/NP/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar

Halaman 237 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.	Nota Pembatalan Nomor '031/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
331.	Nota Pembatalan Nomor '032/NP/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
332.	Nota Pembatalan Nomor '033/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
333.	Nota Pembatalan Nomor '034/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
334.	Nota Pembatalan Nomor '035/NP/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
335.	Nota Retur Nomor '123/NR/IV/2018 tanggal 07-APR-18	1 lembar
336.	Nota Retur Nomor '124/NR/IV/2018 tanggal 12-APR-18	1 lembar
337.	Nota Retur Nomor '142/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
338.	Nota Retur Nomor '143/NR/IV/2018 tanggal 24-APR-18	1 lembar
339.	Nota Retur Nomor '161/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
340.	Nota Retur Nomor '162/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
341.	Nota Retur Nomor '163/NR/IV/2018 tanggal 30-APR-18	1 lembar
342.	Nota Pembatalan Nomor 'NP017/IV/2018 tanggal 30-APR-18	3 lembar
343.	Debit Note No: DN 001/2018 tgl 30-APR-18	1 lembar
344.	Debit Note No: 007/DB/UFI/IV/18 tgl 30-APR-18	3 lembar
345.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987827 tanggal 03-MAY-18	2 lembar
346.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987828 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
347.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987829 tanggal 09-MAY-18	2 lembar
348.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987830 tanggal 10-MAY-18	2 lembar
349.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987831 tanggal 15-MAY-18	1 lembar
350.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987833 tanggal 16-MAY-18	1 lembar
351.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987832 tanggal 16-MAY-18	2 lembar
352.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987835 tanggal 17-MAY-18	2 lembar
353.	Faktur Pajak Nomor '0710021863987834 tanggal 17-MAY-18	3 lembar
354.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987836 tanggal 20-MAY-18	1 lembar
355.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987837 tanggal 21-MAY-18	1 lembar
356.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987838 tanggal 24-MAY-18	2 lembar
357.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987839 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
358.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987840 tanggal 22-MAY-18	1 lembar
359.	Debit Note No: DN 002/2018 tgl 25 mei 2018	1 lembar
360.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987842 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
361.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987843 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
362.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987841 tanggal 25-MAY-18	2 lembar
363.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987844 tanggal 30-MAY-18	1 lembar
364.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987845 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
365.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987846 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
366.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987847 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
367.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987848 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
368.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987849 tanggal 31-MAY-18	1 lembar

Halaman 238 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987850 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
370.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987851 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
371.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987852 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
372.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987853 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
373.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987855 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
374.	Faktur Pajak Nomor 0100021863987856 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
375.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987857 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
376.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987858 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
377.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987860 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
378.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987861 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
379.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987863 tanggal 31-MAY-18	1 lembar
380.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987859 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
381.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987854 tanggal 31-MAY-18	2 lembar
382.	Nota Pembatalan Nomor '039/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
383.	Nota Pembatalan Nomor '041/NP/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
384.	Nota Pembatalan Nomor '042/NP/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
385.	Nota Pembatalan Nomor '044/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
386.	Nota Pembatalan Nomor '045/NP/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
387.	Nota Pembatalan Nomor '046/NP/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
388.	Nota Pembatalan Nomor '047/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
389.	Nota Pembatalan Nomor '048/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
390.	Nota Pembatalan Nomor '049/NP/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
391.	Nota Retur Nomor '172/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
392.	Nota Retur Nomor '188/NR/V/2018 tanggal 10-MAY-18	1 lembar
393.	Nota Retur Nomor '189/NR/V/2018 tanggal 08-MAY-18	1 lembar
394.	Nota Retur Nomor '206/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
395.	Nota Retur Nomor '207/NR/V/2018 tanggal 17-MAY-18	1 lembar
396.	Nota Retur Nomor '208/NR/V/2018 tanggal 14-MAY-18	1 lembar
397.	Nota Retur Nomor '226/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
398.	Nota Retur Nomor '227/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
399.	Nota Retur Nomor '228/NR/V/2018 tanggal 25-MAY-18	1 lembar
400.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/V/02/LOC/S tanggal 01-MAY-18	3 lembar
401.	Nota Pembatalan Nomor 'NP021/V/2018 tanggal 31-MAY-18	3 lembar
402.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987864 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
403.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987865 tanggal 07-JUN-18	2 lembar
404.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987866 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
405.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987867 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
406.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987869 tanggal 20-JUN-18	1 lembar
407.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987870 tanggal 21-JUN-18	2 lembar

Halaman 239 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987871 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
409.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987873 tanggal 15-JUN-18	1 lembar
410.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987874 tanggal 28-JUN-18	2 lembar
411.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987875 tanggal 29-JUN-18	1 lembar
412.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987876 tanggal 23-JUN-18	1 lembar
413.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987877 tanggal 28-JUN-18	1 lembar
414.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987878 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
415.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987879 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
416.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987880 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
417.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987881 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
418.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987882 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
419.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987883 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
420.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987884 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
421.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987885 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
422.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987886 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
423.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987887 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
424.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987889 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
425.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987890 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
426.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987891 tanggal 30-JUN-18	1 lembar
427.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987892 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
428.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987872 tanggal 25-JUN-18	6 lembar
429.	Faktur Pajak Nomor 0110021863987888 tanggal 30-JUN-18	4 lembar
430.	Nota Pembatalan Nomor '053/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
431.	Nota Pembatalan Nomor '054/NP/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
432.	Faktur Pajak Nomor '0700021863987868 tanggal 08-JUN-18	1 lembar
433.	Nota Retur Nomor '246/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
434.	Nota Retur Nomor '247/NR/VI/2018 tanggal 25-JUN-18	1 lembar
435.	Faktur Pajak Nomor 'NP026/VI/2018 tanggal 30-JUN-18	2 lembar
436.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987893 tanggal 05-JUL-18	2 lembar
437.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987894 tanggal 09-JUL-18	2 lembar
438.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987895 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
439.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987896 tanggal 12-JUL-18	2 lembar
440.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987897 tanggal 13-JUL-18	1 lembar
441.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987898 tanggal 14-JUL-18	1 lembar
442.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987899 tanggal 16-JUL-18	1 lembar
443.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987900 tanggal 19-JUL-18	2 lembar
444.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987901 tanggal 19-JUL-18	1 lembar
445.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987902 tanggal 20-JUL-18	1 lembar
446.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987903 tanggal 24-JUL-18	1 lembar

Halaman 240 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987904 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
448.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987905 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
449.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987906 tanggal 26-JUL-18	2 lembar
450.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987907 tanggal 11-JUL-18	1 lembar
451.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987908 tanggal 28-JUL-18	1 lembar
452.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987909 tanggal 30-JUL-18	1 lembar
453.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987910 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
454.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987912 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
455.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987913 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
456.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987914 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
457.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987915 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
458.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987916 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
459.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987917 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
460.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987918 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
461.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987920 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
462.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987921 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
463.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987922 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
464.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987923 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
465.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987924 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
466.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987925 tanggal 25-JUL-18	2 lembar
467.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987926 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
468.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987927 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
469.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987930 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
470.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987911 tanggal 31-JUL-18	1 lembar
471.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987919 tanggal 31-JUL-18	4 lembar
472.	Faktur Pajak Nomor 'MAI/2018/VII/003/LOC/S tanggal 01-JUL-18	7 lembar
473.	Faktur Pajak Nomor 'NP030/VII/2018 tanggal 31-JUL-18	2 lembar
474.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987928 tanggal 02-AUG-18	2 lembar
475.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987929 tanggal 06-AUG-18	1 lembar
476.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987931 tanggal 04-AUG-18	1 lembar
477.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987932 tanggal 09-AUG-18	2 lembar
478.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987933 tanggal 13-AUG-18	2 lembar
479.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987934 tanggal 14-AUG-18	1 lembar
480.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987935 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
481.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987936 tanggal 15-AUG-18	1 lembar
482.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987937 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
483.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987938 tanggal 18-AUG-18	1 lembar
484.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987939 tanggal 21-AUG-18	1 lembar
485.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987940 tanggal 23-AUG-18	2 lembar

Halaman 241 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987941 tanggal 25-AUG-18	2 lembar
487.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987942 tanggal 15-AUG-18	2 lembar
488.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987943 tanggal 28-AUG-18	1 lembar
489.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987944 tanggal 29-AUG-18	1 lembar
490.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987945 tanggal 30-AUG-18	1 lembar
491.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987946 tanggal 24-AUG-18	1 lembar
492.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987947 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
493.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987948 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
494.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987950 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
495.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987951 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
496.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987952 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
497.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987953 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
498.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987954 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
499.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987955 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
500.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987956 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
501.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987957 tanggal 31-AUG-18	2 lembar
502.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987958 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
503.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987959 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
504.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987960 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
505.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987961 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
506.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987962 tanggal 31-AUG-18	1 lembar
507.	Faktur Pajak Nomor '0110021863987949 tanggal 31-AUG-18	4 lembar
508.	Nota Pembatalan Nomor 'NP035/VIII/2018 tanggal 31-AUG-18	3 lembar
509.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985129 tanggal 06-SEP-18	1 lembar
510.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985130 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
511.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985131 tanggal 03-SEP-18	1 lembar
512.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985132 tanggal 13-SEP-18	2 lembar
513.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985133 tanggal 17-SEP-18	1 lembar
514.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985135 tanggal 15-SEP-18	2 lembar
515.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985136 tanggal 20-SEP-18	1 lembar
516.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985137 tanggal 20-SEP-18	2 lembar
517.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985138 tanggal 21-SEP-18	1 lembar
518.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985139 tanggal 22-SEP-18	1 lembar
519.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985140 tanggal 26-SEP-18	2 lembar
520.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985141 tanggal 27-SEP-18	2 lembar
521.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985143 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
522.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985144 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
523.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985146 tanggal 18-SEP-18	1 lembar
524.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985147 tanggal 30-SEP-18	1 lembar

Halaman 242 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985148 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
526.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985149 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
527.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985150 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
528.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985151 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
529.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985152 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
530.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985153 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
531.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985154 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
532.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985155 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
533.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985156 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
534.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985157 tanggal 30-SEP-18	2 lembar
535.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985158 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
536.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985159 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
537.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985160 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
538.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985161 tanggal 30-SEP-18	1 lembar
539.	Faktur Pajak Nomor '0100021863987963 tanggal 06-SEP-18	2 lembar
540.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985145 tanggal 29-SEP-18	4 lembar
541.	Nota Pembatalan Nomor 'NP041/IX/2018 tanggal 29-SEP-18	1 lembar
542.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985162 tanggal 01-OCT-18	1 lembar
543.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985163 tanggal 02-OCT-18	1 lembar
544.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985164 tanggal 04-OCT-18	2 lembar
545.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985165 tanggal 09-OCT-18	1 lembar
546.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985166 tanggal 11-OCT-18	3 lembar
547.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985167 tanggal 11-OCT-18	2 lembar
548.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985168 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
549.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985170 tanggal 15-OCT-18	1 lembar
550.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985172 tanggal 18-OCT-18	2 lembar
551.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985173 tanggal 18-OCT-18	1 lembar
552.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985174 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
553.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985175 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
554.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985176 tanggal 24-OCT-18	2 lembar
555.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985177 tanggal 25-OCT-18	2 lembar
556.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985178 tanggal 29-OCT-18	1 lembar
557.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985179 tanggal 22-OCT-18	1 lembar
558.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985180 tanggal 25-OCT-18	1 lembar
559.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985182 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
560.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985184 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
561.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985185 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
562.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985186 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
563.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985187 tanggal 31-OCT-18	1 lembar

Halaman 243 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985188 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
565.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985189 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
566.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985190 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
567.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985191 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
568.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985192 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
569.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985193 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
570.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985194 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
571.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985195 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
572.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985196 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
573.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985197 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
574.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985198 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
575.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985200 tanggal 31-OCT-18	1 lembar
576.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985169 tanggal 16-OCT-18	3 lembar
577.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985171 tanggal 15-OCT-18	2 lembar
578.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985181 tanggal 31-OCT-18	4 lembar
579.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985183 tanggal 31-OCT-18	2 lembar
580.	Nota Pembatalan Nomor 'NP047/X/2018 tanggal 31-OCT-18	3 lembar
581.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985199 tanggal 01-NOV-18	2 lembar
582.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985201 tanggal 05-NOV-18	1 lembar
583.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985202 tanggal 08-NOV-18	2 lembar
584.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985205 tanggal 15-NOV-18	3 lembar
585.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985206 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
586.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985207 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
587.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985208 tanggal 19-NOV-18	1 lembar
588.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985209 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
589.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985210 tanggal 20-NOV-18	1 lembar
590.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985211 tanggal 22-NOV-18	2 lembar
591.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985212 tanggal 26-NOV-18	2 lembar
592.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985213 tanggal 28-NOV-18	1 lembar
593.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985214 tanggal 22-NOV-18	1 lembar
594.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985215 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
595.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985216 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
596.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985217 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
597.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985218 tanggal 29-NOV-18	2 lembar
598.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985219 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
599.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985220 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
600.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985221 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
601.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985222 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
602.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985223 tanggal 30-NOV-18	2 lembar

Halaman 244 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

603.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985224 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
604.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985225 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
605.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985226 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
606.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985227 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
607.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985228 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
608.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985229 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
609.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985230 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
610.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985231 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
611.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985232 tanggal 30-NOV-18	1 lembar
612.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985203 tanggal 12-NOV-18	2 lembar
613.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985204 tanggal 15-NOV-18	4 lembar
614.	Nota Pembatalan Nomor '096/NP/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
615.	Nota Pembatalan Nomor '097/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
616.	Nota Pembatalan Nomor '098/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
617.	Nota Pembatalan Nomor '103/NP/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
618.	Nota Pembatalan Nomor '105/NP/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
619.	Nota Retur Nomor '453/NR/XI/2018 tanggal 08-NOV-18	1 lembar
620.	Nota Retur Nomor '459/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
621.	Nota Retur Nomor '460/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
622.	Nota Retur Nomor '465/NR/XI/2018 tanggal 15-NOV-18	1 lembar
623.	Nota Retur Nomor '482/NR/XI/2018 tanggal 29-NOV-18	1 lembar
624.	Nota Retur Nomor 'MAI/2018/XI/01/LOC/S tanggal 01-NOV-18	9 lembar
625.	Nota Pembatalan Nomor 'NP052/XI/2018 tanggal 30-NOV-18	2 lembar
626.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18	1 lembar
627.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18	2 lembar
628.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18	1 lembar
629.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
630.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18	2 lembar
631.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18	1 lembar
632.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18	2 lembar
633.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18	1 lembar
634.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985241 tanggal 20-DEC-18	2 lembar
635.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18	2 lembar
636.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985243 tanggal 24-DEC-18	1 lembar
637.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985244 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
638.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985245 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
639.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985247 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
640.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985248 tanggal 27-DEC-18	1 lembar
641.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985249 tanggal 20-DEC-18	1 lembar

Halaman 245 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



642.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985250 tanggal 28-DEC-18	1 lembar
643.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985251 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
644.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985252 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
645.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985253 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
646.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985254 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
647.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985255 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
648.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985256 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
649.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985257 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
650.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985258 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
651.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985259 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
652.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985260 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
653.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985261 tanggal 26-DEC-18	1 lembar
654.	Faktur Pajak Nomor '0100021863985262 tanggal 31-DEC-18	1 lembar
655.	Faktur Pajak Nomor '0110021863985246 tanggal 26-DEC-18	4 lembar
656.	Nota Pembatalan Nomor '107/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
657.	Nota Pembatalan Nomor '108/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
658.	Nota Pembatalan Nomor '109/NP/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
659.	Nota Pembatalan Nomor '511/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
660.	Nota Pembatalan Nomor '512/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
661.	Nota Pembatalan Nomor '513/NR/XII/2018 tanggal 21-DEC-18	1 lembar
662.	Nota Pembatalan Nomor 'NP057/XII/2018 tanggal 31-DEC-18	2 lembar
663.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985233 tanggal 03-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	5 lembar
664.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985234 tanggal 06-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	15 lembar
665.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985235 tanggal 12-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	47 lembar
666.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985236 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	49 lembar
667.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985237 tanggal 13-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	23 lembar
668.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985238 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	13 lembar
669.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985239 tanggal 15-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	73 lembar
670.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985240 tanggal 17-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	24 lembar
671.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor	33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	'0100021863985241 tanggal 20-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	lembar
672.	Memo Pembukuan (Bukti Jurnal) untuk Faktur Pajak Nomor '0100021863985242 tanggal 22-DEC-18, Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan	45 lembar
673.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0334/JIC-PP/X/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985187, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 10-2018	6 lembar
674.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0229/JIC-PP/IX/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63985152, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 09-2018	8 lembar
675.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0265/JIC-PP/VIII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987953, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 08-2018	11 lembar
676.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0226/JIC-PP/VII/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987914, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 07-2018	10 lembar
677.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0161/JIC-PP/V/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63987850, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 05-2018	9 lembar
678.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0124/JIC-PP/IV/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988177, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 04-2018	9 lembar
679.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0088/JIC-PP/III/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988141, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 03-2018	10 lembar
680.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0055/JIC-PP/II/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988108, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 02-2018	8 lembar
681.	Application Detail Fund Transfer, Invoice No GF/0014/JIC-PP/I/2018, Surat Jalan, Faktur Pajak Nomor 010.002.18-63988067, Purchase Order dan Formulir 1111 B2 masa 01-2018	6 lembar
682.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-125, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
683.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-126, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
684.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-127, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
685.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-129, Bukti Penerimaan, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	4 Lembar
686.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-130, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
687.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-132, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	82 Lembar
688.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-133, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
689.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-134, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
690.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-135, Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran	3 Lembar
691.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-136, Bukti Pengeluaran	2 Lembar
692.	1 Set Dokumen TranTerdakwa yang terdiri dari Jurnal Voucher no. BB-1802-170, Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung	3 Lembar
693.	Printout General Ledger AC:10.01.018 BNI-IDR	2 Lembar

Halaman 247 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Dokumen PT SHOWA INDONESIA MANUFACTURING		
694.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/025, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Nota Retur, Nota Pembatalan, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0062/SIM/III/2018, Invoice nomor GF/0054/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988115, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak 010.002-18.63988107.	69 Lembar
695.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/019, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0032/SIM/III/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988085, Surat Jalan, Purchase Order.	27 Lembar
696.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List MUFG Bank, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/027, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Nota Pembatalan, Nota Retur, Billing Statement, Invoice nomor GF/0063/SIM/III/2018, Nota Kredit, Faktur Pajak 010.002-18.63988116, Surat Jalan, Purchase Order.	37 Lembar
697.	1 Set TranTerdakwa Pembelian yang terdiri dari Transaction List Bank Of Tokyo Mitsubishi, Application Transfer Summary SIM-BTMU/2018/021, Bukti Pengeluaran, Supplier Invoice Summary, Supplier Invoice Posting Information, Bukti Potong PPh Pasal 23, Billing Statement, Invoice nomor GF/0035/SIM/II/2018, Faktur Pajak 010.002-18.63988088, Surat Jalan, Purchase Order.	27 Lembar
698.	1 Set Dokumen Faktur Pajak dari PT GANSA FURINDO tahun 2018.	106 Lembar
<b>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI KANWIL DJP JAWA BARAT</b>		
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
699.	Painting Equipment Low Temperature. Terdiri dari: - Mesin Conveyor dan dynamo penggerak Merk JOIL, - 1 Mesin Pompa Cat Merk ANZEN, - 1 Panel/Kontrol Mesin, - 2 Ruang Painting dan, - Ruang Oven	1 Set
700.	Sand Blasting Rear Grip Equipment, Merk/Buatan PT KAKAZU INDONESIA serial no. TCH-AS6 700	1 Set
<b>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DENDA</b>		
<b>Dokumen PT ASTRA OTOPARTS</b>		
701.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Surat Pemberitahuan, Verification Letter, Invoice Nomor GF/0213/AOP/VII/2018, GF/0209/AOP/VI/2018, Surat Jalan, Purchase Order, Faktur Pajak No 010.00218.63987901, 010.00218.63987864, Bukti Transfer, Order Sheet Subcontracting	178 Lembar
702.	1 Set Dokumen Pembelian terdiri dari Document Checklist, Incoming Documen Receipt, Invoice nomor GF/0103/AOP/IV/2018, GF/0098/AOP/III/2018, GF/0112/AOP/IV/2018, GF/0095/AOP/III/2018, Berita Acara Sewa Gedung, Service Entry Sheet Acceptance, Purchase Order, Faktur Pajak Nomor 010.00218.63988156, 010.00218.63988151,	133 Lembar





	010.00218.63988165, 010.00218.63988148, Surat Jalan, Order Sheet Subcontracting	
<b>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI KANWIL DJP JAWA BARAT</b>		
<b>ASET PT GANSA FURINDO</b>		
703.	Liquid Painting Coating Machine, terdiri dari: a. 1 (satu) Chain Hoist Merk Kito, Tipe Single, Kapasitas 2 Ton, ukuran 17.2 m P x 6 m L, hanger isi 30 pcs; b. 1 (satu) Air Blow; c. 1 (satu) Painting Liquid Merk Kakazu Indonesia, Tipe PCN-TM-250, ukuran 360 cm P x 245 cm L x 215 cm T dengan motor listrik 640 watt dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>1 (satu) Spray Gun Merk Anzen, Tipe DP-3</li><li>1 (satu) Blower dengan motor listrik 5.5 HP dan cerobong asap 25 m P x diameter 60 cm</li><li>1 (satu) Backing Oven ukuran 420 cm P x 290 cm L x 150 cm T, dengan motor listrik 2 x 1.5 HP dan 1 (satu) Conveyer Jig ukuran 2500 cm P</li></ul> d. Panel control	1 Set
<b>DIRAMPAS UNTUK NEGARA DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DENDA</b>		
<b>Dokumen ELYSA ROSITA (Staf Accounting dan Pajak PT GANSA DURINDO)</b>		
704.	1 set Rekening Koran Bank BII cabang KK Lippo Cikarang nomor 2-246-000433 atas nama PT GANSA FURINDO	9 Lembar
705.	General Ledger A/C: 10.01.018 BNI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	12 Lembar
706.	General Ledger A/C: 10.01.017 ARTHA GRAHA BANK-IDR Periode 1 Oktober 2017 to 31 Desember 2019	8 Lembar
707.	General Ledger A/C: 10.01.019 BRI-IDR Periode 1 Januari 2018 to 31 Desember 2018	21 Lembar
<b>DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI KANWIL DJP JAWA BARAT</b>		

4. Membebaskan kepada Terdakwa PT. Gansa Furindo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, oleh **Al Fadjri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Albert Dwiputra Sianipar, S.H.** dan **Suhadi Putra Wijaya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 10 **Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa PT. Gansa Furindo yang diwakili oleh sdr. Yohanes Susatyo Muhandoko selaku Direktur Utama PT. Gansa Furindo tersebut diatas dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 249 dari 250 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**

Ttd.

**Al Fadjri, S.H.**

Ttd.

**Suhadi Putra Wijaya, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)